

POPULASI, 10(1), 1999

SUSUNAN PENGELOLA

Ketua Pengarah

Agus Dwiyanto

Ketua Penyunting

Anna Marie Wattie

Sekretaris

Wini Tamtiari

Staf Penyunting

Tukiran

Kasto

Sukamdi

Faturochman

Penyunting Ahli

Sofian Effendi

Ida Bagoes Mantra

Djamaluddin Ancok

Irwan Abdullah

Muhadjir Darwin

Chris Manning (Canberra)

Hans-Dieter Evers (Bielefeld)

Benjamin White (Den Haag)

Penyunting Bahasa

Sugihastuti

Diterbitkan oleh

Pusat Penelitian Kependudukan

Universitas Gadjah Mada

Alamat Redaksi

Bulaksumur Blok G-7

Yogyakarta - 55281

Telp. (0274) 563079 - 901152

Fax (0274) 582230

E-mail.

psc-gmu@yogya.wasantara.net.id

Homepage.

http://www.ugm.ac.id/pscgm/

Surat Tanda Terdaftar

Deppen RI No.: 2000/SK/Ditjen -

PPG/SST/94

Tanggal 9 Maret 1994

ISSN 0853-0262

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	ii
Krisis Nasional: Respons Penduduk Miskin dan Pemerintah <i>Muhadjir Darwin</i>	1
Krisis Ekonomi, Daya Tahan Penduduk, dan <i>Social Security</i> : Kasus Jatinom di Jawa Tengah <i>Irwan Abdullah</i>	15
Krisis dan Nasib Buruh di Perdesaan <i>Faturochman</i>	27
Dinamika Pengusaha Industri Cor Logam di Masa Krisis <i>Susi Eja Yuarsi</i>	43
Sriharjo pada Masa Krisis <i>Pande Made Kutanegara</i>	55
Resistensi dan Fleksibilitas Penduduk Perdesaan Lahan Kering <i>Tukiran dan Agus Sutanto</i>	73

POPULASI merupakan majalah berkala, terbit dua kali setahun, setiap bulan Juli dan Desember. Redaksi menerima karangan yang menitikberatkan pada bidang kependudukan. Naskah harus belum pernah dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain, berupa ketikan asli dengan renggang ganda, tidak lebih dari 25 halaman termasuk daftar pustaka. Redaksi berhak membuat perubahan dalam karangan tanpa mengubah isi atau maksud karangan.

PENGANTAR REDAKSI

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan 1997 sampai saat ini masih belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis yang dialami ini merupakan krisis yang bersifat multidimensional, yang menimpa semua sektor kehidupan penduduk. Berkaitan dengan masalah krisis tersebut, *Populasi* terbitan kali ini secara khusus menyajikan berbagai respons masyarakat perdesaan terhadap krisis berdasarkan hasil penelitian singkat di lima daerah yaitu Jatinom, Wedi, dan Batur di Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, Sriharjo di Kabupaten Bantul, dan Semanu di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi yang disajikan dalam *Populasi* ini merupakan hasil *proceeding* seminar "Dampak Krisis di Perdesaan" yang diselenggarakan oleh IPADI (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia) cabang Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kependudukan pada 24 April 1999.

Tulisan pertama merupakan pendahuluan sekaligus rangkuman dari tulisan lainnya. Pada bagian ini Muhadjir Darwin memaparkan berbagai dampak krisis yang dirasakan masyarakat di lima daerah penelitian. Variasi dampak yang dialami penduduk yang berbeda jenis pekerjaannya ini,

antara lain, disebabkan oleh faktor penguasaan sumber daya dan rasio faktor *output* terhadap *input* dalam sistem produksi. Selain itu, dijelaskan juga variasi strategi yang dilakukan oleh penduduk dan pemerintah dalam menghadapi krisis yang sedang berlangsung.

Salah satu kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak krisis adalah buruh. Tulisan Faturachman dan Pande Made Kutaneegara membahas nasib buruh berdasarkan penelitian di Desa Wedi dan Sriharjo. Kaum buruh yang sudah miskin menjadi lebih miskin lagi dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup. Selanjutnya Irwan Abdullah dalam tulisannya merefleksikan respons masyarakat Jatinom dalam menghadapi krisis yang bukan merupakan hal baru bagi mereka. Mengenai dampak krisis pada aspek usaha, Tukiran dan Agus Sutanto memaparkan hasil penelitiannya di Semanu dan Susi Eja Yuarsi pada usaha cor logam di Batur. Program aksi penanggulangan dampak krisis yang mengandalkan usulan kegiatan dari masyarakat tampaknya lebih berhasil daripada yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesesuaian antara jenis kegiatan dengan kemampuan masyarakat menjadi pilihan utama dalam penanggulangan dampak krisis.

Wini Tamtari

KRISIS NASIONAL: RESPONS PENDUDUK MISKIN DAN PEMERINTAH

Muhadjir Darwin*

Abstract

The acute and complex national crisis persisting in this country has in general worsened the quality of live of the poor. However, empirical studies in five Javanese villages found that the impact of the crisis varies among different social groups, such as peasants, labors, small entrepreneurs and traders. This paper elaborates a number of factors that make the crisis affect differently to different people. This paper also shows how the poor develop their strategy of survival during the crisis and how government programs which attempt to eliminate the impacts of the crisis to the poor are in fact has failed to match the way the poor deal with the crisis.

Pendahuluan

Indonesia bukan yang pertama dan satu-satunya negara di Asia yang mengalami krisis ekonomi, tetapi skala krisis yang dialaminya adalah yang terparah di Asia. Ekonomi Indonesia mengalami perlambatan secara tajam dalam tingkat pertumbuhannya. Jika pada awal terjadinya krisis, yaitu tahun 1997, ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 4,91%, setahun kemudian pertumbuhannya merosot tajam menjadi negatif 13,68%. Itu berarti bahwa terjadi penurunan kinerja hampir sebesar 19 poin, atau 4 poin lebih tinggi dibandingkan dengan yang dialami Amerika Serikat pada masa depresi besar tahun 1930-an. Inflasi meningkat

tajam menjadi sekitar 77,63% dalam tahun 1988, dan nilai rupiah anjlok dan pernah mencapai sekitar Rp15.000,00 per dolar US. Depresiasi mata uang ternyata tidak disertai peningkatan nilai ekspor. Sebaliknya, ekspor barang tertekan dengan pertumbuhan negatif 8,7 persen. Karena turunnya daya beli masyarakat dan naiknya nilai barang impor, jumlah impor pun menurun pada tingkat 34,2 persen pada tahun 1998. Akibatnya, defisit neraca berjalan menurun pada tahun fiskal 1997/1998 (Sumodiningrat, 1999).

Krisis ini benar-benar membuat ekonomi terpuruk ke jurang yang sangat dalam. Sektor riil ambruk.

* Dr. Muhadjir Darwin adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan staf pengajar Fakultas Isipol, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Aburizal Bakri, Ketua Kamar Dagang Indonesia, menaksir bahwa selama tahun 1998 semua industri di Indonesia hanya beroperasi 50 persen dari kapasitas totalnya (Tjiptoherijanto, 1999: 4). Penurunan *output* tertinggi terjadi pada konstruksi, perdagangan, keuangan, dan industri pengolahan. Sektor pertanian relatif bisa bertahan meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Selain sektor riil, sektor perbankan juga ambruk. Keduanya menimbulkan gelombang PHK yang besar, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jika sebelum krisis angka pengangguran terbuka total hanya sebesar 7 persen setahun, setelah krisis angkanya meningkat menjadi sebesar 17,1 persen atau sekitar 15,4 juta (Effendi, 1998).

Krisis yang dialami Indonesia menjadi lebih menyeluruh karena krisis ini merambat ke sektor-sektor lain yaitu politik dan keamanan. Gelombang demonstrasi terjadi susul-menyusul, yang kemudian mencapai klimaksnya dengan lengsernya Soeharto pada Mei 1998. Akan tetapi, pergantian pemerintahan tidak segera dapat memulihkan stabilitas politik dan keamanan. Situasi politik tetap memanas sampai menjelang pemilu. Namun, setelah Pemilu 1999 berakhir dengan relatif aman, damai dan jurdil, situasi politik untuk sementara mulai mendingin. Menurunnya suhu politik telah

menimbulkan harapan baru, yaitu sistem politik nasional yang demokratis dan stabil. Pada saat makalah ini ditulis, terdapat titik terang ke arah pemulihan ekonomi, yaitu turunnya nilai dolar hingga menembus angka Rp6.000,00-an. Jika situasi politik selanjutnya tetap terjaga aman dan damai, pemulihan ekonomi diharapkan dapat terjadi. Akan tetapi, jika situasi politik nanti kembali memanas, misalnya jika pemerintah baru nanti gagal memperoleh legitimasi, bukan tidak mungkin, situasi ekonomi menjadi memburuk kembali.

Walaupun rupiah cenderung menguat, tampaknya masih terlalu pagi untuk menyimpulkan bahwa krisis ekonomi sudah berakhir atau segera berakhir. Kredit macet yang dialami perbankan nasional masih merupakan masalah yang sulit teratasi. Sektor riil juga masih memerlukan waktu lama untuk bangkit kembali. Angka pengangguran masih sangat tinggi, dan perlu waktu untuk terciptanya lapangan kerja yang baru.

Pertanyaan yang secara spesifik perlu dikaji di sini adalah bagaimana krisis yang sangat dahsyat ini berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi rakyat kecil, bagaimana penduduk miskin merespons krisis untuk menjaga kelangsungan hidupnya, serta seberapa jauh respons yang diberikan pemerintah memberikan nilai tambah pada penduduk miskin dalam upaya mereka bergulat mengatasi kesulitan ekonomi.

Dampak Krisis pada Masyarakat Kecil

Bagaimanapun juga, krisis sedemikian hebat yang telah berlangsung sejauh ini sudah menimbulkan dampak yang luar biasa pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil. Pembangunan nasional dimulai tahun 1970 ketika sekitar 70 juta penduduk (60 persen) hidup di bawah kemiskinan. Sampai sebelum datangnya krisis, sekitar awal tahun 1997, Indonesia banyak dipuji karena keberhasilannya mengurangi angka kemiskinan hingga tinggal 11 persen (22 juta) penduduk. Akan tetapi, krisis telah membuat angka kemiskinan naik kembali secara tajam menjadi sekitar 80 juta pada pertengahan 1998, atau naik sekitar 400 persen. Angka kemiskinan saat ini telah mencapai 53 persen untuk perdesaan dan 39 persen untuk perkotaan. Bahkan, diperkirakan 2 dari 3 penduduk Indonesia tergolong miskin (Effendi, 1998:3). Ini artinya bahwa dari sudut penyelesaian masalah kemiskinan, kita telah mundur ke belakang, ke situasi ketika pembangunan nasional dimulai.

Di bidang pendidikan prestasi yang pernah kita capai pun nyaris terhapus. Angka melek huruf telah berhasil meningkat pesat, demikian juga angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah tingkat dasar telah mencapai 100 persen, dan wajib belajar 9 tahun telah dicanangkan. Akan tetapi, selama krisis terdapat 4,5 juta anak sekolah yang tidak dapat melanjutkan

sekolah, dan pemerintah hanya mampu membantu 1,6 juta di antaranya (*Kompas*, 30 Juli, 1998, dalam Tajudin, hlm. 3). Dalam bidang kesehatan, tingkat morbiditas dan mortalitas juga telah menurun, yang hal ini menjadi indikasi dari meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi, krisis ekonomi telah menurunkan akses penduduk, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan. Banyak kasus pasien yang terlambat datang ke rumah sakit karena kesulitan ekonomi, atau beralih dari pengobatan modern ke pengobatan tradisional karena alasan biaya.

Meskipun secara umum krisis ekonomi telah membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami kemerosotan, dampak yang dialami berbagai kelompok masyarakat sesungguhnya berbeda, misalnya antara masyarakat Jawa dan luar Jawa, antara perdesaan dan perkotaan, antara sektor industri dan pertanian, dan seterusnya. Di samping banyak yang mengalami dampak buruk oleh adanya krisis, ada pula yang diuntungkan oleh krisis. Variasi dampak krisis penting untuk diketahui karena dengan itu pemerintah dapat mengambil respons yang tepat sasaran.

a. Gambaran Mikro

Variasi dampak krisis tampak dari penelitian di sejumlah kawasan di DIY dan Jawa Tengah yang dilakukan PPK-UGM, antara lain

Jatinom, Wedi, dan Ceper (Klaten), Sriharjo (Bantul), Semanu (Gunung Kidul). Meskipun sama-sama terletak di wilayah tengah Pulau Jawa, Jatinom dan Ceper berada di Propinsi Jawa Tengah bagian selatan, Semanu dan Sriharjo berada di Propinsi DIY.

Jatinom adalah suatu kecamatan yang memiliki kawasan pertanian dan kawasan perdagangan serta industri kecil. Satu bagian, disebut wilayah atas, merupakan kawasan pertanian, peternakan (sapi perah), dan perkebunan (jeruk), dan di bagian lain, disebut wilayah bawah, merupakan daerah perdagangan dan industri kecil.

Kecamatan Wedi memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan Jatinom. Jika Jatinom terletak di antara dua Kabupaten Klaten dengan Boyolali dan menjadi pusat perdagangan yang maju bagi kawasan sekitarnya, Wedi terletak antara Klaten dan Yogyakarta, dan daerah ini juga merupakan pusat perdagangan yang juga relatif maju. Di situ terdapat banyak aktivitas perdagangan, industri konveksi, pertanian, dan perkebunan (tembakau).

Kecamatan Ceper adalah kawasan pertanian yang di dalamnya terdapat satu dusun bernama Batur, suatu dusun yang merupakan pusat industri kerakyatan seperti genting, batu bata, dan cor logam. Industri jenis terakhir inilah yang menjadi andalan Ceper karena kontribusinya kepada kemajuan ekonomi kawasan ini.

Berbeda dengan ketiga wilayah tersebut di atas, Sriharjo dan Semanu, dua-duanya berada di wilayah Propinsi DIY, adalah kawasan yang tidak berkembang sebagai pusat industri dan pusat perdagangan. Desa Sriharjo masih didominasi oleh sektor pertanian. Akan tetapi, karena kepadatan penduduk desa ini dan implikasinya pada keterbatasan penguasaan lahan pertanian, sejak lama banyak penduduk Sriharjo *nglaju* bekerja ke luar desa sebagai buruh, atau *mboro* ke tempat yang lebih jauh sebagai buruh, pedagang kecil, atau pembantu rumah tangga. Sriharjo adalah desa yang kisah tentang kemiskinannya telah dipotret secara mendalam dalam buku klasik Masri Singarimbun dan David Penny, *Penduduk dan Kemiskinan di Pedesaan Jawa*.

Semanu, seperti juga Sriharjo, adalah kawasan yang sarat kemiskinan, dan jauh dari derap industrialisasi karena terletak di kawasan yang dilihat dari potensi risorsisnya dan letak geografisnya relatif kurang menjanjikan, yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Seperti Sriharjo, kemiskinan begitu mudah diamati. Sektor pertanian di sini tidak banyak dapat diandalkan, sementara kesempatan kerja di luar pertanian tidak banyak tersedia, dan karenanya banyak dari tenaga kerja muda memilih *mboro* ke kota seperti ke Yogya, Jakarta, atau ke kota-kota lain di Indonesia.

Secara umum krisis ekonomi menimbulkan dampak negatif pada

rata-rata penduduk di lima daerah penelitian di atas. Kenaikan harga barang-barang dan ongkos pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, jelas dirasakan oleh setiap penduduk sebagai beban ekonomi yang memberatkan. Kenaikan seperti ini sudah barang tentu akan lebih berdampak buruk pada mereka yang tidak mengalami kenaikan pendapatan, terlebih yang tingkat pendapatannya mengalami penurunan, atau bahkan kehilangan sumber pendapatan. Namun, secara khusus terdapat variasi dampak yang menarik untuk dicermati. Variasi tersebut tampak, misalnya, jika dibandingkan antara buruh, petani, pedagang, dan pengusaha.

b. Buruh

Buruh, baik di sektor pertanian maupun industri, secara umum dirugikan. Di Sriharjo banyak buruh pabrik dan konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka yang sebelumnya *mboro* kembali ke desa dan mencoba menggeluti kembali pertanian sebagai buruh tani. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka ternyata tidak kerasan dan kembali balik ke kota. Hal yang sama juga dialami oleh buruh di Wedi. Buruh tani dan buruh konveksi sama-sama dirugikan. Kenaikan pendapatan sangat tidak sebanding dengan kenaikan pengeluaran, dan terdapat defisit pendapatan (jumlah pengeluaran lebih banyak daripada

pendapatan). Di antara keduanya, tampaknya buruh tani mengalami nasib yang lebih buruk dibandingkan dengan buruh konveksi.

c. Petani

Berbeda dengan buruh, para petani pada umumnya diuntungkan oleh adanya krisis. Ini dikarenakan naiknya harga komoditas produk-produk pertanian. Situasi yang menggembirakan ini dialami misalnya oleh petani jeruk, petani cengkeh, petani kapas, dan sebagainya yang banyak terdapat di Jatinom. Sayangnya, penguasaan lahan rata-rata penduduk di Jatinom sangat rendah. Banyak petani di daerah ini menguasai lahan sempit (petani gurem), dan lebih banyak lagi yang berstatus buruh tani. Karena itu, dampak positif krisis hanya dialami oleh sebagian penduduk pertanian di Jatinom. Selain itu, situasi yang menggembirakan tidak dialami oleh semua petani pemilik lahan. Petani padi, misalnya, kurang diuntungkan karena kenaikan harga beras tidak sebanding dengan kenaikan harga *input* pertanian. Pasalnya bahan baku kimiawi untuk produksi *input* pertanian kebanyakan merupakan barang impor yang harganya melonjak seiring dengan melonjaknya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Hal ini dilaporkan dalam penelitian di Semanu, tetapi sesungguhnya juga terjadi di daerah lain, seperti Sriharjo, Jatinom, dan Wedi.

d. Peternak

Sama dengan petani, peternak juga banyak diuntungkan oleh naiknya harga ternak, seperti kambing, sapi, susu sapi, udang, kepiting, katak, dll. Keuntungan peternak ini ditemukan dalam penelitian di Jatinom dan Semanu. Krisis ini bahkan membuat penduduk lebih gigih menemukan alternatif peternakan yang sebelum krisis tidak banyak dilirik, seperti ternak jangkrik, cacing, keong mas, dsb., yang ternyata nilai ekonominya sangat tinggi di pasar. Namun, tidak semua kegiatan peternakan mengalami dampak positif selama krisis. Ternak ayam, misalnya, banyak mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan selama krisis. Ini disebabkan kenaikan harga ternak tersebut tidak sebanding dengan naiknya harga pakan dan obat-obatan yang sebagian besar masih merupakan barang impor.

e. Industri dan Perdagangan

Dampak yang dialami oleh sektor industri dan perdagangan sangat variatif. Di Ceper, banyak pemilik industri pengecoran logam mengalami kemunduran usaha, bahkan kebangkrutan. Masalahnya karena bahan baku industri tersebut masih diimpor sementara kebanyakan produk masih untuk keperluan pasar domestik. Sementara itu, kenaikan harga produk untuk pasar domestik jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga bahan baku. Situasi seperti ini juga dialami oleh perajin

pande besi, industri pengolahan tempe di Semanu. Para pengusaha di bidang ini banyak merugi karena mahalannya bahan baku impor. Akan tetapi, situasi sebaliknya terjadi pada pengusaha yang telah menguasai pasar luar negeri. Keuntungan yang diperoleh justru berlipat selama krisis. Ini dialami oleh sebagian kecil pengusaha pengecoran logam di Ceper dan perajin kayu di Semanu. Kasus Semanu memberikan gambaran yang ekstrim. Perajin kayu tersebut memproduksi patung kayu seperti *loro-blonyo* (ukuran orang) atau miniatur buaya dengan bahan kayu lokal Mahoni untuk ekspor ke Singapura dan Canada. Hal yang sama juga dialami oleh perajin batu ornamen.

Perdagangan merupakan sektor usaha yang mengalami dampak krisis yang cukup variatif. Pedagang beras di Jatinom misalnya mengeluh merugi karena perubahan harga komoditas beras sulit diprediksi. Perdagangan, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer, mengalami kelesuan karena menurunnya daya beli konsumen. Banyak konsumen yang mengalami penurunan tingkat pendapatan mengalihkan konsumsinya ke barang-barang yang lebih primer, seperti kebutuhan makanan dan kesehatan. Namun dalam beberapa kasus, perdagangan menjadi alternatif okupasi bagi mereka yang tercampak dari jenis okupasi lain, misalnya dari sektor jasa atau industri. Pengusaha konveksi di Wedi, misalnya, banyak

yang beralih menjadi pedagang beras. Di Semanu, misalnya, pegawai swasta yang terkena PHK dengan pesangon menggunakan pesangon tersebut sebagai modal usaha dagang (warung) di rumah atau di pasar.

Pembeda Variasi Dampak

Dari penjelasan tentang dampak pada setiap jenis okupasi, tampaknya ada beberapa faktor pembeda variasi dampak yang dialami penduduk. Salah satu faktor yang dimaksud adalah penguasaan risorsis. Penduduk yang menguasai risorsis lebih tahan terhadap krisis dibandingkan dengan mereka yang tidak menguasai risorsis. Ini tampak, misalnya jika dilakukan perbandingan antara petani dan buruh tani, pengusaha dan buruh pabrik. Buruh pada umumnya rentan terhadap krisis karena nasibnya tergantung pada nasib majikan di tempat mereka bekerja. Buruh tersebut akan mudah kehilangan pekerjaan jika usaha majikan mengalami kemunduran, apalagi jika mengalami kebangkrutan. Pengusaha tersebut sudah barang tentu juga mengalami kerugian. Akan tetapi, ia mempunyai peluang lebih besar untuk keluar dari krisis, misalnya, dengan mengalihkan jenis usaha. Buruh pun dapat berbuat serupa, tetapi peluang untuk itu lebih terbatas karena terbatasnya keterampilan yang dikuasai dan ketiadaan risorsis yang mereka miliki.

Hal penting lain dalam menjelaskan variasi dampak krisis

adalah dampak yang dialami petani pemilik lahan dan pengusaha. Seperti dijelaskan di atas, akibat yang dialami petani, peternak dan pengusaha berbeda, ada yang dirugikan, tetapi ada juga yang diuntungkan oleh adanya krisis. Perbedaan tersebut terletak pada kombinasi *input* dan *output* dalam sistem produksi mereka. Misalnya, petani, peternak, dan pengusaha yang menggunakan bahan baku *import* cenderung dirugikan oleh adanya krisis Karena produk yang dihasilkan dijual di dalam negeri. Hal ini misalnya terjadi pada petani padi, peternak ayam, sebagian besar pengusaha pengecoran, dan perajin pande besi. Sebaliknya, pengusaha yang memasarkan produknya ke luar negeri, apalagi jika bahan bakunya merupakan barang lokal cenderung sangat diuntungkan oleh adanya krisis. Hal ini secara jelas dialami oleh peternak udang, katak sapi (*bull-frog*), sebagian kecil pengusaha pengecoran logam, dan perajin kayu. Di samping itu, ada juga petani dan pengusaha yang baik bahan baku atau produknya dari dan untuk pasar domestik masih diuntungkan oleh adanya krisis. Mereka diuntungkan karena kenaikan harga produk dalam negeri masih lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga *input*. Hal ini terjadi misalnya pada petani jeruk, apel, dan kapuk.

Di atas telah dijelaskan bahwa mereka yang tidak menguasai risorsis atau menguasai risorsis dalam jumlah yang terbatas,

misalnya buruh dan petani gurem, secara ekonomi sangat dirugikan oleh adanya krisis. Kualitas kesejahteraan ekonomi mereka yang memang sebelumnya belum tinggi merosot lebih rendah lagi. Meskipun secara ekonomi buruh dan petani gurem lebih menderita dibandingkan dengan petani pemilik lahan dan pengusaha, tidak selalu berarti bahwa dampak psikologis yang dialami buruh dan petani gurem lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik lahan luas, pengusaha pabrik atau kerajinan. Para buruh dan petani gurem tersebut melihat kemiskinan sebagai suatu hal yang tidak asing. Sebelum krisis pun mereka sudah miskin. Mereka juga tahu betul bagaimana menyiasati krisis, baik dalam hal mencari alternatif sumber pendapatan (tentu saja dalam batas kapasitasnya) maupun dalam mengatur pola konsumsi. Ungkapan dari penduduk Sriharjo yang mengatakan bahwa krisis sekarang “belum apa-apa” tidak harus diartikan bahwa dia tidak mengalami krisis, tetapi harus diartikan bahwa krisis tersebut merupakan situasi keseharian yang mereka alami selama hidup. Mereka juga mempunyai cara sendiri untuk merespons situasi krisis, misalnya dengan mengurangi tingkat konsumsi atau mengubah pola konsumsi.

Tampaknya efek psikologis krisis sangat bervariasi tergantung pada pola hidup penduduk. Penduduk yang telah terbiasa dengan pola konsumsi tinggi akan

berbeda dengan mereka yang terbiasa dengan pola konsumsi terbatas. Di Sriharjo penduduk Sriharjo atas sejak lama lebih miskin dibandingkan dengan penduduk Sriharjo bawah. Akan tetapi, penduduk Sriharjo bawah yang lebih banyak bersentuhan dengan barang-barang dan pola hidup perkotaan lebih merasakan krisis dibandingkan dengan penduduk Sriharjo atas. Perbedaan tersebut tidak terletak pada situasi ekonomi yang riil, tetapi pada makna yang diberikan terhadap krisis dan kebutuhan-kebutuhan dirinya.

Strategi Kelangsungan Hidup

Hal yang kemudian penting untuk dilihat adalah bagaimana penduduk yang mengalami krisis tersebut mengembangkan strategi sendiri untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Tampaknya ada beberapa macam strategi yang ditemui dalam penelitian di lima tempat tersebut. Pertama adalah yang sifatnya produktif dan lainnya yang sifatnya konsumtif. Produsen yang menurun tingkat keuntungannya karena naiknya harga *input* produksi melakukan penghematan penggunaan *input*. Ini terjadi pada produsen cor logam di Ceper dengan menipiskan besi sehingga lebih hemat *input*. Petani yang dirugikan oleh mahalnya pupuk mengurangi jumlah pupuk atau mengganti jenis pupuk dari pupuk pabrik ke pupuk kandang. Cara lain yang mereka tempuh adalah dengan mengonsentrasikan usaha pada komoditas ekspor. Ini

misalnya dilakukan oleh perajin kayu di Semanu atau sebagian kecil pengusaha cor logam di Ceper. Ketika kegiatan usaha yang digeluti pengusaha tidak mempunyai prospek sehingga gulung tikar, banyak pengusaha yang kemudian mengalihkan usaha ke bidang lain. Ini misalnya dilakukan oleh pengusaha konveksi yang menutup usaha konveksinya dan beralih menjadi pedagang beras. Perlu juga dicatat bahwa ada sebagian penduduk yang sebelumnya bekerja di sektor jasa, misalnya sebagai pegawai, berubah menjadi pedagang dan pengusaha, misalnya dengan membuka warung, beternak jangkrik, beternak cacing, beternak keong mas, dsb. Banyak dari mereka justru mengalami kenaikan kesejahteraan ekonomi di bidang usaha yang baru tersebut.

Strategi kelangsungan hidup juga dapat dilakukan di sektor konsumsi. Mereka yang mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi karena berbagai sebab melakukan langkah-langkah penghematan dan mengubah pola konsumsi ke kebutuhan-kebutuhan hidup yang lebih mendesak. Di Ceper, misalnya, terdapat bukti turunnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan di luar makanan karena sebagian pendapatan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan makan. Penduduk Sriharjo banyak yang mengurangi frekuensi makan dari tiga kali menjadi dua kali atau bahkan sekali dalam sehari. Jenis makanan yang dikonsumsi pun mengalami perubahan, misalnya

dari beras ke ketela atau gaplek, konsumsi telur dan daging dikurangi bahkan dihilangkan, demikian juga konsumsi minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, dan sebagainya. Sudah barang tentu pengurangan konsumsi itu akan mengurangi tingkat kesehatan dan nantinya tingkat produktivitas penduduk. Di Semanu dilaporkan adanya sejumlah murid yang cepat mengantuk di kelas atau pingsan saat mengikuti upacara di sekolah. Ini terjadi mungkin karena tingkat pemenuhan gizi yang rendah pada murid-murid di daerah tersebut.

Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua kebutuhan masyarakat yang sangat penting yang harus tetap terpenuhi agar kualitas hidup penduduk tidak menurun. Akan tetapi, menurunnya tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk membuat akses penduduk untuk mengonsumsi pelayanan pendidikan dan kesehatan mengalami penurunan.

Penurunan tingkat kesehatan penduduk secara makro dapat dilihat dari turunnya persentase pemanfaatan fasilitas kesehatan modern dan naiknya persentase pengobatan sendiri. Konsekuensi dari turunnya akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan adalah naiknya tingkat morbiditas penduduk. Di DIY, misalnya, keluhan kesehatan mengalami peningkatan dari 31 persen (tahun

1996) menjadi 34 persen (tahun 1997) (Tukiran & Sutanto, 1999).

Penurunan akses penduduk juga terjadi dalam mengonsumsi pelayanan KB. Hal ini terjadi karena naiknya harga kontrasepsi modern. Susuk KB naik hampir tiga kali lipat (dari Rp25.000,00 menjadi Rp95.000,00). IUD yang dulunya gratis sekarang harus dibeli dengan harga yang sangat mahal (dari Rp50.000,00 sampai Rp250.000,00). Sterilisasi yang dulu juga gratis sekarang harus dibeli dengan harga minimal Rp150.000,00. Kenaikan harga ini sudah barang tentu sangat memberatkan penduduk miskin sehingga banyak dari pasangan usia subur miskin tidak mampu memakai kontrasepsi, yang pada gilirannya dapat berakibat pada naiknya tingkat fertilitas penduduk.

Penurunan akses penduduk untuk mengonsumsi pelayanan pendidikan juga merupakan akibat lain yang tidak terelakkan dari merosotnya kesejahteraan ekonomi penduduk karena krisis. Meskipun pendidikan dasar negeri diberikan gratis, orang tua murid harus menanggung biaya seragam sekolah, buku-buku pelajaran dan alat-alat sekolah, dan sumbangan-sumbangan yang sering diminta sekolah ke orang tua murid yang tetap membebani orang tua murid. Penduduk yang sangat miskin dalam kondisi pendapatan yang lebih terbatas akan sulit untuk membayar sejumlah ongkos pendidikan tersebut. Dengan demikian, penduduk miskin di pedesaan menjadi rentan untuk

kehilangan akses melanjutkan pendidikannya (*drop-out*), atau paling tidak mereka menjadi kurang mampu untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai dengan standar, yang pada gilirannya akan mengurangi prestasi murid dari golongan miskin ini di sekolah.

Respons Pemerintah

Dampak krisis terhadap penduduk miskin sesungguhnya telah mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Pemerintah sejak lama telah menyelenggarakan banyak program yang diarahkan untuk menanggulangi masalah kesenjangan dan pemerataan pembangunan. Beberapa contoh, misalnya, kebijakan pembangunan sektoral melalui bantuan pembangunan sektoral (DIP), pembangunan regional melalui bantuan pembangunan daerah (DAPD, dulu disebut SPABP-Inpres), dan pembangunan khusus. Pembangunan khusus adalah pembangunan yang diutamakan untuk merespons masalah-masalah pembangunan yang spesifik, yang belum terpenuhi oleh program-program sektoral yang ada. Beberapa contohnya adalah program pengentasan kemiskinan dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Program Jaring Pengaman Sosial merupakan program yang secara langsung diarahkan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak krisis pada penduduk

miskin. Program ini diprioritaskan untuk mencapai sejumlah tujuan: 1) peningkatan ketahanan pangan (*food security*), 2) penciptaan lapangan kerja produktif (*employment creation*), 3) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprise*), dan 4) perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar, khususnya pendidikan (*social protection*). Program tersebut mempunyai unsur penyelamatan (*rescue*), pemulihan (*recovery*) menuju kembali ke tingkat pembangunan (*reconstruction*), pertumbuhan (*growth*), dan stabilitas (*stability*) yang berkelanjutan (*sustainability*) (Sumodiningrat, 1998).

Program JPS memiliki sejumlah ciri kebaruan sehingga dapat dikatakan sebagai semacam terobosan terhadap tradisi administrasi pembangunan yang berlangsung selama ini. Salah satu kebaruan yang menonjol adalah pada sifat langsungnya. Dana program JPS disalurkan langsung kepada masyarakat pada tingkat desa/kelurahan, tidak melalui jalur birokrasi yang berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Pemangkasan birokrasi yang luar biasa ini dimaksudkan untuk menekan tingkat kebocoran sehingga efisiensi pemanfaatan dana pun diharapkan meningkat. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program, program ini mensyaratkan adanya unit pengelola program (UPK) yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai wadah pengelola program. Dengan

meletakkan masyarakat sebagai pelaku inti dalam pelaksanaan program diharapkan keberdayaan masyarakat pun meningkat. Pada jangka panjang masyarakat diharapkan dapat secara mandiri memecahkan masalah-masalah mereka sendiri tanpa banyak mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Jika kita amati apa yang terjadi pada masyarakat, seperti yang ditemukan dalam penelitian mikro di lima desa/kecamatan di Jawa Tengah dan DIY ini, masyarakat sesungguhnya telah memiliki keberdayaan yang cukup tinggi dan tahu bagaimana cara menyiasati krisis sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka. Sementara itu, program JPS kurang terlihat relevansinya (dengan) dan signifikansinya (terhadap) pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis. Salah satu contoh adalah program *food security* yang diterapkan di Sriharjo. Dolog bekerja sama dengan BKKBN melakukan pembagian beras ke desa tersebut. Kelompok sasaran dari bantuan tersebut adalah keluarga prasejahtera, yang daftarnya diambil dari data BKKBN. Pembagian beras tersebut ternyata menimbulkan protes masyarakat karena ada penduduk yang tidak memperolehnya, padahal dalam penilaiannya dia lebih miskin daripada keluarga lain yang masuk dalam daftar penerima. Atau ada protes bahwa keluarga tertentu, meskipun didaftar tertera sebagai keluarga

prasejahtera, sesungguhnya cukup sejahtera sehingga tidak layak menerima. Lalu muncul tuntutan penduduk agar beras dibagi merata kepada semua keluarga tanpa memperhatikan perbedaan tingkat kesejahteraan mereka. Sudah barang tentu tuntutan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari diadakannya program *food security* tersebut. Akan tetapi, kericuhan yang terjadi di masyarakat Sriharjo merupakan contoh bahwa indikator yang dipakai, yaitu data BKKBN, tidak akurat untuk menentukan kelompok sasaran

Di mata masyarakat, program *food security* ditangkap sebagai program "bagi-bagi ikan," bukan program "memberikan kail"* . Program seperti ini bukan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian, tetapi justru ketergantungan. Program "bagi-bagi ikan" tersebut menjadi lebih tidak tepat lagi karena banyak dari para penerima bantuan beras tidak menggunakan beras tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tetapi mereka jual untuk diganti dengan bahan makanan lain yang lebih murah, yang memang mereka konsumsi sehari-hari selama krisis, yaitu ketela atau gaplek. Jadi, kalau program tersebut bermaksud untuk memperbaiki gizi masyarakat,

tujuan dari program tersebut tidak tercapai. Masyarakat telah menentukan strategi sendiri untuk mengatasi keterbatasan risorsis selama krisis, yaitu menghemat konsumsi, dan strategi penghematan tersebut ternyata tidak mereka ubah ketika mereka menerima bantuan beras.

Kesan yang sama juga diperoleh terhadap komponen program JPS lainnya, yaitu program *labour intensive*. Sedikit, walaupun ada, penduduk miskin atau yang kehilangan pekerjaan di lima daerah yang diteliti mendapatkan pekerjaan melalui program tersebut. Lapangan kerja yang tersedia melalui program ini pun belum tentu cocok dengan minat dan keterampilan para penganggur tersebut. Penelitian di lima daerah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk menemukan peluang-peluang kerja baru dalam situasi keterbatasan. Di Gunung Kidul ada penduduk yang mencari belalang jati untuk dijual, yang sebelum krisis binatang tersebut tidak pernah menjadi komoditas. Katak juga menjadi komoditas baru lainnya yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Di banyak tempat lain cacing, keong mas, jangkrik telah

* Istilah *ikan* dan *kail* dipakai sebagai tamsil, mengutip perumpamaan Cina kuno, "jika kepada orang miskin kau beri ikan, sesungguhnya kamu hanya dapat membuat dia kenyang satu hari saja, tetapi jika kau beri dia kail dan kau ajari bagaimana menggunakannya, sesungguhnya kau telah membuatnya kenyang selama hidupnya."

pula menjadi komoditas yang menguntungkan.

Penutup

Krisis yang dialami Indonesia merupakan krisis yang menyeluruh, tidak cukup untuk dijelaskan sebagai krisis ekonomi, tetapi gabungan antara krisis ekonomi, politik, birokrasi, sosial, dan budaya. Krisis menjadi separah ini karena kerapuhan kita tidak hanya sebatas fundamental ekonomi, tetapi juga fundamental politik dan sosial budaya. Di sektor ekonomi, praktek monopoli, oligopoli, kartel, korupsi, dan kolusi menjadi sumber rapuhnya fundamental ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita alami selama itu adalah pertumbuhan semu.

Di sektor politik, *floating mass*, pembrangusan media massa, penyingkiran kekuatan-kekuatan oposisi dan pengembangan sistem kekuasaan yang monolit merapuhkan fundamental politik bangsa sehingga stabilitas politik yang ada ketika itu adalah stabilitas semu. Di sektor sosial-budaya kecenderungan menutup-nutupi ketimpangan dan potensi konflik antaretnis dan agama dan membungkusnya dengan ideologi Pancasila dan politik anti-SARA secara doktriner dan represif membuat kerukunan antaragama dan antarsuku ketika itu menjadi kerukunan yang semu. Sekarang setelah seluruh koridor yang membungkus semua yang serba semu itu tersibak, kita menyaksikan dan berada pada

krisis total seperti yang kita alami sekarang.

Krisis yang kita alami adalah krisis sistemik dengan elemen-elemen yang saling tergantung dan saling terkait satu terhadap lainnya sehingga pemecahan terhadap satu hal menjadi tidak mungkin tanpa perbaikan pada elemen lainnya. Kesulitan ekonomi sulit diatasi tanpa mengatasi krisis politik. Krisis politik sulit teratasi tanpa perbaikan sistem sosial budaya. Perubahan sosial budaya memerlukan waktu yang lama, dan sulit diupayakan di tengah krisis ekonomi yang mendalam dan lama.

Akan tetapi, di balik sistem masalah seperti ini pada penelitian mikro di lima tempat seperti diungkapkan di atas, ditemukan adanya mekanisme kelangsungan hidup yang luar biasa dari penduduk miskin. Pada tingkat tertentu, kesulitan ekonomi menjadi tantangan yang menuntut jawaban yang kreatif. Jawaban tersebut telah mereka berikan sesuai dengan kapasitas mereka, baik dalam pencarian alternatif okupasi, atau dalam penentuan pola produksi dan konsumsi baru. Apa yang diperlukan bagi pemerintah adalah memahami lebih baik strategi kelangsungan hidup yang mereka kembangkan, dan dari situ mencoba mencari bentuk-bentuk intervensi yang dapat mempertinggi peluang penduduk miskin untuk mengatasi kesulitan sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi, pertanyaan "apa respons pemerintah" menjadi

pertanyaan yang sulit memperoleh jawaban yang tepat sebelum diketahui terlebih dahulu “apa respons penduduk miskin.” Apa pun respons pemerintah haruslah *jumbuh* dengan respons masyarakat, dan tidak boleh dibiarkan sebagai dua inisiatif yang terpisah,

apalagi berlawanan. Program JPS tampaknya lebih terperangkap kepada kecenderungan yang kedua sehingga pelaksanaan terhadap program tersebut kurang memberikan nilai tambah pada masyarakat.

Referensi

- Abdullah, Irwan. 1999. “Daya tahan penduduk terhadap krisis: pengalaman historis Jatinom menghadapi perubahan sosial ekonomi”. Yogyakarta: IPADI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Makalah *Seminar Dampak Krisis di Perdesaan*.
- Faturochman. 1999. “Krisis dan nasib buruh di perdesaan”. Yogyakarta: IPADI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Naskah *Seminar Dampak Krisis di Perdesaan*.
- Kutanegara, Pande Made. 1999. “Krisis dan kemiskinan di perdesaan: Sriharjo di masa krisis”. Yogyakarta: IPADI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Naskah *Seminar Dampak Krisis di Perdesaan*.
- Mann, Richard. 1998. *Economic crisis In Indonesia, The Full Story*. Singapore: Gateway Books.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. “Jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat”. Naskah Ceramah Pembekalan PKB Perjuangan antar Sesko Angkatan/Sespim Polri TA 1998/1999, Lembang Bandung, 11 Januari.
- Tukiran dan Agus Sutanto. 1999. “Respon penduduk pada lahan kering terhadap krisis ekonomi”. Yogyakarta: IPADI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Naskah *Seminar Dampak Krisis di Perdesaan*.
- Yuarsi, Susi Eja. 1999. “Dampak krisis ekonomi bagi pengusaha industri kecil, kasus pengecoran logam di Batur, Ceper”. Yogyakarta: IPADI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Naskah *Seminar Dampak Krisis di Perdesaan*.

KRISIS EKONOMI, DAYA TAHAN PENDUDUK, DAN SOCIAL SECURITY: KASUS JATINOM DI JAWA TENGAH

Irwan Abdullah*

Abstract

The economic crisis that has been going on since 1997 has had different consequences in various areas. These differences have also provoked a series of discussions about whether or not there is indeed any impact from this crisis, or how far of this impact can be observed. By looking at the case of Jatinom, this study indicates that a community that does not suffer the impact of the crisis is mainly because of the supportive nature of the local resources. This includes the elastic nature of the agricultural sector and self-reliance of the community, which is manifested through a series of strategies that have been historically developed. The communal perception and reaction of Jatinom community towards the crisis is indeed a reflection of their elastic-optimistic attitude. They never portray an attitude of just being on the receiving side. They are instead preoccupied with productive economic activities, which are based on calculative considerations. This paper also emphasizes that the crisis should actually be looked at from a historical perspective in order to have a more detailed and contextual understanding about the impact of the crisis.

Pendahuluan

Debat tentang ada tidaknya dampak krisis ekonomi (krismon) telah menyita banyak waktu dalam berbagai forum. Sebagian besar melihat bahwa krisis telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat yang tampak dari rendahnya daya beli, memburuknya kualitas hidup, dan tingginya tingkat kriminalitas. Argumen semacam ini memang

dengan jelas dapat dilihat, terutama dari tingkat persentase peredaran barang dan uang yang berkurang, namun dampak itu haruslah juga dilihat dalam dimensi-dimensi yang jauh lebih dalam, seperti apakah krisis telah sampai pada perubahan-perubahan institusional dalam berbagai bentuk dan fungsinya dalam masyarakat. Kelompok yang melihat krisis tidak banyak

* Dr. Irwan Abdullah adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

membawa pengaruh karena melihat angka *drop out* pendidikan yang hampir nol atau angka kelaparan yang rendah, tentu saja menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini tentu saja lebih disebabkan oleh 'situs' tempat kita mencari pengaruh krismon itu sendiri. Jika krismon dicari di desa, ia akan memberikan gambaran yang sangat jauh berbeda dengan kota.

Debat semacam ini sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh kecenderungan melihat krisis sebagai kejadian yang mendadak, bukan sebagai suatu proses panjang yang telah berlangsung jauh sebelumnya. Jika krisis dilihat sejak awal tahun 1970-an, misalnya, kita akan melihat bagaimana berbagai pola adaptasi telah dikembangkan oleh penduduk dan oleh berbagai institusi secara historis dan berkelanjutan. Dengan cara yang sama, dapat kita katakan bahwa krisis yang terjadi sesungguhnya merupakan tanda dari gagalnya berbagai usaha adaptasi dan berbagai reorganisasi pada berbagai tingkat.

Tulisan ini mencoba melihat (1) bagaimana krisis itu dialami di Jatinom melalui berbagai catatan dari kasus-kasus yang diteliti; (2) mengukur kekuatan dari dalam milik masyarakat yang menentukan kemampuan mereka merespons krisis; dan (3) bagaimana penduduk merespons krisis dalam berbagai bentuk dan tingkatnya (individu, rumah tangga, institusional, dan komunitas). Data dalam diskusi ini dikumpulkan dari beberapa kunjungan yang dilakukan oleh Tim

Peneliti Dampak Krisis, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, yang berlangsung pada awal 1999. Tulisan ini didasarkan pada sebagian kecil dari catatan yang dikumpulkan oleh tim.

Setting Sejarah dan Ekonomi Jatinom

Kecamatan yang terletak 10 kilometer di bagian utara Klaten ini merupakan daerah yang kekurangan air sehingga 82,3 persen tanah terdiri dari lahan kering yang ditanami cengkeh, tembakau, tebu, dan randu. Sebagian areal ditanami jagung, ketela, dan kacang tanah. Tebu dan ketela pohon merupakan tanaman yang dominan. Padi hanya terdapat di daerah sebelah timur dan hanya dalam areal seluas 6000 meter persegi, seperti di Desa Jemawan, Gendaren, Pandeyan, Puluhan, Krajan, dan Glagah. Sebagian besar merupakan sawah tadah hujan dengan curah hujan sekitar 9 hari per bulan sehingga bagi daerah atas, kesulitan air merupakan bagian dari persoalan sehari-hari.

Daerah Jatinom yang terletak di antara Boyolali dan Klaten ini dapat dibagi ke dalam dua wilayah, "wilayah atas" dan "wilayah bawah". Wilayah atas merupakan wilayah penyedia komoditi pertanian yang menghidupkan dunia perdagangan di wilayah Jatinom dan sekitarnya. Komoditi pertanian dari Jatinom diperdagangkan hingga ke Cawas, Pedan, dan Klaten, yang melibatkan pedagang

dari berbagai tempat di sekitarnya. Daerah atas juga merupakan daerah peternakan sapi yang menghasilkan susu dan daging. Jatinom merupakan salah satu pusat perdagangan sapi di wilayah Klaten dan sekitarnya, yang setiap hari pasaran (Legi) pasar ini menjadi pusat transaksi yang termasuk paling besar, selain daerah Ampel di Boyolali. Wilayah bawah merupakan pusat perdagangan dan industri, di wilayah ini terdapat pasar dan sentra industri seperti pande besi dan genting. Hubungan daerah atas dan daerah bawah telah menghidupkan perekonomian di daerah ini karena peredaran barang sejalan dengan kuatnya daya beli penduduk.

Lebih dari separo (54%) penduduk yang lebih dari 53 ribu jiwa di daerah ini hanya menguasai lahan kurang dari 500 meter persegi. Ketimpangan dalam kepemilikan telah menjadi persoalan sejak lama karena 42% lahan pertanian dikuasai oleh hanya 9% penduduk; sementara sekitar 60% penduduk hanya menguasai 6 persen lahan. Hal ini menjadi faktor penting di dalam menjelaskan mengapa penduduk Jatinom sebagian besar terlibat dalam kegiatan perdagangan, meskipun mereka berstatus sebagai petani.

Fenomena perdagangan memiliki akar sejarah yang panjang di Jatinom. Sejak pertengahan abad ke-20, sebagai akibat dari serangkaian tekanan sosial politik tahun 1950-an saat bandit-bandit lokal (Merbabu-Merapi Complex) mengacaukan daerah dan tahun

1952 saat konflik militer dengan barisan Hisbullah terjadi, penduduk terpaksa meninggalkan Jatinom menuju kota-kota lain (Solo, Semarang, Welleri, dan Pekalongan) (Abdullah, 1994). Dalam krisis semacam itu mereka hidup dari perdagangan dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pertanian tidak dapat dikelola karena perampasan hasil bumi seringkali terjadi. Perdagangan kemudian berkembang dengan pesat di Jatinom sejalan dengan proses komersialisasi pada tahun 1980-an yang telah dimulai sejak tahun 1970-an pada saat infrastruktur jalan raya di daerah ini mulai dibenahi untuk membuka isolasi daerah ini.

Ekonomi Jatinom pada tahun 1980-an bertumpu pada komoditi jeruk yang secara dominan mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah dengan munculnya pasar-pasar berdaya serap besar. Daya beli penduduk meningkat pada tahun 1980-an ini, yang turut menghidupkan ekonomi kota, yang pada saat itu mulai tumbuh sebagai pusat perdagangan untuk daerah sekitar. Perubahan terjadi secara drastis pada tahun 1988 saat pohon-pohon jeruk diserang oleh virus CVPD (*Citrus Vein Phloem Degeneration*). Tahun itu merupakan awal dari krisis ekonomi yang terjadi di Jatinom karena jeruk di seluruh wilayah terserang virus dan tidak dapat diselamatkan. Penduduk kembali menanam ubi kayu, jagung, dan kacang tanah. Pada saat itu penduduk mulai melakukan kegiatan beragam yang selain

sebagai pedagang kecil-kecilan, mereka terlibat dalam industri pengolahan makanan, anyaman bambu, genting, dan pande besi. Peristiwa terserangnya jeruk oleh virus itu yang menggoncangkan ekonomi Jatinom telah direspons oleh penduduk dengan berbagai cara.

Pada saat krisis terjadi pada tahun 1988, penduduk mulai melakukan pergantian komoditi, khususnya kembali ke tela pohon yang permintaannya relatif stabil meskipun harganya hanya Rp75,00 per kilogram. Tanaman lain seperti jagung dan cabai merupakan penunjang. Berbagai aktivitas tambahan mulai dirintis oleh penduduk, mulai dari mengumpulkan pasir dan batu untuk bangunan sampai terlibat dalam perdagangan skala kecil yang mulai saat itu merupakan aktivitas dominan.

Krisis yang terjadi sembilan tahun kemudian setelah kolapnya jeruk sesungguhnya merupakan pengalaman yang berulang bagi penduduk Jatinom, tidak hanya pengulangan tahun 1988, tetapi juga tahun-tahun 1948-an saat terjadi aksi Bumi Hangus terhadap Pabrik Gula Jatinom yang mengubah orientasi ekonomi penduduk, atau serangkaian peristiwa tahun 1952 dengan adanya konflik militer dengan Batalion 426 dan peristiwa tahun 1965 yang kesemuanya merupakan tekanan yang dialami penduduk Jatinom dan sekitarnya. Konteks historis ini menjadi referensi di dalam pemaknaan atas situasi krisis yang berlangsung sejak tahun 1997. Krisis merupakan

bagian dari pengalaman historis yang direspons dengan suatu mode adaptasi. Konflik antargolongan yang menghasilkan peristiwa Bumi Hangus atau ketidakamanan situasi politik akibat rongrongan kelompok MMC dan Batalion 426 telah menyebabkan penduduk dewasa menghadapi setiap perubahan dan tekanan dan mereka dengan kreatif menemukan solusi-solusi untuk kelangsungan hidup.

Basis Sosial Ekonomi Penduduk

Sejak krisis berlangsung, berbagai tindakan telah dilakukan petani, khususnya dengan melakukan adaptasi dalam pemilihan komoditi pertanian. Setelah gagal dengan melon akibat kenaikan harga bahan kimia, misalnya, penduduk mulai menanam pepaya thailand yang saat ini sedang laku keras di pasaran. Berbagai adaptasi tampak dalam pengelolaan lahan, seperti pemanfaatan lahan secara lebih produktif dan intensif dengan pola tanam tumpang sari yang melebihi biasanya.

Dari keseluruhan proses perubahan yang terjadi, tampak bahwa lahan pertanian merupakan faktor penting bagi keselamatan ekonomi penduduk, meskipun luas lahan yang dimiliki terbatas. Lahan pertanian ini merupakan "pusaka" bagi penduduk yang dijaga dengan baik, khususnya dengan cara mempertahankan untuk tidak dijual kepada pihak lain. Sebagian penduduk yang terlibat dalam perdagangan keliling atau menetap di luar Jatinom masih mem-

pertahankan pemilikan lahan yang dikelola oleh sanak keluarga yang masih ada di Jatinom. Lahan menjadi sumber yang penting dan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan.

Meskipun pertanian diakui dan dinyatakan oleh penduduk sebagai pekerjaan utama, hampir tidak ada penduduk di Jatinom yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya. Paling tidak, salah satu pasangan atau salah satu anak dari satu rumah tangga terlibat dalam pekerjaan nonpertanian, seperti perdagangan, industri kecil, atau sektor bangunan. Pertanian lebih tepat dikatakan sebagai fondasi ekonomi rumah tangga, walaupun pendapatan dari sektor lain jauh lebih besar jumlahnya. Penduduk dengan sangat sadar menjaga lahan dan memanfaatkan secara lebih intensif pada saat lebih dibutuhkan. Salah seorang penduduk di Desa Krajan (salah satu desa di Jatinom) secara tegas mengatakan,

“Kalau disuruh milih pertanian dan nonpertanian, saya ya jelas milih pertanian. Tani, meskipun hasilnya jauh jika dibandingkan dengan jadi tukang batu, ya tenteram rasanya. Kalau tani tanah kan sudah milik kita sendiri, jadi tanah tersebut dapat sebagai jaminan hari tua kita... bagi saya tanah pertanian perlu untuk tabungan besok-besok (hari tua) meskipun tidak begitu luas” (Pusat Penelitian Kependudukan, 1997: 96).

Lahan pertanian dalam hal ini ditempatkan oleh penduduk sebagai tabungan yang dapat menyelamatkan mereka pada saat-saat krisis berlangsung. Hampir dapat dikatakan bahwa tanah dalam banyak kasus merupakan basis jaminan sosial (*social security*) yang paling penting bagi masyarakat petani. Ekspresi di atas bersifat agak umum jika penduduk desa dimintai pendapat tentang bagaimana mereka menempatkan pertanian dan lahan dalam hubungannya dengan pemilikan atau akses yang lain.

Gambaran tentang posisi lahan pertanian ini tidak menyebabkan hilangnya dinamika sosial dalam aktivitas penduduk. Setiap rumah tangga di Jatinom memiliki akses ke dunia nonpertanian karena keterlibatan anggota rumah tangga dalam kegiatan di luar pertanian sangat mencolok. Hubungan dengan dunia luar pertanian dimulai pada saat proses komersialisasi terjadi pada akhir tahun 1970-an, khususnya pada saat kapas dan jeruk menjadi komoditi yang menguntungkan. Tanaman jeruk secara khusus telah menjadi primadona pada tahun 1980-an yang selama lebih lima tahun telah mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial penduduk Jatinom. Komersialisasi yang terjadi telah mengubah kualitas hidup dan pemukiman yang karena jeruk rumah-rumah baru banyak didirikan dan rumah-rumah lama mengalami perbaikan. Saat itu pula kendaraan bermotor mulai menjadi bagian dalam kehidupan sehari-

hari penduduk yang mempermudah komunikasi dan mendukung berbagai aktivitas sosial ekonomi. Bersamaan dengan proses ini, tumbuh berbagai toko di kota dan warung-warung di desa sebagai tanda dari peningkatan status ekonomi dan daya beli penduduk. Pada saat yang sama juga, investasi ke sektor industri kecil dapat terjadi, yang kemudian menghidupkan ekonomi Jatinom secara keseluruhan.

Implikasi langsung yang dapat dilihat dari proses perubahan ini adalah terjadinya pembentukan stratifikasi sosial baru di berbagai daerah. Hingga awal tahun 1980-an stratifikasi sosial lebih didasarkan pada pemilikan lahan sehingga dominasi pemilik lahan tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Proses komersialisasi telah membawa akibat bagi negosiasi status dan kelas sosial, penduduk yang terlibat dalam aktivitas perdagangan memiliki kesempatan melakukan mobilitas vertikal. Berbagai hubungan kekuasaan kemudian mulai bergeser yang sejak akhir tahun 1980-an elite-elite baru mulai tumbuh. Hal ini dipertegas dengan berkembangnya sapi sebagai sumber ekonomi alternatif yang dipelihara oleh penduduk. Pernyataan seorang petani di Jatinom memperlihatkan peran ternak tersebut,

“Pada mulanya Desa Kayumas merupakan desa pertanian murni dengan lahan berupa tegalan.

Dengan adanya bantuan presiden berupa kredit sapi perah ... lambat laun menjadi desa pertanian sekaligus peternakan.... Setelah adanya sapi perah, ekonomi warga agak naik sedikit....” (Pusat Penelitian Kependudukan, 1997: 92).

Pada saat yang hampir bersamaan dengan proses komersialisasi pertanian, sapi menjadi simbol kebangkitan ekonomi yang memperkuat ekonomi keluarga. Data Monografi Kecamatan, misalnya, menunjukkan bahwa pada tahun 1998 ini terdapat 17.045 sapi perah dan 4.300 sapi potong. Dari 26 kecamatan di Klaten, Jatinom merupakan daerah yang memiliki jumlah sapi terbanyak. Data ini menjelaskan kuatnya basis ekonomi yang dimiliki Jatinom secara keseluruhan, yang menjadi salah satu faktor dalam kemampuan penduduk merespons krisis yang berlangsung.

Sejalan dengan kebangkitan ekonomi tersebut, hubungan-hubungan sosial mulai diatur dengan harga dan nilai ekonomi. Berbagai kewajiban sosial kemudian diwujudkan dengan uang, ketimbang barang dan tenaga yang sebelumnya menjadi suatu bagian yang diakui (Abdullah, 1989). Perubahan ke arah ekonomi uang semacam ini menyebabkan orientasi penduduk mengalami pergeseran, yang menunjukkan lahirnya etika-etika sosial baru.

Daya Tahan dan Respons terhadap Krisis

Dalam serangkaian perubahan dan krisis yang terjadi sejak Juli 1997., dampak langsung yang menunjukkan jatuhnya tingkat kesejahteraan penduduk tidak terjadi. Mereka sendiri telah terbiasa dengan berbagai tekanan yang solusi-solusinya telah dibangun dan dipraktekkan dalam situasi yang mendesak.

Sebagaimana tampak pada berbagai kasus krisis ekonomi di berbagai tempat, kenaikan harga merupakan tanda yang paling awal dibaca tentang adanya krisis ekonomi. Di Jatinom kenaikan harga yang membuat goncangan bagi penduduk segera ditanggapi sebagai kejadian yang wajar. Hal semacam ini dapat dikaitkan dengan dua kemungkinan. Pertama, karena penduduk relatif siap menghadapi perubahan-perubahan drastis yang terjadi karena pengalaman telah mengajarkan mereka tentang kiat-kiat menghadapi tekanan dan persoalan. Bagaimanapun tindakan semacam ini mendapat justifikasi dalam pengalaman historis mereka pada masa Jepang, peristiwa 1952, 1965, dan krisis pertanian di Jatinom tahun 1988. Kedua, kecenderungan itu dapat disebabkan oleh kesiapan psikologis dan kultural yang telah dikembangkan oleh penduduk dalam mengatasi berbagai persoalan. Paling tidak, pernyataan seorang informan di awal tulisan ini dapat menjelaskan suatu mode persepsi dan penerimaan pen-

duduk terhadap kesulitan yang dialami: *Padha wae... sithik dicakake sithik, okeh dicakake okeh.* Elastisitas semacam ini tentu saja memiliki dasar yang menyebabkan penduduk merasa konfiden dalam menghadapi persoalan. Bahasa yang digunakan oleh seorang informan dalam merespons krisis merupakan representasi reaksi komunal yang terjadi di Jatinom, seperti kutipan berikut: *"Nek cara kula... kenging moniter yo wis men. Nek kula mung ngoten... soale ora ijen kok. Kabeh dha ngalami."* Sikap ini memang dapat ditanggapi sebagai pernyataan positif dan negatif atau optimis dan pesimis. Dalam konteks Jatinom, pernyataan memperlihatkan hal yang optimis karena mereka tidak memperlihatkan sikap menerima begitu saja, sebaliknya justru kehidupan mereka telah diisi dengan yang produktif dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kalkulatif.

Dampak dari krisis memang dapat dilihat dalam batas-batas tertentu, yang merupakan bentuk yang umum terjadi di berbagai tempat. Para peternak ayam merupakan salah satu contoh dari kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan. Dari belasan peternak ayam yang dianggap besar, hanya dua peternak yang masih bertahan, sementara yang lain menghentikan usahanya akibat mahalnnya biaya pakan. Secara umum dinyatakan oleh penduduk bahwa penurunan dalam perdagangan mencapai 60 persen.

Tentu saja ini merupakan suatu dampak yang jelas dapat dilihat. Meskipun demikian, tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh penduduk merupakan sisi lain yang penting untuk ditanggapi. Seorang pedagang toko kelontong, untuk mengatasi krisis, mengalihkan tenaga kerja yang dimiliki ke usaha pertanian dengan menanam jagung. Pengusaha konveksi mengalihkan usahanya ke penjualan gula. Dengan cara pengalihan usaha semacam ini secara sadar para pengusaha melakukan tindakan penyelamatan usaha dan menghindari terjadinya PHK terhadap buruh yang dipekerjakan.

Di luar persoalan kemunduran usaha, tidak dapat dilihat pengaruh yang mendasar dari krisis ekonomi karena pola pemenuhan kebutuhan pokok hanya mengalami penyesuaian yang terbatas. Pola makan yang secara umum memang bersifat sederhana belum merupakan hambatan untuk dipenuhi, kecuali dengan mengurangi kualitas dan item yang dibeli mengingat kenaikan harga. Kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan berbagai kewajiban sosial masih dapat dipenuhi walaupun dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Sumbangan di Jatinom dan sekitarnya, misalnya, bisa mencapai lima puluh ribu rupiah untuk tetangga dekat dan keluarga, yang mereka katakan sebagai jumlah yang memberatkan. Meskipun demikian, mekanisme sosial ini tetap dipenuhi dan dipelihara sebagai bagian dari kewajiban menjadi ketertiban umum dan

harmoni sosial. Dalam konteks semacam ini dapat dipertanyakan bagaimana penduduk sampai mampu memenuhi semua kebutuhan itu tanpa memperlihatkan secara jelas adanya dampak dari krisis yang berlangsung. Secara umum tidak ditemukan adanya dampak terhadap krisis karena memang tidak terlihat dalam wacana lokal dan dalam praktek konsumsi secara mencolok. Hal ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan pernyataan pada tingkat makro yang menyatakan terjadinya pengaruh yang parah dalam berbagai sektor (Manning, 1998). Untuk itu, menarik dikaji lebih lanjut, mengapa dampak krisis tidak ditemukan secara jelas di Jatinom. Paling tidak tiga kemungkinan dapat menjelaskan pertanyaan tersebut.

Pertama, tampak ada gerakan kembali ke produksi subsistensi secara meluas, khususnya untuk daerah yang berbasis pedesaan. Kebutuhan sehari-hari diupayakan untuk dipenuhi sendiri dengan memanfaatkan produksi subsistensi yang tersedia. Setiap jengkal lahan menjadi jauh lebih bernilai dewasa ini dibandingkan sebelumnya karena lahan itu mulai dimanfaatkan secara lebih intensif untuk menanam sayur-sayuran, jagung, dan ketela pohon. Pola tumpangsari dipraktekkan secara mencolok di setiap bidang tanah untuk mendapatkan hasil dari berbagai komoditi sekaligus. Makanan ternak yang sebelumnya dibeli di pasar, seperti konsentrat, setelah krisis mulai dipenuhi sendiri

dengan memberikan rumput dan ketela pohon. Penduduk tidak hanya menghindari membeli barang dari pasar, tetapi juga menghindari untuk menjual barang ke pasar. Cara ini dianggap penduduk sebagai cara yang paling bijak pada saat pasar, khususnya permintaan dan harga, dalam keadaan tidak menentu. Pemanfaatan lahan pertanian ini secara efektif dapat membebaskan penduduk dari ketergantungan pasar yang dengan cara ini kebutuhan uang tunai juga dapat diminimalkan.

Kedua, ada usaha yang kuat untuk melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi. Sebagian orang yang terlibat dalam perdagangan mulai kembali ke pertanian untuk mengurus usaha tani. Para petani sendiri mencoba mengalokasikan waktunya untuk berbagai kegiatan yang dapat mendatangkan uang, seperti ikut mengumpulkan batu dan pasir sebagai bahan bangunan untuk dijual. Para buruh juga

melakukan berbagai kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Secara umum, seperti dinyatakan oleh informan, alokasi waktu untuk bekerja menjadi jauh lebih panjang dibandingkan dengan sebelumnya karena masa sekarang ini dianggap sebagai zaman kurang enak sehingga harus menyiapkan diri untuk melakukan berbagai kemungkinan yang halal.

Ketiga, tidak tampaknya pengaruh krisis selain karena pengingkaran terhadap institusi pasar dan penguatan dukungan ekonomi, juga dipengaruhi oleh dukungan sumber ekonomi yang besar yang dimiliki penduduk Jatinom. Ternak merupakan salah satu contoh tentang kuatnya basis ekonomi rakyat. Selama krisis berlangsung ternak telah dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan. Hal ini tampak dari penurunan jumlah ternak secara umum, yang merupakan fakta yang ditemukan dalam serangkaian wawancara dan dari data statistik. Penurunan

Tabel 1.
Pemilikan Ternak di Jatinom

Jenis Ternak	1995	1998
Sapi potong	8938	4300
Kerbau	100	601
Kuda	38	27
Kambing	9855	60
Domba	2052	75

Sumber: *Klaten dalam Angka* (1995) dan *Monografi Kecamatan Jatinom* (1998).

jumlah ternak tersebut (Tabel 1) meskipun harus dinilai secara hati-hati, memperlihatkan menipisnya bantalan sosial (*safety net*) penduduk. Bantalan sosial inilah yang menyebabkan penduduk Jatinom masih dapat mempertahankan pola hidup yang relatif sama dengan saat sebelum krisis berlangsung. Jika bantalan sosial ini menipis dan habis, berbagai persoalan diperkirakan akan muncul. Sejauh ini konflik sosial, baik pada tingkat keluarga maupun sosial belum terjadi. Kriminalitas seperti pencurian belum tampak menonjol di luar batas normal, meskipun pernah terjadi satu dua kali akhir-akhir ini.

Ketiga faktor di atas merupakan kekuatan lokal di Jatinom yang masih berfungsi dengan baik dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Pertanian dan peternakan dapat dinilai sebagai bantalan sosial yang penting pada saat perdagangan dan industri mengalami kemunduran. Dalam konteks ini menjadi tidak begitu relevan membicarakan dampak krisis pada sektor-sektor yang tidak terkait langsung dengan unsur-unsur krisis, seperti sektor konstruksi dan jasa (Cole dan Slade, 1988) karena perdesaan seperti Jatinom masih menempatkan pertanian sebagai fondasi ekonomi. Daerah-daerah yang memiliki anggota yang mengalami PHK pun tampak dengan mudah terserap dalam pertanian dan perdagangan skala kecil. Daya serap pertanian di Jatinom masih sangat besar dan masih mampu mengatasi persoalan

kelangsungan hidup (*survival*) penduduk, walaupun pada tingkat akumulasi masih sangat diragukan. Selain itu, etos kerja penduduk Jatinom juga merupakan catatan tersendiri yang mempengaruhi daya tahan penduduk terhadap berbagai tekanan. Usaha penduduk melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi menegaskan suatu ciri mentalitas yang maju dan telah menjadi prasyarat dalam keberhasilan penduduk Jatinom keluar dari kemelut ekonomi dalam sejarah hidup mereka.

Kesimpulan

Serangkaian pernyataan yang membentuk wacana di seputar krisis ekonomi yang berlangsung tampak memiliki dua lapis. Pertama, wacana lapis atas yang dibangun pada tingkat makro dapat diikuti melalui berbagai media. Berbagai agen terlibat dalam membangun citra tentang betapa parahnya dampak krisis yang terjadi dan begitu banyak penduduk yang membutuhkan bantuan sembako untuk dapat bertahan hidup. Wacana ini telah membentuk ruang-ruang politik yang dimanfaatkan oleh banyak agen untuk banyak kepentingan sekaligus. Penelitian ini menegaskan adanya lapisan kedua, yakni wacana lokal yang dibangun oleh penduduk berdasarkan pengalaman sesaat dan pengalaman historis mereka. Meskipun demikian, sebagian pernyataan penduduk menunjukkan bahwa wacana pada tingkat lokal pun telah ter-

kontaminasi oleh bias lapis atas yang memaknai krisis dengan muatan politis yang kental. Dengan memisahkan unsur tersebut, wacana lokal yang murni menegaskan suatu optimisme yang sesungguhnya disebabkan oleh “daya tahan” yang mereka miliki.

Daya tahan penduduk terhadap berbagai tekanan sejalan dengan berbagai proses sosial yang berlangsung sesungguhnya bersumber dari dua hal. Pertama pada daya dukung lingkungan yang masih mampu menampung penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup pada tingkat tertentu. Kedua dipengaruhi oleh daya kenyal (*self-reliance*) penduduk dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Serangkaian wawancara memperlihatkan optimisme dan sikap percaya diri yang besar dalam diri penduduk untuk menghadapi setiap perubahan. Kedua hal ini tentu saja dapat tumbuh dalam suatu masyarakat yang memiliki sejarah dan memelihara sejarahnya sebagai bagian dari sumber pembentukan jatidiri. Wacana lapis atas seringkali justru menjadi merusak mekanisme dan daya tahan lokal pada saat krisis ekonomi dimaknai sebagai ruang politik yang sarat dengan kepentingan lapis atas.

Untuk dapat memahami krisis pada tingkat lokal, kasus ini menegaskan perlunya mengkaji kondisi sosial ekonomi daerah secara historis untuk melihat bagaimana situasi krisis diposisikan. Melihat krisis pada suatu saat tertentu akan menyebabkan aspek dinamis dari adaptasi penduduk yang memperlihatkan bagaimana mobilisasi dan manajemen sumber daya yang tersedia di dalam tidak dapat diungkapkan. Melihat krisis dalam perspektif yang panjang tidak hanya memungkinkan dikajinya suatu proses yang dinamis, tetapi juga akan menghindari pihak luar melakukan intervensi untuk tujuan-tujuan yang mulia sekalipun.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan pada serangkaian observasi yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Untuk itu terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam serangkaian kunjungan ke Jatinom: Bambang Wicaksono, Astuti Farida, Umi Listyaningsih, Anis Khairinnisa, Dr. Koentjoro, dan Dr. Muhadjir Darwin. Terima kasih juga disampaikan kepada Drs. Tukiran, M.A. atas catatan-catatannya yang sangat teliti.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 1989. *Wanita ke pasar: perubahan sosial ekonomi di pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- , 1994. *The muslim businessmen of Jatinom: religious reform and economic modernization in a central Javanese town*. Amsterdam: University of Amsterdam. Ph.D. thesis University of Amsterdam.
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 1979. *The social construction of reality*. New York: Penguin Books.
- Chris, Manning. 1998. *Indonesia's economic crisis: note on employment strategies*. Canberra: Australian National University.
- Cole, David C. dan Betty F. Slade. 1988. "Why has Indonesia's financial crisis been so bad?", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34(2): 61-66.
- Gadjah Mada. Pusat Penelitian Kependudukan. 1997. *Analisa dampak transformasi struktur perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan Bappenas.
- Geertz, Clifford. 1973. *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- , 1983. *Local knowledge*. New York: Basic Books.
- Solway, J. n.d. "Drought as a revelatory crisis", *Development and Change* 25 (3): 471-496.

KRISIS DAN NASIB BURUH DI PERDESAAN

Faturochman*

Abstract

Farm and convection workers, who are part of the poor, have become even poorer during the economic crisis. Looking at their income in two different time periods, these groups have experienced an increase, but expenditure has instead been higher than income. Subjectively, these people indeed acknowledge that they have faced numerous problems during the crisis. Ironically, a number of them do not regard this as something that has increased their suffering. By some coincidence, there are employment opportunities in the study area that can potentially be used to survive. It is, however, difficult to predict how long this situation can sustain. They do not only suffer the consequence of sky rocketing prices of basic needs, which has eroded their purchasing power, but they also share the pain suffered by their employers. Their high dependence on the convection entrepreneurs, landowners and plantation entrepreneurs has made them very vulnerable to economic changes that take place like the current crisis.

Latar Belakang

Salah satu ironi yang sering terdengar menyatakan bahwa di Indonesia yang alamnya kaya raya terlalu banyak penduduknya yang miskin. Sesungguhnya ini bukan sekedar ironi, tetapi kenyataan yang sangat mudah dilihat. Kemiskinan di Indonesia bagi sebagian orang dinilai tidak seburuk di beberapa negara lain, seperti Asia selatan dan Afrika. Namun, kekayaan alam di beberapa negara

tersebut tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia.

Dalam skala yang lebih kecil, potensi alam Kecamatan Wedi dapat merepresentasikan kesuburan yang sesungguhnya. Potensi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk kesejahteraan mereka. Tidak mengherankan bila secara sepintas akan tampak bahwa wilayah ini tidak tergolong miskin. Secara formal pun terbukti bahwa

* Drs. Faturochman, M.A. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

wilayah ini tidak termasuk dalam kelompok yang disorot oleh proyek IDT. Namun, bila dicermati lebih mendalam akan segera terlihat bahwa masih banyak di antara penduduk di sana yang tergolong miskin dan berisiko tinggi untuk menjadi miskin. Di antara kelompok ini adalah buruh tani dan buruh konveksi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah ini tidak lepas dari potensi lahan pertanian yang subur. Hasil penelitian Padmo (1998) menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat setempat yang cukup tinggi saat ini banyak dipengaruhi oleh kesuburan dan pengelolaan lahan. Dalam sejarahnya, wilayah yang subur ini dijadikan sebagai lahan untuk menanam tembakau pada masa kolonial Belanda. Menurut catatan sejarah, seperti yang diteliti oleh Padmo, penanaman tembakau hampir selalu menguntungkan. Namun, keuntungan ini tidak selalu dirasakan oleh petani setempat dan masyarakat pada umumnya. Dalam perjalanan sejarah tembakau di daerah ini, keemasan hasil tembakau yang dirasakan oleh petani dan masyarakat setempat terjadi pada periode 1920-an. Pada masa itu pengelola perusahaan tembakau benar-benar berusaha dan bertindak memakmurkan masyarakat setempat. Sebelum dan sesudah periode tersebut, hingga saat ini, keuntungan usaha

tembakau lebih banyak dinikmati oleh pihak pengelola (lihat juga Faturochman, 1998; Margono, 1998).

Masa keemasan tembakau hampir delapan puluh tahun yang lalu itu mampu membangkitkan perekonomian di sana. Munculnya pedagang dan industri rumah tangga adalah bentuk nyata dari masa keemasan itu. Bahkan, meskipun pada masa-masa sesudahnya sumbangan komoditas tembakau tidak lagi besar, masyarakat setempat telah mampu meneruskan pertumbuhan perekonomian setempat. Salah satunya adalah industri pakaian jadi (sandang). Dalam sejarahnya, industri sandang ini juga pernah mengalami masa kejayaan, yaitu pada sekitar dua dekade lalu (lihat Partini dkk., 1989). Maraknya industri sandang di wilayah ini menyebabkan penduduk setempat banyak yang terserap ke dalamnya sebagai penjahit (untuk selanjutnya disebut pekerja atau buruh). Pada awalnya sebagian besar dari mereka bekerja di tempat pembuatan pakaian yang disediakan pemilik perusahaan (juragan), baik yang berbentuk pabrik maupun rumah. Perkembangan pola hubungan buruh jahit dengan juragan berubah ke arah *putting-out system*, bahan disediakan dan dipotong oleh pihak juragan lalu dijahit di rumah buruh jahit (*gerji*) dan setelah selesai

disetor ke juragan. Buruh menerima upah berdasarkan produk yang dihasilkan, namun menanggung beban dan risiko lain (membeli benang, membayar listrik, dan mengganti produk yang cacat).

Bagi sebagian besar penduduk di sekitar perusahaan, *gerji* dinilai lebih menarik dibandingkan dengan buruh pada bidang lain. Pada masa ramai, penghasilan mereka tergolong tinggi sehingga bisa ditabung dan digunakan pada saat musim sepi (Partini dkk., 1990; Hardyastuti dan Hidayana, 1991). Secara umum mereka juga merasa bahwa pekerjaan itu memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis buruh lain. Banyaknya penduduk yang terserap di industri sandang ini mengundang penduduk dari wilayah lain masuk ke sana untuk bekerja di perusahaan jenis lain, seperti tembakau yang dikelola PTPN X. Kenyataan ini semakin menimbulkan kesan juga bahwa wilayah ini memang mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi, di samping memiliki potensi di sektor pertanian dan maraknya industri sandang.

Hingga beberapa waktu lalu, industri dan pertanian di wilayah ini tampak maju bersama-sama. Berbeda dengan sektor industri dan perdagangan yang pelakunya sekaligus juga pemilik, aktivitas pertanian di sana didominasi oleh

penyewa, penggarap, dan buruh. Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan tidak dikelola oleh pemiliknya. Secara ekonomis, penggarap ini memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan pemilik yang sebagian besar bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa (termasuk pegawai). Buruh di sektor pertanian menempati strata paling bawah dalam struktur ekonomi setempat. Upah yang diterima pada umumnya adalah upah harian. Mereka pada umumnya juga memiliki keterampilan yang terbatas. Bila kemampuannya meningkat dan memiliki modal, mereka bisa menjadi penyewa/penggarap yang secara ekonomis juga berpeluang memiliki pendapatan yang lebih baik.

Ekonomi Rumah Tangga Buruh Selama Krisis

Krisis yang melanda negeri ini sekarang tidak terbatas pada moneter atau ekonomi, tetapi sudah memasuki semua aspek kehidupan. Bagi buruh tani dan konveksi masalah ekonomi menjadi dominan dan kadang-kadang hanya satu-satunya yang mereka pikirkan. Hal-hal lain di luar itu sering dinilai di luar kemampuannya. Mereka sendirilah yang menilai seperti itu. Karenanya, tidak mengherankan bila pada waktu pilihan kepala desa

di salah satu wilayah di sana, seorang warga menyatakan: “Wah ... saya tidak mau pusing lagi ... semuanya berubah dan menjadi lebih buruk ... biar saja lurahnya tetap ... dia sudah jelas (dikenal, Red.) ... mungkin kurang bagus, tetapi jelas” (Sri, 40 tahun).

Secara lebih sederhana lagi, masalah ekonomi yang dimaksud hanya berkisar pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makan, pendidikan anak, dan kesehatan. Selama masa krisis ini, bagi sebagian orang, kebutuhan pokok, terutama makanan, menjadi sulit dipenuhi karena harganya melambung tinggi, daya beli mereka rendah, dan kadang-kadang tidak cukup tersedia di pasaran.

Pada awal tahun 1998 atau saat krisis moneter yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi telah berjalan sekitar setengah tahun, penduduk di wilayah penelitian ini telah merasakan adanya krisis tersebut. Data-data yang diperoleh (lihat Faturochman, 1998) menunjukkan bahwa sepertiga penduduk

yang bekerja di sektor pertanian telah merasakan krisis itu, sementara mereka yang bekerja di luar sektor pertanian lebih banyak yang merasakannya (54 persen). Bagi buruh, krisis ini lebih terasa. Terbukti bahwa 50 persen dari buruh tani dan 73 persen dari buruh jahit sudah merasakan masalah akibat krisis. Seorang buruh jahit yang ditemui peneliti menjelaskan: “Tidak ada ... tidak ada pendapatan sama sekali selama enam minggu ini” (Man, 36 tahun). Buruh jahit lain mengatakan singkat: “Krisis ... menyebabkan ‘tek sek’ (langsung mati), nggak tahulah ...” (Wid, 33 tahun). Untuk mengelaborasi permasalahan yang dialami selama krisis, pada bagian ini dipaparkan tentang ekonomi rumah tangga yang dikepalai oleh buruh tani dan buruh pabrik. Dua variabel pokok yang digunakan adalah pendapatan dan pengeluaran yang datanya dikumpulkan pada awal dan akhir 1998.*

Buruh memang identik dengan kemiskinan. Pendapatan dari pekerjaan mereka tergolong amat

* Data diambil dari dua survei. Pertama adalah survei *Social Security* yang merupakan proyek penelitian Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan kedua adalah survei penelitian Faturochman untuk disertasinya. Pada kedua survei tersebut analisis tentang buruh bukan menjadi fokus penelitian. Cuplikan data untuk tulisan ini mungkin kurang representatif dan keduanya tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan (responden berbeda). Keberanian penulis menampilkan data tersebut didasarkan pada dua argumen. Pertama, variabel yang digunakan distribusinya cukup normal. Kedua, dari sejumlah perbandingan antara kedua waktu hanya ditemukan satu perbandingan yang secara statistik variannya berbeda.

rendah. Pada awal masa krisis, baik buruh tani maupun buruh jahit, pendapatannya di bawah 4 ribu rupiah per hari atau kurang dari satu dolar Amerika. Pada waktu itu pendapatan pokok dari buruh, keduanya, tidak berbeda. Meskipun demikian, kondisi di lapangan saat itu berbeda cukup mencolok. Bulan Februari-Maret 1998 merupakan periode awal krisis ekonomi (bagi sebagian orang baru dirasakan sebagai krisis moneter). Sektor pertanian belum terkena krisis yang besar, bahkan di wilayah penelitian hampir tidak terasa. Petani masih melakukan aktivitas dan berpendapatan seperti sebelumnya. Bahkan, sekitar 3 bulan kemudian mereka sempat merasakan *booming* harga-harga produk pertanian. Bagi buruh tani, situasi ini menyebabkan mereka tidak kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu, bagi buruh jahit, bulan-bulan itu adalah masa sulit. Sangat sedikit pengusaha konveksi yang melakukan kegiatan. Harga bahan seperti tekstile, benang, dan kancing baju naik di luar kebiasaan. Produk yang masih ada pun tidak laku dijual. Mereka juga tidak bisa menagih pedagang yang telah mengambil atau disetori barang. Singkatnya, industri pakaian jadi sedang sekarat. Memang masih ada yang memproduksi, diperkirakan aktivitasnya paling tinggi 30 persen dari kondisi normal. Keadaan ini tentu

sangat mempengaruhi kehidupan buruhnya. Mereka yang terdaftar dalam penelitian ini sebagai buruh jahit adalah mereka yang masih melakukan aktivitas sebagai buruh jahit. Sebagian lagi waktu itu tidak dapat dikategorikan sebagai buruh jahit, berganti pekerjaan seadanya atau menganggur. Dalam penelitian, kelompok terakhir ini tidak masuk kategori buruh jahit.

Apakah dalam keadaan normal pendapatan pokok buruh tani lebih kecil dibandingkan dengan buruh jahit? Perhitungan di lapangan memang demikian keadaannya. Oleh karena itu, bisa dimengerti bila menjadi buruh di sektor pertanian kurang diminati dibandingkan dengan menjadi buruh jahit. Di samping itu, menjadi *gerji* juga memungkinkan untuk memperoleh pendapatan tambahan sebab mereka tidak terlalu terikat dengan waktu kerja. Ini terbukti dari penghasilan tambahan di luar pekerjaan pokok yang sedikit lebih tinggi pada buruh jahit. Karena dikerjakan di rumah sendiri, *gerji* juga memberikan peluang pada anggota rumah tangganya untuk aktif secara ekonomi. Namun, karena mereka sedang mengalami masa paling sulit, anggota rumah tangga yang pada umumnya juga bekerja di industri sandang tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan bagi rumah tangganya. Dengan demikian, pendapatan

rumah tangga buruh jahit lebih kecil dibandingkan dengan buruh tani.

Pada November – Desember 1998 krisis ekonomi belum surut. Meskipun demikian, pada sekitar bulan itu inflasi tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya. Bagi masyarakat setempat, keadaan seperti ini dinilai *cukup stabil*, setidaknya-tidaknya mereka dapat *memperhitungkan* aktivitas ekonominya secara lebih baik. Pada saat itu juga menjelang tahun baru dan Idul Fitri merupakan waktu meningkatnya permintaan pasar akan produk pakaian jadi. Aktivitas ekonomi, khususnya konveksi, tampak menggejati. Secara sepintas pun orang mudah mengenali gejala ini karena di dalam rumah penduduk setempat terdengar kembali suara

mesin jahit. Memang aktivitas itu masih di bawah kondisi normal, tetapi itu dirasa menggembirakan setelah sekitar enam bulan tidak melakukannya (Tabel 1). Setidaknya-tidaknya pendapatan mereka telah meningkat sekitar 27 persen dari sepuluh bulan sebelumnya. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan buruh tani untuk periode yang sama (8 persen). Peningkatan pendapatan rumah tangga buruh jahit juga tampak pesat selama periode tersebut (74 persen). Ini jelas disebabkan oleh makin aktifnya anggota rumah tangga lain yang juga banyak berkecimpung dalam industri pakaian jadi. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan ini tidak semata-mata karena aktifnya perekonomian. Pada sisi lain, upah juga mengalami

Tabel 1
Penghasilan Buruh Tani dan Buruh Konveksi
Februari dan Desember 1998

Jenis Pekerjaan	Peb/Maret 1998	Nov/Des 1998	Perubahan (%)
Penghasilan Pokok KK			
Buruh Tani	113.510	122.625	8,0
Buruh Jahit	113.888	144.375	26,8
Penghasilan Sampingan KK			
Buruh Tani	52.400	81.656	55,8
Buruh Jahit	62.500	90.875	45,4
Penghasilan Total Rumah Tangga			
Buruh Tani	249.309	359.312	44,1
Buruh Jahit	233.277	406.167	74,1

peningkatan sejalan dengan kenaikan harga-harga berbagai komoditi dan kebutuhan. Data tentang penghasilan tambahan yang diperoleh KK, baik buruh tani maupun jahit, yang meningkat sekitar 50 persen tampaknya lebih banyak disebabkan oleh menurunnya nilai tukar rupiah terhadap berbagai komoditas. Mengingat akan hal ini, kurang pas bila hanya analisis tentang pendapatan yang dijadikan tolok ukur untuk menjelaskannya.

Dengan melihat data tentang pengeluaran (Tabel 2), makin jelas bahwa buruh memang benar-benar miskin. Penghasilan pokok mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan rumah tangganya. Perhitungannya, pada awal krisis pendapatan pokok 113 ribu, pengeluaran makan rumah tangga 120 ribu. Makin lama krisis berlangsung, makin tidak cukup penghasilan pokok mereka untuk memenuhi makan rumah tangga. Defisitnya menjadi sekitar 48 ribu

Tabel 2
Pengeluaran Rumah Tangga Buruh Tani dan Buruh Jahit
pada Februari dan Desember 1998

Jenis pekerjaan	Peb/Maret 1998	Nov/Des 1998	Perubahan (%)
Pengeluaran Makan			
Buruh Tani	119.077	170.406	43,1
Buruh Jahit	122.267	188.339	45,4
Pengeluaran Non Makan			
Buruh Tani	91.866	064.906	-30,1
Buruh Jahit	79.443	113.078	42,3
Pengeluaran Total			
Buruh Tani	210.943	234.625	11,2
Buruh Jahit	201.710	301.417	49,4
Proporsi Pengeluaran untuk Makan			
Buruh Tani	56,5	72,7	28,7
Buruh Jahit	61,2	64,7	02,1
Pengeluaran per Anggota RT			
Buruh Tani	54,693	74,991	37,1
Buruh Jahit	50,741	76,516	50,8

rupiah pada buruh tani dan 44 ribu rupiah pada buruh jahit. Untuk memenuhi kebutuhan makan saja, seorang kepala rumah tangga yang bekerja sebagai buruh harus mencari tambahan lagi.

Pengeluaran rumah tangga antara periode Februari–Maret hingga November–Desember mengalami peningkatan yang tajam. Di sini tercatat bahwa kebutuhan makan selama periode itu meningkat sekitar 45 persen untuk buruh jahit dan 43 persen untuk buruh tani. Kedua kelompok buruh ini tidak begitu berbeda dalam hal pengeluaran untuk makan, tetapi untuk pengeluaran nonmakan dan pengeluaran total, terdapat perbedaan yang sangat menonjol, buruh jahit mengeluarkan uang lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran ongkos produksi yang melangit pada buruh jahit. Perlu ditegaskan kembali bahwa *gerji* harus mengeluarkan biaya, seperti, untuk membeli benang jahit dan membayar listrik bila mereka mengerjakan order dari juragan. Selama periode itu terjadi kenaikan harga dan tarif yang sangat besar. Dengan kata lain, peningkatan pengeluaran nonmakan pada buruh jahit tidak bisa diinterpretasikan sebagai peningkatan kesejahteraan seperti yang biasa diinterpretasikan oleh para peneliti. Satu hal yang mengejutkan adalah adanya

data yang menunjukkan penurunan pengeluaran untuk nonmakan. Berbeda dengan buruh jahit, pengeluaran nonmakan pada rumah tangga buruh tani ini dipastikan tidak untuk ongkos produksi. Apakah ini berkaitan dengan penurunan kesejahteraan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama bisa dilihat dari pengeluaran per kapita per bulan. Dengan menggunakan standar kemiskinan Sajogyo (1977), orang dikatakan miskin bila pengeluaran per bulan hanya sebanding dengan 26,7 kilogram beras. Dengan ukuran harga beras pada periode Februari sekitar 2000 rupiah dan pada November sekitar 3000 rupiah, maka pengeluaran per kapita pada kedua periode tersebut, buruh tani mengalami sedikit penurunan kesejahteraan karena pada periode Februari pengeluaran per kapita sedikit di atas batas kemiskinan, setara 53.400 rupiah, sedangkan pada November di bawah batas kemiskinan yang setara 80.100 rupiah. Pada sisi lain, buruh jahit mengalami sedikit peningkatan kesejahteraan. Meskipun demikian, pada kedua periode waktu itu posisi mereka jelas pada posisi kesejahteraan yang rawan. Analisis lebih lanjut berikut ini tampak lebih meyakinkan tentang keadaan yang dimaksud.

Bila tadi disebutkan bahwa peningkatan pengeluaran nonma-

kan pada buruh jahit sesungguhnya masih digunakan untuk ongkos produksi, pengeluaran untuk makan mencerminkan ketahanan rumah tangga, khususnya kemampuan bertahan hidup. Makin kecil proporsi pengeluaran untuk makan, diartikan makin tinggi kemampuan bertahan hidupnya. Data penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk makan meningkat cukup banyak selama periode itu. Secara relatif, dengan menggunakan tolok ukur proporsi pengeluaran untuk makan dan nonmakan, tampak bahwa buruh tani mengalami penurunan kesejahteraan yang lebih berat dibandingkan dengan buruh jahit. Kenyataan ini memang ironis. Mereka yang bekerja di sektor pangan (pertanian) harus membelanjakan sekitar 75 persen uangnya untuk membeli makan atau meningkat sekitar 20 persen dalam kurun waktu kurang dari sepuluh bulan masa krisis. Dengan menggunakan tolok ukur yang sama, buruh konveksi juga mengalami penurunan kesejahteraan, meskipun tidak sebesar buruh tani.

Dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran juga akan sampai pada hasil bahwa pada awal krisis, rumah tangga buruh tani dan konveksi hanya menyisihkan sedikit uang sisa (total pendapatan rumah tangga dikurangi total pengeluaran) dan beberapa

bulan kemudian sisa itu meningkat. Meskipun demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa mereka mampu menabung lebih baik. Alasannya adalah, pertama, seperti dikatakan di atas mereka lebih berorientasi pada upaya bertahan hidup (*survival strategy*) dengan mengutamakan pengeluaran untuk makan dan atau mengurangi pengeluaran untuk nonmakan. Kedua, pada masa krisis ini banyak hal menjadi tidak menentu. Untuk menghadapinya, setiap orang berusaha *memegang* uang selama itu memungkinkan. Pola ini umum digunakan pada buruh jahit karena dalam setahun selalu ada masa ramai dan masa sepi yang menyebabkan pendapatan mereka juga kurang stabil.

Dampak yang Dirasakan

Penelitian ini juga menggali keadaan yang mereka rasakan pada waktu itu. Beberapa hal yang ditanyakan meliputi penilaian tentang pendapatan rumah tangga, pemenuhan konsumsi, biaya kesehatan, transport, dan pendidikan. Hal-hal tersebut ditanyakan pada penelitian periode Februari – Maret maupun November – Desember, namun arahnya sedikit berbeda. Pada periode Februari – Maret responden diminta pendapatnya dengan jalan membandingkannya dengan kondisi

sebelum krisis, sementara pada November – Desember mereka diminta menilai dalam rentang skala kurang-cukup. Karenanya, agak sulit membandingkan dua periode waktu tersebut. Untuk itu, penjelasan di bawah ini lebih banyak menekankan pada setiap waktu penelitian.

Seperti disinggung di bagian terdahulu, awal krisis lebih dirasakan oleh buruh jahit (Tabel 3). Mayoritas dari mereka merasakan

bahwa krisis menyebabkan pendapatan rumah tangga lebih jelek (62 persen) dan kemampuan memenuhi konsumsi juga lebih jelek (51 persen). Ini tidak berarti bahwa buruh tani tidak merasakan dampak krisis pada waktu itu. Mereka juga merasakan bahwa pendapatannya makin jelek (54 persen), demikian pula kemampuannya untuk memenuhi konsumsi (46 persen).

Tabel 3
Persentase Buruh Tani dan Buruh Jahit
yang Mengalami Beberapa Permasalahan pada Februari 1998

	Buruh Tani (n=48)	Buruh Jahit (n=45)	Keduanya (N=93)
Pendapatan Rumah Tangga			
• Lebih jelek	54,2	62,2	58,1
• Sama/lebih baik	45,8	37,8	41,9
Konsumsi Rumah Tangga			
• Lebih jelek	45,8	51,1	48,4
• Sama/lebih baik	54,1	48,9	51,6
Pakaian Anggota Rumah Tangga			
• Lebih jelek	29,8	34,1	31,9
• Sama/lebih baik	70,2	65,9	68,2
Biaya Kesehatan			
• Lebih jelek	18,2	27,3	22,7
• Sama/lebih baik	81,8	72,7	78,3
Biaya Transportasi			
• Lebih jelek	32,4	26,5	29,4
• Sama/lebih baik	67,7	73,5	70,6
Biaya Pendidikan			
• Lebih jelek	22,2	42,9	31,3
• Sama/lebih baik	77,8	57,2	68,2

Krisis juga dirasakan dengan menurunnya aspek kehidupan yang lain, meskipun yang dirasakan baru berkisar antara 23 hingga 32 persen. Dari Tabel 3 juga tampak bahwa buruh tani (32 persen) mulai merasa berat untuk memenuhi biaya transportasi, sementara buruh jahit mulai merasakan berat untuk pengeluaran kesehatan (27 persen) dan biaya pendidikan (43 persen).

Meskipun pada perhitungan terdahulu sampai pada hasil yang

menunjukkan bahwa pada November – Desember buruh tani maupun konveksi bisa menyisihkan uang mereka, ketika ditanya lebih lanjut, cukup banyak (41 persen) yang menilai bahwa pendapatannya kurang (lihat Tabel 4). Perbedaan ini bisa dijelaskan dengan dua hal. Pertama, meskipun pada kenyataannya berkecukupan, mereka bisa saja mempersepsikannya sebagai kekurangan. Mungkin saja mereka menggunakan harapan, orang lain, atau

Tabel 4
Persentase Buruh Tani dan Buruh Jahit
yang Mengalami Beberapa Permasalahan pada Desember 1998

	Buruh Tani (n= 32)	Buruh Jahit (n= 24)	Keduanya (N=56)
Pendapatan Rumah Tangga			
• Kurang	40,6	41,7	41,1
• Cukup/baik	59,4	58,3	58,9
Konsumsi Rumah Tangga			
• Kurang	25,0	16,7	21,4
• Cukup/baik	59,4	58,3	78,6
Pakaian Anggota Rumah Tangga			
• Kurang	34,4	16,7	26,8
• Cukup/baik	65,6	83,3	73,2
Biaya Kesehatan			
• Kurang	25,0	12,5	19,6
• Cukup/baik	75,0	87,5	80,4
Biaya Transportasi			
• Kurang	40,6	29,2	35,7
• Cukup/baik	59,4	70,8	64,3
Biaya Pendidikan			
• Kurang	42,9	57,9	50,0
• Cukup/baik	57,1	42,1	50,0

lainnya sebagai pembanding sehingga yang didapatnya itu dinilai kurang. Kedua, pada perhitungan angka seperti pada Tabel 2, yang ditampilkan adalah angka rata-rata. Pada perhitungan lebih lanjut ditemukan beberapa rumah tangga yang pendapatannya memang lebih kecil atau sama dengan pengeluarannya. Mereka inilah yang benar-benar tergolong kurang dalam hal pendapatan. Memang harus diakui bahwa kelompok terakhir ini berjumlah kurang dari 40 persen, namun harus digarisbawahi bahwa bagaimanapun juga krisis ini menyebabkan pendapatan buruh makin tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kesimpulan itu beralasan karena indikator lain mendukungnya. Banyak buruh (50 persen), terutama buruh jahit, merasakan kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak. Biaya-biaya lain yang juga dirasakan berat adalah untuk transportasi (41 persen pada buruh tani dan 29 persen pada buruh jahit), pakaian (34 persen pada buruh tani dan 17 persen pada buruh konveksi), mencukupi konsumsi (25 persen buruh tani dan 17 persen buruh jahit), dan kesehatan (25 persen buruh tani dan 13 persen buruh jahit).

Strategi Bertahan Hidup

Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kondisi normal (tidak krisis), buruh tani dan buruh konveksi harus berjuang keras untuk mempertahankan hidup rumah tangganya. Cara yang umum dilakukan adalah mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan mencari pekerjaan untuk anggota rumah tangga lain (pasangan, anak). Tanpa melakukan strategi semacam itu, akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Konsekuensinya, mereka harus *footlose* (Breman, 1992), bergerak terus untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

Ketika perusahaan konveksi tidak lagi memproduksi, maka yang menjerit adalah buruh jahit. Mereka tidak lagi berproduksi, sementara tabungannya sangat terbatas. Pemilik perusahaan juga tidak bisa tersenyum, tetapi dengan aset dan akses yang ada mereka masih bisa bertahan lebih lama, bahkan berganti usaha. Dengan modal yang dimiliki, beberapa pengusaha konveksi beralih menjadi pedagang sembako yang pada masa krisis justru berputar lebih cepat. Ada juga yang masih terus membuat pakaian dalam skala yang kecil dan itu dilakukan oleh anggota rumah

tangganya. Dari kasus-kasus seperti itu terlihat nyata bahwa buruh jahit dibiarkan mencari jalan sendiri. Mereka sedikit *beruntung* karena sering mengalami masa sepi sehingga pada awal krisis mereka menerapkan strategi seperti ketika mengalami masa sepi, yaitu mengonsentrasikan pengeluaran pada kebutuhan pokok (makan), menggadaikan barang milik seperti mesin jahit, meminjam uang, menjual barang yang masih dimiliki, atau mencari pekerjaan lain (lebih jelas lihat Partini dkk., 1990).

Masa krisis ini tidak identik dengan musim sepi. Waktunya lebih panjang dan upaya melakukan pekerjaan lain lebih sulit dilakukan. Pada masa krisis ini mereka melakukan *strategi baru*, yaitu dengan masuk menjadi buruh perkebunan tembakau. Kesempatan ini memang masih memungkinkan karena selama krisis ini perusahaan tembakau tetap menyerap banyak tenaga kerja. Mereka menggusur buruh-buruh dari luar wilayah ini. Ini juga dimungkinkan karena pihak perusahaan memang memprioritaskan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, mereka termasuk kelompok yang mendapat prioritas untuk dipekerjakan di sana. Sayangnya, pendapatan dari pekerjaan yang terakhir ini memang sedikit lebih rendah

dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya.

Bagaimana nasib buruh tani pada masa krisis ini? Pola strategi bertahan hidup selama krisis di sektor pertanian ada kemiripan dengan yang terjadi di sektor industri. Selama masa krisis ini, sebagian pemilik sawah yang semula tidak menggarap miliknya (menyewakan) beralih menjadi penggarap. Akibatnya, penggarap atau penyewa kekurangan lahan garapan. Persaingan dalam menyewa sawah menjadi lebih kompetitif. Sebagian dari mereka masih bisa menjadi penggarap atau berusaha lain, sebelumnya memang memiliki, namun sebagian lain tidak mendapatkannya. Kelompok terakhir ini ada yang beralih menjadi buruh tani atau buruh di perkebunan tembakau. Dengan demikian, jumlah buruh meningkat dan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan tidak bisa dihindari. Akibat selanjutnya mudah ditebak, pendapatan mereka menjadi lebih kecil, meskipun secara relatif.

Efek domino krisis terselamatkan oleh adanya perkebunan tembakau. Apakah peranan perusahaan ini akan kembali besar seperti pada tahun 1920-an? Melihat dinamika yang selama ini terjadi (lihat Margono, 1998), tampaknya sejarah itu sulit terulangi. Beberapa tahun terakhir ini perusahaan tersebut justru

cenderung merugikan masyarakat pemilik dan penggarap sawah di sana. Pemanfaatan sawah untuk ditanami tembakau bagi masyarakat justru mengurangi pendapatan mereka. Bila ini tidak terulang, peranan perusahaan tidak hanya menampung buruh, tetapi pendapatan pemilik yang lebih tinggi akan memperlancar roda perekonomian di sana. Upaya ini masih terus dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Era reformasi yang bersamaan dengan krisis ini bagi masyarakat setempat juga memunculkan harapan untuk hidup lebih baik.

Penutup

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa menjadi buruh bukan suatu pilihan. Terbatasnya modal (uang, lahan, pengetahuan, keterampilan) dan kesempatan menggiring mereka masuk ke dalam kategori ini. Pada masa sulit seperti sekarang ini, nasib mereka semakin mengenaskan. Buruh tani tergusur oleh penggarap yang sebelumnya berperan sebagai patron. Buruh jahit tergusur oleh majikannya dalam rangka meminimalisasi ongkos produksi. Keduanya tersingkir, meskipun mereka selama ini hanya berkutat pada upaya sekadar bertahan hidup. Anehnya, mereka justru sering menganggap *krisis ini belum*

apa-apa (Kutanegara, 1998; Mubyarto, 1999). Bagi sebagian orang ungkapan itu diterjemahkan belum mengalami krisis. Bagi penulis, ungkapan itu perlu ditanggapi secara lebih bijak. Tepatnya, ungkapan itu perlu ditafsirkan sebagai *bersiaplah menghadapi keadaan yang lebih buruk*. Pesimis? Tidak. Pengalaman kelompok miskin ini mengajarkan bahwa mereka secara absolut miskin, tetapi tidak mengalami deprivasi relatif, setidaknya tidak separah deprivasi relatif kelompok atasnya. Ini dimungkinkan karena mereka melakukan *downward comparison* yang bagi mereka merupakan satu-satunya *coping strategy*. Karenanya pula, pada masa krisis ini sedikit dari mereka yang tergolong pelaku kerusuhan. Mereka memang ada yang terpaksa mencuri atau menipu, tetapi itu juga bagian dari *survival strategy* (lihat Cederroth, 1995). Dengan kata lain, krisis ini dapat mendorong pola strategi bertahan hidup dari cara-cara yang halal ke cara-cara yang tergolong kriminal. Bila krisis ini tidak kunjung henti, apa yang perlu disiapkan?

Nasib buruh sangat tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Juragan konveksi, pemilik sawah, penyewa sawah, dan perkebunan tembakau tempat buruh bergantung nasib juga tergantung

pada pihak lain. Ketergantungan ini tidak sebatas pada agen atau institusi lokal, tetapi juga internasional, meskipun kadang-kadang tidak langsung. Ketika nilai rupiah anjlok, harga-harga tekstil, benang, pestisida, pupuk, dan tembakau ikut melambung. Perusahaan konveksi langsung diterpa olehnya hingga sekarat. Petani sempat merasa diuntungkan, tetapi kemudian ikut menderita karena ongkos produksi ikut membengkak. Minimnya modal mereka ikut membuat kondisi lebih runyam, apalagi ketika kredit yang dijanjikan seret dan nyaris tidak jalan. Sebaliknya, perkebunan tembakau kejatuhan untung besar. Sayangnya, lembaga ini hanya merupakan kepanjangan tangan dari penguasa dan birokrasi yang *self-oriented*, tidak sensitif terhadap masyarakat sekitar, dan pada tingkat yang paling rendah dalam strukturnya tampak sekali adanya pola kerja yang manipulatif serta eksploitatif. Meskipun demikian, optimisme masih menyala di lapangan. Masyarakat di tempat penelitian selalu mencari peluang-peluang untuk dimanfaatkan. Misalnya, menjelang pemilu ini pengusaha dan pekerja konveksi cepat merespons dengan memproduksi atribut partai seperti kaos, spanduk, topi, bendera, dan lainnya. Petani

juga tidak ketinggalan. Diversifikasi usaha tani dengan jalan menganeka ragamkan jenis tanaman makin banyak terlihat, contohnya melon. Mereka yang menganggur atau setengah menganggur banyak yang mengintip kesempatan untuk mendapatkan uang dengan jalan pergi ke pasar melakukan berbagai transaksi. Singkatnya, pada tingkat lokal, krisis yang berat ini masih bisa dihadapi. Mereka sekarang berharap dan menunggu perbaikan kondisi ekonomi pada tingkat di atasnya, nasional, regional, bahkan internasional.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan pada tiga penelitian lapangan, yaitu penelitian *Social Security*, penelitian Dampak Krisis, dan survai untuk disertasi penulis. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis dan ditulis sebagai makalah oleh penulis sendiri. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada sebagai pengelola dua penelitian di atas serta anggota tim kedua penelitian, terutama Dr. Irwan Abdullah, Muhammad Nuh, S.Sos., Dyah Ratih, S.Sos., Drs. Tukiran, M.A., Dra. Anna Marie Wattie, M.A., dan Sofiana, S.Sos.

Referensi

- Breman, J. 1992. *Footlose labour*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Cederroth, Suen. 1995. *Survival and profit in rural Java: the case of an East Javanese village*. Richmond: Curzon Press.
- Faturochman. 1998. "Bertahan hidup di masa krisis: Kasus Kalitengah". Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Social Security and Social Policy*. 28-29 Desember.
- Hardyastuti, Suhatmini dan Hidayana, Bambang. 1991. *Pekerja Wanita pada industri rumah tangga sandang di Propinsi DIY*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Kutanegara, Pande Made. 1998. "Dinamika kesejahteraan: Sriharjo dalam masa krisis". Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Social Security and Social Policy*. 28-29 Desember.
- Margono, S.A. 1998. *Mekanisme survival strategy: studi tentang respon petani tembakau dalam birokrasi perkebunan di Kalitengah*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Social Security and Social Policy*. 28-29 Desember.
- Mubyarto. 1999. *Krisis Ini belum seberapa...* Manuskrip belum diterbitkan.
- Padmo, S. 1998. "Kalitengah revisited". Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Makalah Pembanding dipresentasikan pada *Seminar Social Security and Social Policy*. 28-29 Desember.
- Partini, D. H. Susilastuti, dan Bambang Handoyo. 1990. *Buruh jahit di pedesaan Jawa: suatu studi tentang kondisi sosial ekonomi dan strategi kelangsungan hidup*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Sajogyo. 1977. "Golongan miskin dan partisipasi dalam pembangunan desa". *Prisma*, 6(3): 10-17.

DINAMIKA PENGUSAHA INDUSTRI COR LOGAM DIMASA KRISIS

*Susi Eja Yuarsi**

Abstract

Initially, metalworking can be quite reliable because, besides its substantial contribution to the economic progress of the local population, it has also absorbed a very substantial proportion of labor force, both local and from other districts. From the onset of the current economic crisis, metalworking has experienced a tremendous decline. This has been mainly due to the high production cost, which can not be compensated by the low selling price. The undesirable consequence of this trend is that many entrepreneurs have been forced out of business, hence, stopped production. The few who have persisted in business must really strain themselves for the sake of business survival. Their effort is mainly to keep the production cost as low as possible. This can be achieved by reducing the quantity of raw materials used, closer and tighter monitoring of the production process, and changing the system of paying workers. Although these efforts have been applied, the limited number of orders that they receive has forced most of the entrepreneurs to suspend production. There is therefore, an urgent need to seek alternative solutions to this pressing problem.

Pendahuluan

Usaha industri kecil merupakan salah satu alternatif yang diharapkan pemerintah untuk memecahkan permasalahan tenaga kerja. Tingkat perkembangan tenaga kerja yang pesat dan kenyataan bahwa pekerjaan di sektor pertanian dan industri modern tidak mampu mengimbangnya telah menjadikan industri kecil sebagai salah satu tumpuan harapan untuk mengatasinya. Selama periode 1975—1986

persentase tenaga kerja yang terlibat di sektor industri besar/ sedang naik dari 13,5 persen menjadi 32 persen. Di lain pihak, penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil pada kurun waktu yang sama naik dari 7 persen menjadi 14 persen (Weber, 1993:5).

Industri cor logam di Batur, Ceper merupakan salah satu industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Setiap

* Dra. Susi Eja Yuarsi, M.A. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

perusahaan mampu menyerap lebih dari 5 tenaga kerja, bahkan beberapa perusahaan mampu menyerap hingga ratusan orang tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di Desa Ceper tidak hanya berasal dari desa setempat, tetapi juga dari desa-desa sekitarnya, bahkan dari desa di luar Kabupaten Klaten.

Jumlah industri cor logam di Batur terus bertambah dengan pesat. Pada tahun 1978 jumlah industri cor logam tercatat baru sebanyak 107 unit perusahaan dan pada tahun 1991 jumlahnya telah menjadi 252 unit (Weber, 1993: 143). Menjelang krisis, jumlah industri cor logam di Batur telah menjadi sekitar 300 unit (*Kompas*, 1999). Itu berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri cor logam pun semakin banyak.

Krisis yang berkepanjangan di Indonesia telah membawa berbagai dampak bagi kelangsungan berjalannya suatu perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Tulisan ini merupakan hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan beberapa pemilik perusahaan industri cor logam di Ceper. Dalam tulisan ini diuraikan seberapa jauh dampak krisis berpengaruh bagi para pengusaha industri kecil, khususnya industri cor logam dan bagaimana cara mereka mempertahankan usahanya.

Batur, Sebuah Dusun Industri Cor Logam

Batur adalah sebuah dusun yang memiliki karakteristik khusus sebagai daerah industri kerajinan cor logam. Dusun ini terletak di wilayah Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Wilayah Ceper berada di sebelah tenggara jalan antara Yogyakarta – Surakarta. Kecuali industri cor logam, Kecamatan Ceper memiliki sejumlah industri lain seperti industri genteng pres, mebel, tenun, genderang, dsb. Namun, di antara industri-industri tersebut, industri yang paling terkenal adalah industri cor logam, yang sebagian besar perusahaannya berada di Dusun Batur. Selain industri, pertanian juga memegang peranan yang cukup penting.

Desa Tegalrejo mempunyai penduduk sebanyak 3.158 jiwa yang terdiri dari 1.497 laki-laki dan 1.661 perempuan. Dari sebanyak 1.107 orang yang bekerja, 43,18 persen di antaranya bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta. Wiraswasta yang banyak dilakukan oleh penduduk di wilayah tersebut adalah menjalankan industri di bidang pengecoran logam. Dari jenis pekerjaan penduduk tampak bahwa memang wilayah tersebut didominasi oleh industri pengecoran logam.

Di desa ini terdapat 2 buah TK, 3 buah SD, sebuah SLTP, sebuah

SMU, sebuah SMK (STM), serta dua buah pesantren. Keberadaan STM di wilayah tersebut berkaitan erat dengan industri cor logam. Ada saling keterkaitan antara industri cor logam dengan STM tersebut. Perusahaan-perusahaan cor logam merasa diuntungkan karena mereka bisa memperoleh tenaga kerja secara mudah dengan upah yang rendah pula, sedangkan pihak STM juga diuntungkan karena sebagian siswa atau alumnusnya bisa terserap sebagai tenaga kerja di industri pengecoran logam. Walaupun menjadi buruh di industri cor logam dianggap kurang membanggakan dan kurang “menjanjikan” prospek yang baik, setidaknya-tidaknya industri tersebut dapat dijadikan batu loncatan selagi para alumnus mencari pekerjaan lain yang lebih mapan. Para murid pun banyak terbantu dalam pembiayaan sekolah sebab mereka bisa menjadi anak asuh dari para pengusaha cor logam tersebut.

Industri Cor Logam: Perkembangan dan Kemerosotan

Usaha cor logam telah berkembang sejak lama. Pada sekitar tahun 1960-an usaha ini mulai tumbuh dengan produk-produk utama berupa alat kebutuhan pertanian. Pada perkembangan selanjutnya, industri cor logam banyak memproduksi alat-alat kebutuhan rumah tangga lainnya

seperti wajan ataupun komponen untuk mesin jahit. Pada waktu itu, pesanan yang datang belum begitu banyak, walaupun jumlah pesanan tersebut sudah cukup untuk menghidupkan beberapa perusahaan industri cor logam. Kurang pesatnya kemajuan industri cor logam ini membangkitkan salah seorang pengusaha untuk mencari cara yang tepat untuk dapat memajukan industri cor logam. Akhirnya, ia pun mempelajari cara membuat pompa air. Pada waktu itu pompa air yang sering digunakan merupakan pompa air import. Setelah berhasil mempelajari cara pembuatan pompa air tersebut, akhirnya ia memproduksi pompa air sejenis dengan harga jual yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pompa air import. Pompa air tersebut diberi merek yang berbeda dengan aslinya supaya tidak ada tuduhan melanggar hak paten. Ternyata produk pompa air tersebut laku keras dan banyak sekali pesanan datang sehingga mampu menghidupkan banyak perusahaan cor logam. Produk cor logam ini selanjutnya menjadi produk primadona bagi beberapa perusahaan cor logam.

Pada era 1985–1990 industri cor logam mengalami masa kejayaannya. Pada masa itu order yang diterima, baik dari pemerintah, swasta, maupun perorangan sangat banyak sehingga perusahaan-perusahaan

besar terpaksa menyalurkan atau membagi order-order tersebut ke perusahaan lainnya, baik yang lebih kecil maupun setaraf dengan perusahaannya. Bahkan, banyak mantan buruh pekerja tenaga terampil mendirikan perusahaan baru untuk membantu perusahaan lain dalam memproduksi barang pesanan akibat berlimpahnya order. Seorang pengusaha yang pada zamannya terhitung paling sukses menceritakan bahwa ia terpaksa menghubungi dan menyuruh saudara-saudara serta keponakannya mendirikan perusahaan cor logam karena order yang datang tidak sanggup diselesaikannya sendiri.

Perkembangan dan kemajuan usaha cor di Dusun Batur, Desa Tegalrejo yang cukup pesat memungkinkan terserapnya jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Tenaga kerja pengecoran logam tidak hanya berasal dari desa setempat, namun sebagian besar datang dari kabupaten lain. Bagi tenaga-tenaga terampil (dalam industri pengecoran logam, tenaga bidang pengecoran yang dianggap memerlukan keterampilan khusus) terbuka kesempatan luas untuk mengembangkan diri dengan terlebih dulu bekerja di perusahaan untuk kemudian membuka perusahaan sendiri. Tidak jarang buruh pengecoran beralih profesi menjadi pengusaha cor logam. Usaha cor logam dapat dijalankan dalam berbagai tingkatan modal dan

teknologi. Oleh karena itu, buruh cor dapat mulai membuka usaha dengan modal sedikit dan teknologi yang sederhana.

Besarnya *demand* memungkinkan para pengusaha mengembangkan industri cor logam mereka. Pengembangan industri cor logam di daerah Batur bisa dalam berbagai tingkat, baik dalam tingkat modal yang digunakan maupun tingkat produk yang dihasilkannya. Industri atau perusahaan yang memiliki modal besar, sebagian usaha dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang sudah lebih modern dengan produk yang juga terkait dengan teknologi maju. Perusahaan semacam ini biasanya telah mengembangkan kerja samanya dengan perusahaan multinasional. Hasil produksinya pun sebagian telah diekspor ke luar negeri. Sementara itu, perusahaan lain yang lebih bersifat *home industry* dikembangkan dengan modal kecil. Perusahaan semacam ini umumnya menghasilkan barang kebutuhan konsumen yang dipesan secara langsung, antara lain, pompa tangan, asesori pagar dan pintu gerbang, atau memproduksi barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti wajan dan seterika. Di antara perusahaan-perusahaan kecil semacam ini, terdapat juga perusahaan yang melakukan kerja sama dengan perusahaan yang lebih besar.

Beberapa perusahaan yang lebih dulu terikat ke dalam sistem

subkontrak berkembang secara mencolok. Tingkat teknologi yang digunakan sudah maju, bahkan beberapa di antaranya memiliki mesin import. Beberapa di antara perusahaan ini telah berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT). Damanik (1993:73-74) mencatat bahwa walaupun perusahaan-perusahaan cor logam cukup bervariasi, baik dari sudut permodalan dan teknologinya, ciri kepemilikan dan manajemen usaha antara perusahaan kecil dan besar tidak berbeda jauh. Ciri manajemen keluarga sangat menonjol karena setiap perusahaan dikendalikan sepenuhnya oleh salah seorang anggota keluarga. Kedua hal tersebut, yaitu mudahnya buruh cor logam beralih menjadi pengusaha cor logam dan bersifat manajemen keluarga, menyebabkan jumlah unit usaha cor logam bertambah pesat. Pemilik cenderung mewariskan perusahaan kepada salah seorang anak dan di samping itu memberikan modal kepada anak yang lain untuk kemudian mendirikan industri sejenis.

Koperasi "Batur Jaya" dibentuk sebagai wadah yang bertujuan untuk memajukan usaha cor logam di wilayah ini. Dibentuknya koperasi sebagai wadah bagi para pengusaha cor logam diharapkan dapat membantu para pengusaha dalam mengembangkan usaha sebab mereka bisa mendapatkan order sekaligus belajar keterampilan

an dari koperasi melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan. Beberapa pengusaha yang baru memulai usahanya meminta bantuan pada koperasi untuk mendapatkan order. Koperasi ini juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan berupa pemberian pelatihan yang bekerja sama dengan Yayasan Dharma Bakti ASTRA dan ATMI Surakarta. Pelatihan yang diadakan, di antaranya, adalah pelatihan manajemen, analisis gambar, serta teknik-teknik pembuatan cor logam. Pelatihan ini bertujuan agar para peserta dapat meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di perusahaan cor logam sehingga kualitas produk yang dihasilkan meningkat pula. Di samping itu, para pengusaha melalui pelatihan manajerial diharapkan mampu meningkatkan kemampuan manajerial mereka.

Dari kalangan para pengusaha muncul berbagai tanggapan mengenai keberadaan koperasi tersebut. Sebagian berpendapat bahwa koperasi sangat membantu dan bermanfaat. Berbagai keuntungan bisa didapat dengan cara masuk sebagai anggota koperasi. Keuntungan tersebut dapat berupa jatah order, pelatihan manajemen, dan proses pembuatan cor logam secara lebih baik, termasuk merancang gambar serta memperkirakan bahan. Di lain pihak beberapa pengusaha berpendapat bahwa keberadaan koperasi tidak begitu berarti. Institusi itu dianggap hanya

menguntungkan beberapa pihak. Pembagian order seringkali tidak merata dan hanya kalangan tertentu yang banyak mendapatkannya.

Pengusaha yang mendaftar pun tidak seluruhnya berkeyakinan dapat memperoleh manfaat yang besar dari koperasi. Mereka hanya sekedar menjadi anggota koperasi tanpa tahu ataupun berharap akan manfaatnya. Sementara, pengusaha lainnya mendaftar hanya dengan harapan bisa memperoleh rekomendasi yang berguna untuk mendapatkan kredit dari bank. Ketidapedulian para pengusaha pada koperasi pada masa itu ialah karena banyaknya order yang datang sehingga menjadikan para pengusaha tidak begitu tergantung pada koperasi. Tanpa bantuan koperasi, mereka bisa dengan mudah mendapatkan order sendiri.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini berimbas pada berbagai sendi kehidupan. Usaha industri, terutama yang bergantung pada bahan baku import sebagian besar akan gulung tikar. Keadaan industri-industri cor logam di Batur pun tidak jauh berbeda. Sekilas, keadaan industri pengecoran logam di Batur tampak lesu selama masa krisis ekonomi berlangsung. Wilayah yang biasanya terasa sangat bising oleh deru mesin pabrik karena hampir semua pabrik melakukan proses produksi, kini, suasana terkesan agak lengang. Banyak pabrik tidak

berproduksi lagi disebabkan oleh makin mahalnya bahan baku serta makin sulitnya mencari pasaran.

Tidak adanya kesesuaian antara harga jual dengan biaya produksi mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami *collapse*. Seperti kebanyakan industri yang mengandalkan bahan baku import, industri cor logam juga mengalami kesulitan pengadaan bahan baku karena harganya terlalu mahal. Bahan baku cor logam yang berupa *cash iron* harus didatangkan dari RRC sehingga harganya pun menggunakan patokan dolar. Harga-harga bahan baku membubung, misalnya saja, harga bahan baku besi sebelum krisis Rp 450,00 per kg, sekarang menjadi Rp 1.500,00 per kg, sedangkan harga batu bara yang dulu hanya Rp 800,00 per kg sekarang menjadi Rp 3.000,00 per kg.

Naiknya harga bahan baku tersebut otomatis mengakibatkan harga jual produk juga menjadi berlipat ganda. Hal ini menjadikan konsumen enggan untuk memesan produk cor logam, terutama konsumen individual. Mereka memilih menunda pemesanan, apalagi produk cor logam bukanlah termasuk barang-barang kebutuhan utama. Langkanya pesanan mengakibatkan sebagian perusahaan gulung tikar. Kalau pun usaha mereka tidak bangkrut total, pengusaha setidaknya harus tetap mencari berbagai cara untuk menghemat biaya produksi.

Setiap perusahaan pengecoran logam mempunyai pasar sendiri-sendiri. Ada perusahaan yang sebagian besar ordernya datang secara individual, ada yang dari pemerintah, dan ada juga yang lebih banyak merupakan pesanan dari perusahaan swasta atau perusahaan yang bekerja sama dengan luar negeri. Saat ini, perusahaan yang masih bisa bertahan umumnya adalah perusahaan yang terkait dengan pemasaran dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang biasa melayani order dari pemerintah untuk sementara harus gulung tikar karena program-program pemerintah seperti pembangunan perumahan, dan lain sebagainya banyak yang ditunda atau bahkan berhenti. Sebelum krisis berlangsung, pembangunan perumahan begitu marak dan para kontraktor pun banyak memesan pompa air pada perusahaan-perusahaan cor logam di Batur. Pesanan pompa air tersebut sempat menjadikan banyak perusahaan menjadi hidup dan berkembang. Kini, satu-satunya perusahaan pemerintah yang masih memberikan order adalah Perumka yang memberikan order berupa sepatu rem kereta api pada Koperasi Batur Jaya. Pesanan itulah yang sampai sekarang masih mampu menghidupkan beberapa perusahaan pengecoran logam. Hal ini juga merupakan penyebab mengapa jumlah anggota koperasi

terus bertambah pada masa krisis ini.

Pesanan dalam skala besar yang datang dari pemerintah, seperti pemesanan pompa air yang biasanya digunakan di perumahan-perumahan, terhenti seiring dengan macetnya pembangunan perumahan. Krisis ekonomi yang berlarut-larut memaksa pemerintah untuk melakukan pengetatan anggaran untuk berbagai bidang, termasuk untuk pembangunan perumahan, padahal produksi pembuatan pompa air ini pernah menjadi produk andalan dan tumpuan bagi banyak perusahaan cor logam. Bahkan, pada sekitar tahun 1990-an, beberapa pengusaha merasa kewalahan memenuhi order.

Tidak semua perusahaan mengalami kesulitan, ada pengecualian; beberapa perusahaan malahan mendapat keuntungan berlebih dengan adanya krisis ekonomi tersebut. Perusahaan yang mendapat keuntungan lebih pada masa krisis ini adalah perusahaan yang bentuk produksinya produk ekspor, seperti komponen kompor. Sebuah perusahaan pembuat komponen kompor ekspor mengaku bahwa dalam situasi semacam ini, ia bisa memperoleh keuntungan lebih dari dua kali lipat dari masa-masa sebelumnya. Sayangnya, jumlah perusahaan yang memproduksi barang ekspor hanya sedikit.

Kondisi perekonomian nasional memang merupakan faktor

eksternal yang menjadi pemicu bagi kemerosotan industri cor logam. Namun, di samping faktor tersebut, faktor internal pun sebetulnya juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan. Sistem manajemen keluarga merupakan salah satu di antaranya. Selama ini, banyak perusahaan yang sebetulnya tidak berdiri sendiri, namun ada ketergantungan terhadap perusahaan lain. Perusahaan baru yang merupakan perusahaan bentukan ataupun warisan dari sebuah perusahaan yang telah lama berdiri sering bergantung pada perusahaan induk, termasuk dalam hal pemasaran ataupun pencarian pesanan. Akibatnya, ketika perusahaan induk tidak mendapatkan pesanan atau hanya mendapatkannya sedikit pesanan, perusahaan anak atau perusahaan baru juga tidak mendapatkan pesanan juga.

Upaya Penanggulangan

Krisis ekonomi secara umum menyulitkan kelangsungan usaha industri-industri cor logam. Pengusaha yang masih bertahan, tidak terkecuali industri berskala besar, mengaku mengalami akibat buruk dari situasi tersebut. Hal itu mendorong mereka untuk mencari berbagai upaya penanggulangan agar kelangsungan perusahaan mereka tetap dapat dipertahankan. Salah satu hal yang mereka anggap paling efisien untuk menghadapi masalah tersebut adalah dengan

cara menghemat biaya produksi. Cara-cara untuk menghemat biaya produksi adalah dengan menghemat bahan baku, misalnya, mendaur ulang penggunaan pasir, batu bara, serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap jalannya proses produksi agar sesuai dengan program yang sudah digariskan. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk menghindari kegagalan produksi. Kadang-kadang jika pengawasan terhadap proses produksi kurang ketat, hasil produksinya banyak yang tidak sempurna sehingga tidak dapat dipasarkan. Konsekuensinya ialah harus dilebur kembali dan tentunya akan menambah biaya produksi lagi.

Adakalanya para pengusaha menghemat biaya produksi dengan cara mengurangi berat bahan baku, namun berusaha sedemikian rupa agar kualitas barangnya tidak terlalu jauh berbeda. Kadang-kadang bahan baku besi yang biasanya berasal dari Cina diganti dengan bahan lokal berupa besi rongsokan yang harganya lebih murah. Cara-cara ini ditempuh pengusaha dengan harapan agar harga jual tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat masih mampu membelinya. Walaupun para pengusaha sudah berusaha sedemikian rupa untuk menekan biaya produksi, bila dibandingkan dengan harga sebelum masa krisis, harga jual tetap jauh lebih tinggi, bahkan dapat berlipat ganda.

Strategi lain untuk menekan biaya produksi adalah dengan melakukan efisiensi kerja, termasuk di antaranya mengubah sistem pengupahan. Hal ini dilakukan oleh beberapa perusahaan cor logam demi kelangsungan hidup perusahaan serta kesejahteraan para pekerjanya. Sebelum krisis berlangsung, perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan cara pengupahan dengan sistem harian, baik bagi pekerja bagian cetak, pengecoran, maupun *finishing*. Sejak krisis berlangsung, perusahaan-perusahaan tersebut mengubah sistem pengupahan, terutama bagi pekerjaan bidang pengecoran dari sistem harian menjadi sistem borongan karena sistem borongan dirasakan lebih efisien dan menghemat biaya.

Sepinya pesanan yang ada menjadikan banyak perusahaan mengalami kesulitan dan sebagian terpaksa menghentikan produksinya. Perusahaan-perusahaan besar, baik yang hanya sedikit menerima order atau sama sekali tidak mendapatkan order, kebingungan karena proses produksi terhenti, namun mereka terbebani oleh biaya abonemen listrik yang cukup tinggi. Mereka umumnya masih enggan untuk melepaskan abonemen tersebut karena masih berharap bahwa pada suatu saat, krisis ekonomi akan berlalu dan pesanan kembali berdatangan. Oleh karena itulah, tidak jarang perusahaan ini beralih ke usaha lain sebagai

strategi untuk setidaknya dapat menutupi biaya produksi perusahaan. Salah satu produk andalan yang saat ini menjadi tumpuan banyak perusahaan adalah produk mebel.

Banyaknya pengusaha cor logam beralih ke produksi pembuatan mebel disebabkan oleh adanya sebuah perusahaan eksportir mebel yang berada tidak jauh dari Kec. Batur. Perusahaan tersebut menawarkan order ke beberapa pengusaha cor logam dan order itu pun diterima karena memang hasilnya lumayan untuk dapat menutup biaya perusahaan yang mesti dikeluarkan setiap bulan. Usaha tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, berkisar antara 3 hingga 10 orang tenaga kerja. Walau dibandingkan dengan usaha cor logam keuntungan yang didapat dari usaha mebel belumlah sebanding, pada saat krisis ini pendapatan itu dirasakan cukup membantu. Keuntungan lain dari peralihan usaha ini, selain membantu menghidupi rumah tangga pengusaha dan menutup biaya produksi perusahaan, usaha mebel juga mampu mengurangi jumlah penganggur walaupun jumlahnya kecil.

Banyaknya jumlah pengangguran memang menjadi masalah tersendiri. Sepinya order cor logam mengakibatkan banyak tenaga kerja terpaksa kehilangan pekerjaan mereka. Istilah PHK memang tidak

dikenal dalam industri pengecoran logam karena pada umumnya para pekerja bekerja hanya pada saat ada order saja atau bersifat pekerja harian. Biasanya pekerja yang sedang tidak mendapatkan job tetap tinggal di Batur karena menunggu jika sewaktu-waktu mendapat panggilan kerja. Namun saat ini, lamanya waktu menganggur mengakibatkan banyak tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Ceper terpaksa kembali ke daerahnya.

Para pekerja yang berasal dari desa setempat pada umumnya juga tidak berupaya pergi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan lain, namun umumnya mereka bertahan tinggal di desa dengan harapan mendapat panggilan untuk bekerja kembali. Beberapa pekerja mengisi waktu dengan melakukan *melik*, yaitu mencari sisa-sisa besi cor logam untuk kemudian dijual ke pengusaha. Pengusaha dengan senang hati menerimanya sebab barang tersebut dapat kembali diolah dan harganya lebih rendah dibandingkan dengan jika mereka membeli bahan baku. Dengan membeli hasil *melik* tersebut, biaya produksi bisa lebih ditekan.

Beberapa perusahaan yang masih mempunyai izin usaha masih sering menerima pesanan. Namun, karena pesanan yang datang berskala kecil, mereka menyerahkan penggarapannya ke perusahaan yang lebih kecil karena dirasakan lebih menguntungkan.

Satu hal yang cukup memprihatinkan dalam masa krisis ini adalah munculnya tindak kriminal berupa pencurian model pengecoran logam. Keadaan pabrik yang lengang karena tidak sedang berproduksi menjadi sasaran pencurian.

Pencurian model pengecoran ini banyak dilakukan karena untuk membuat suatu model diperlukan biaya, waktu, serta keterampilan yang baik. Walaupun pada masa kini mungkin model tersebut belum bermanfaat, diharapkan pada waktu-waktu lain ketika pesanan kembali berdatangan, adanya model akan membantu mempercepat dan menghemat biaya produksi.

Penutup

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membawa dampak yang sangat besar bagi kelangsungan industri pengecoran logam. Sepinya pesanan serta mahalnya bahan baku mengakibatkan banyak perusahaan menghentikan produksinya, bahkan banyak perusahaan gulung tikar. Para pengusaha yang menghentikan produksinya masih tetap mempertahankan izin operasinya, dengan harapan krisis akan segera berlalu sehingga mereka bisa mendapatkan pesanan lagi.

Beberapa perusahaan cor logam mencoba beralih ke usaha lain. Hal ini dilakukan hanya sekedar mempertahankan izin yang ada

dan membayar biaya perawatan pabrik. Sementara ini, pengusaha seakan-akan belum rela untuk seratus persen menutup usahanya. Hal yang mereka lakukan adalah menunggu sampai pesanan-pesanan kembali berdatangan. Untuk sementara, sebagian pengusaha beralih ke industri mebel sebagai satu alternatif mengatasi masalah. Namun, pasar mebel yang terbatas kemungkinan besar makin sulit menampung produk karena makin banyak lagi pengusaha cor logam yang beralih ke usaha tersebut. Hal ini tentu menuntut pemecahan yang tidak sederhana.

Tidak beroperasinya perusahaan tentu berdampak pada pekerjaannya. Mereka kehilangan pekerjaan yang ditekuni selama ini, namun para pekerja ini masih tetap menunggu order pekerjaan yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini mereka lakukan karena sulitnya mencari pekerjaan di sektor lain dan yang utama keahlian mereka kurang menunjang bila mereka beralih profesi. Jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pun cukup banyak dan ini berarti menjadi masalah tersendiri yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan.

Situasi sulit yang mengakibatkan banyak perusahaan cor logam menghentikan kegiatan produksinya perlu segera dipecahkan. Para

pengusaha yang sebagian besar tidak mau menerima kenyataan bahwa usaha tersebut agak sulit dibangkitkan kembali untuk jangka pendek perlu disadarkan agar mereka segera mencari peluang berusaha di bidang usaha lain. Dengan demikian, pekerja yang selama ini menganggur karena menunggu adanya pesanan juga akan bisa terserap ke dalam usaha-usaha baru tersebut. Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk membangkitkan kembali industri pengecoran logam adalah dengan berusaha mencari pasaran luar negeri karena perusahaan yang membuat produk ekspor terbukti bisa bertahan dan bahkan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan Dampak Krisis di Perdesaan yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Sukamdi, M.Sc., Drs. Abbas Effendi, M.A., Drs. Purwanto, M.Phil., Dyah Ratih Sulistyani, S.I.P., Agus Joko Pitoyo, S.Si. dan Sri Purwatiningsih, S.Si., dan sebagai anggota tim peneliti di Batur, Ceper.

Referensi

- Damanik, Janianton. 1993. "Mobilitas buruh dan upah dalam industri serta kaitannya dengan rumah tangga di desa asal: kasus industri cor logam Batur, Klaten", dalam Tadjuddin Noer Effendi dan Helmut Weber, *Industrialisasi di pedesaan Jawa*. Yogyakarta: kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Friedrich Ebert Stiftung dan Goethe Institute
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1991. *The growth of rural non-farm activities at the local level: a case study of causes and effects in a subdistrict of upland Central Java*. Flinders. Ph.D thesis, Flinders University.
- Rustiani, Frida dan Maspiyati. 1996. *Usaha rakyat dalam pola desentralisasi produk subkontrak*. Bandung: Akatiga.
- Saleh, Irsan Azhary. 1986. *Industri kecil, sebuah tinjauan dan perbandingan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- "Sebagian usaha cor logam di Ceper tutup". 1999. *Kompas*, 15 April.
- Weber, Helmut. 1993. "Industrialisasi di pedesaan Indonesia: isu dan masalah", dalam Tadjuddin Noer Effendi dan Helmut Weber, *Industrialisasi di pedesaan Jawa*. Yogyakarta: kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Friedrich Ebert Stiftung dan Goethe Institute.

SRIHARJO PADA MASA KRISIS

*Pande Made Kutanegara**

Abstract

Generally, it is assumed that the economic crisis would hardly experienced by people who live in urban areas, mainly those who are in the lowest social stratum. Certainly, some people (experts) are convinced that people who live in the village would not affected by the impact of stagnating national economy. Recent studies, however, show that almost all of social stratum in Indonesia, both in cities and villages, are hit by the crisis but the intensities of its varies from one group to another. There are many factors to be considered in discussing impacts of crisis, i.e social, economy, and demography, as well. This article will clearly describe how people from various strata in the village perceive and how do they cope with the crisis.

Pengantar

Lebih dari satu tahun lamanya masyarakat kita dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, tanpa ada tanda-tanda pemulihan yang jelas. Harga berbagai kebutuhan pokok meningkat sedemikian hebat, sementara tingkat pendapatan tetap, bahkan menurun. Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Menurut BPS, selama krisis, penduduk miskin meningkat dari 22 juta orang atau 11 persen menjadi 80 juta lebih atau 40 persen, dan bahkan ada yang memperkirakan menjadi 113 juta (*Kompas*, 18 Juni 1998). Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah

angka kemiskinan diperdebatkan banyak orang, termasuk dari tiga lembaga yang berkompeten yakni SMERU, EACIQ, dan EACIF, yang memperkirakan angka kemiskinan absolut di Indonesia hanya meningkat menjadi 34 juta orang atau 17 persen. Perkiraan BPS dan lembaga-lembaga lain dengan jelas menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memberikan dampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Persoalannya adalah pada kelompok mana krisis ekonomi yang berlangsung sangat dirasakan.

* Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Berbagai tulisan menunjukkan bahwa dampak krisis ternyata berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Walaupun ada sebagian kecil yang merasa diuntungkan oleh krisis yang terjadi, sebagian besar masyarakat merasa dirugikan oleh krisis ini. Sementara ini, diduga kelompok masyarakat yang sangat merasakan dampak krisis adalah lapisan bawah perkotaan, sementara masyarakat perdesaan relatif lebih baik. Hasil observasi singkat Jellinek di beberapa wilayah di perdesaan Jawa menunjukkan bahwa krisis tidak terjadi di perdesaan. Berbagai peluang usaha berkembang ketika krisis berlangsung dan masyarakat perdesaan justru menjadi semakin meningkat semangat kerjanya pada zaman krisis ini sehingga berbagai bantuan yang diberikan tidak begitu penting dan bermanfaat bagi mereka (*Kompas*, 10 Februari 1999).

Laporan Jellinek tersebut masih perlu dipertanyakan dan diperdebatkan, mengingat cakupan wilayah dan waktu penelitian yang dilakukan sangat pendek sehingga kemungkinan hanya mampu menangkap apa yang ada di permukaan saja. Secara metodologis, ada tiga hal pokok yang perlu dicermati dalam melihat dan menggunakan tulisan tersebut sebagai referensi. Persoalan pertama adalah persoalan representasi wilayah dan data yang dikumpulkan. Dengan menggunakan sampel wilayah yang sedemikian terbatas,

apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi pada wilayah yang berbeda dan kondisi yang berbeda? Persoalan kedua adalah masalah waktu penelitian dan metode yang digunakan. Apakah penelitian yang berjangka waktu pendek dan lebih sebagai kunjungan kerja dapat meliputi berbagai realitas yang ada. Sementara dalam kultur masyarakat kita, fakta dan realitas sosial justru ada di balik apa yang tampak (*hidden transcript*). Peneliti harus menyadari bahwa realitas masyarakat tidak sama dengan realitas yang tertangkap oleh peneliti. Jangka waktu penelitian yang sedemikian pendek jelas akan sangat menyestakan. Agar mampu menangkap realitas sosial, sangat diperlukan penelitian yang intensif. Persoalan ketiga adalah masalah fokus dan unit analisis. Dalam masa krisis, unit analisis yang paling tepat digunakan bukanlah usaha atau wilayah, melainkan rumah tangga, mengingat berbagai persoalan dan dampak krisis sangat kentara pada tingkat rumah tangga, yang akhirnya mempengaruhi manajemen rumah tangga masyarakat. Ini berarti bahwa dalam melihat dampak krisis, posisi wanita dan ibu rumah tangga menjadi sangat sentral dan strategis.

Tulisan ini menganalisis lebih dalam dampak krisis ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk di Desa Sriharjo, Yogyakarta. Desa ini terletak di ujung timur wilayah Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta; merupakan tipologi desa miskin di perdesaan Jawa pada tahun 1960-an. Hasil penelitian D.H. Penny dan Masri Singarimbun (1973) yang berjudul *Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmetic* telah membuka mata sebagian pengamat dan birokrasi tentang kronisnya situasi kemiskinan di perdesaan Jawa saat itu. Keterbatasan sumber daya alam yang disertai keterbatasan peluang kerja telah menciptakan masyarakat miskin di desa ini. "Situasi kemiskinan benar-benar nyata di desa ini", tulis Masri Singarimbun dalam buku tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi masyarakat desa ini ketika krisis ekonomi berlangsung di Indonesia; dan bagaimana strategi mereka dalam menyikapi berbagai perubahan yang muncul belakangan ini.

Sriharjo: Apakah Masih Desa Miskin

Dalam satu kesempatan, Prof. Dr. Mubyarto dan beberapa peneliti lain yang datang ke Desa Sriharjo terkejut ketika mengetahui desa ini tidak termasuk desa IDT. Selaku konseptor dan penanggung jawab program, dia merasa bahwa desa ini layak sebagai desa IDT karena prasarana dan sarana transportasi serta kondisi pemukiman penduduk sangat tidak mendukung. Pemukiman dan sarana yang bagus

hanya terdapat di bagian muka desa, sementara di bagian lain (di pojok desa), keadaan justru sebaliknya. Wilayah desa yang berada pada posisi 'kurang berkembang' justru lebih luas dibandingkan dengan yang dapat dianggap maju. Hal itu berkaitan dengan topografi desa yang berbeda antara wilayah desa bagian barat dengan bagian timur; yakni dataran rendah di sebelah barat dan pegunungan kapur di sebelah timur. Desa yang mempunyai luas 615,7 hektar, ternyata dua pertiganya berupa tanah kapur dan sisanya lahan pertanian yang subur. Oleh karena itu, walaupun mereka menyatakan diri sebagai petani, dilihat dari kepemilikan lahan ternyata sangat sempit yakni kurang dari 500 meter per rumah tangga. Selain sempit, lahan pertanian yang tersedia kurang subur dan selalu memiliki persoalan kecukupan air pada musim kemarau. Oleh karena itu, penduduk tidak mungkin dapat mengandalkan sektor pertanian untuk mendukung kehidupannya. Mereka harus mencari alternatif lain di luar sektor pertanian untuk menopang kehidupannya.

Sejalan dengan perbaikan sarana transportasi, pekerjaan *non-farm* dan *off-farm* berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir (Singarimbun, 1993). Hampir tiap menit terdapat bus angkutan yang lewat di jalan propinsi yang membelah bagian barat Desa Sriharjo. Setiap pagi jalan yang

beraspal mulus itu dipadati dengan anak-anak sekolah dan penduduk yang melakukan *commuting* ke Yogya dengan naik sepeda. Pekerjaan sebagai buruh bangunan atau buruh serabutan di kota, atau yang dikenal dengan istilah *glidhik*, memiliki peran penting dalam struktur perekonomian penduduk Sriharjo. Sementara itu, terjadi juga arus mobilitas penduduk ke luar wilayah. Terdapat dua pola dalam mobilitas penduduk Sriharjo. Pertama, mobilitas ke kota-kota besar yang letaknya relatif jauh, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, dan Surabaya. Pola ini biasanya dilakukan oleh para penduduk berusia muda, berpendidikan menengah ke atas (biasanya lulusan SMA), dan bekerja pada sektor industri. Mereka biasanya pulang setengah tahun atau satu tahun sekali. Kedua, mobilitas ulang-alik ke Yogyakarta. Pelaku mobilitas ini biasanya orang-orang yang sudah berumur, pendidikan rendah, dan bekerja di sektor informal atau buruh bangunan. Pekerjaan *glidhik* inilah yang banyak memberikan sumbangan dalam pendapatan rumah tangga di Sriharjo. Dalam satu hari kerja mereka biasa dibayar Rp6.000,00 sampai dengan Rp9.000,00 sesuai dengan keahliannya.

Suasana desa yang agraris ini juga lebih diperkaya dengan munculnya industri kecil berupa pembuatan krupuk dan pembuatan kayu arang. Pembuatan kayu arang

merupakan jenis industri yang sudah cukup tua di desa ini. Sejak zaman Belanda, desa ini terkenal sebagai pemasok kayu arang untuk daerah sekitarnya. Hutan yang masih cukup luas dan lebat merupakan potensi besar yang dapat mereka manfaatkan pada masa lalu. Ketika hutan telah habis dijarah (wilayah sekitar desa ini pada masa lalu cukup terkenal sebagai sarang pencuri kayu jati dan pengambil ranting tanaman hutan) maka industri kayu arang mulai kesulitan bahan baku. Usia industri kayu arang sebenarnya sebanding dengan usia pembuatan gula kelapa di desa ini. Pembuatan kayu arang berkembang pada wilayah-wilayah yang dekat dengan hutan (daerah perbukitan di bagian timur desa), sedangkan industri gula kelapa berkembang di daerah dataran rendah di bagian barat desa. Menurunnya jumlah industri pembuatan kayu arang ternyata diikuti pula dengan menurunnya jumlah industri gula kelapa. Hidup modern yang sering diartikan dengan hidup bersih dan sehat telah mengakibatkan terjadinya pembabatan terhadap berbagai tanaman pekarangan, termasuk pohon kelapa. Meningkatnya pembangunan rumah dan masuknya jaringan listrik juga telah mengorbankan banyak tanaman kelapa yang ada di desa ini. Mengingat pohon kelapa merupakan bahan baku utama industri gula kelapa, maka dengan demikian

terjadi pergeseran status pekerjaan menderes ke jenis pekerjaan lain.

Hilangnya berbagai industri tradisional, selain diikuti dengan munculnya kesempatan kerja di kota, akhir-akhir ini di desa ini juga berkembang industri kecil pembuatan tas bordir dan pembuatan pakaian tradisional yang melibatkan tenaga ibu-ibu atau remaja putri dengan sistem *putting out system*. Upah per hari yang diterima berkisar antara Rp3.000,00 – Rp4.000,00. Peluang kerja ini sangat besar artinya bagi rumah tangga pedesaan. Selain mereka mendapatkan uang, salah satu kebiasaan buruk yakni mencari kutu kepala yang dilakukan ibu-ibu di desa setelah selesai memasak, juga menjadi hilang sama sekali.

Sriharjo dalam Masa Krisis

a. Persepsi Lokal tentang Krisis

Istilah krisis merupakan sebuah wacana baru yang mulai memasuki wilayah-wilayah publik maupun pribadi dari setiap penduduk Indonesia. Oleh karena itu, krisis sangat mungkin diberi dan memperoleh makna berbeda dari setiap orang ataupun kelompok. Sebagai istilah baru, krisis sangat cepat populer dalam masyarakat pedesaan. Istilah krisis dikenal sebagai krismon, moneter, dan zaman krisis. Walaupun kata krisis merupakan istilah baru bagi mereka, fenomena krisis sebenarnya telah mereka alami sepanjang kehidupannya

(Kutanegara, 1998c). Kesulitan ekonomi sebagai bagian dari *simptom* krisis sebenarnya selalu mereka alami sepanjang hidupnya, namun selama ini mereka menyatakan dengan istilah yang berbeda, misalnya "*wong ora nduwe; urip rekasa*", dsb). Dalam masa krisis sekarang ini, mereka melihat *simptom* krisis yang lebih kompleks, misalnya kembalinya penduduk desa yang bekerja di kota, banyaknya buruh bangunan yang tidak pergi ke kota, dan naiknya harga-harga kebutuhan hidup mereka.

Persepsi dan konsepsi tentang krisis juga sangat beragam di desa ini. Tidak semua penduduk menganggap zaman sekarang ini adalah zaman krisis. Variasi pandangan dan persepsi tentang krisis dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomis dan demografis seperti umur, status ekonomi, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Dilihat dari segi umur, tampak hanya generasi muda (*young generation*) yang menganggap bahwa situasi sekarang ini adalah krisis. Sebaliknya, generasi tua (*old generation*) menganggap bahwa sekarang ini masih zaman normal yang tidak perlu diberi perhatian khusus. Perbedaan konsepsi tentang krisis tampak dipengaruhi oleh riwayat kehidupan mereka. Bagi kelompok tua, krisis disamakan dengan kelaparan. Jika terjadi *larang pangan* yang berakibat pada munculnya kelaparan, itu adalah

zaman krisis; kalau masih ada bahan makanan, bukanlah krisis. Konsepsi generasi tua seperti itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka yang sudah berkali-kali mengalami tekanan ekonomi yang sangat parah, bahkan kelaparan hebat. Paling tidak, ada empat periode kelaparan /*larang pangan* yang pernah mereka alami, yakni (1) zaman melaise (meleset) tahun tiga puluhan; (2) zaman penjajahan Jepang 1942–1945, saat tentara Jepang merampas apa saja yang dimiliki oleh penduduk seperti beras, ketela, dan ternak; (3) zaman Revolusi 1945–1950, saat mereka sibuk mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak sempat memikirkan pertanian; dan (4) zaman Orla (Orde Lama 1960–1970) saat mereka terpaksa makan pakan kuda (beras bulgur), beras tekad (tela-kacang-daging), bonggol pisang, dan umbi-umbian beracun yang diolah sedemikian rupa sehingga racunnya hilang dan bisa dimakan (Mubyarto, 1999).

Generasi muda yang lahir dan besar pada zaman Orde Baru, kehidupan enak dan manja telah mereka peroleh selama ini. Oleh karena itu, sedikit goncangan yang mereka hadapi sudah menjadikan dirinya menjerit dan merasa susah. Oleh karena itu, zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman krisis. Bagi mereka, krisis tidak hanya berarti kelaparan (kurang makan), tetapi setiap situasi perubahan (penurunan) akses

terhadap kebutuhan mereka. Krisis bagi mereka telah tampak dalam turunnya upah, turunnya nilai tukar uang (pendapatannya), dan berubahnya kuantitas dan kualitas konsumsi hariannya. Naiknya harga rokok berlipat-lipat mengakibatkan mereka harus menurunkan kualitas rokok yang dikonsumsi. Demikian juga, naiknya harga lauk-pauk memaksa mereka mengonsumsi lauk seadanya (nasi dengan sayur bening) dan sambel. Semuanya itu merupakan *symptom-symptom* krisis yang telah ada di sekeliling mereka. Oleh karena itu, generasi muda cenderung menganggap bahwa sekarang ini adalah krisis yang sudah cukup parah (Kutanegara, 1998b)

Persepsi tentang krisis juga berbeda pada mereka yang bekerja di sektor pertanian dan non-pertanian. Mereka yang bekerja di sektor pertanian, walaupun juga menganggap bahwa saat ini adalah zaman krisis, keluhan mereka tidak sehebat penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian (buruh bangunan, tukang becak, penjual bakso, dsb). Untuk sektor pertanian, walaupun harga alat dan obat-obatan di sektor pertanian meningkat, harga komoditi pertanian juga meningkat sehingga mereka belum begitu merasakannya sebagai krisis. Sebaliknya, bagi mereka yang bekerja di sektor nonpertanian, jatuhnya perekonomian sekarang ini justru berakibat sangat buruk bagi kehidupan mereka.

Sebagian dari buruh bangunan tidak memperoleh pekerjaan, walaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Mereka inilah merupakan kelompok yang paling parah terkena krisis saat ini. Mereka mengatakan bahwa saat sekarang ini adalah “zaman susah, zaman *angel*”. Dalam setiap kesempatan mereka selalu menggunakan kata krismon sebagai legitimasi perilaku atau kondisi mereka. Misalnya, ketika datang bertamu ke rumahnya dan tidak ada suguhan teh manis (seperti umumnya), mereka menyatakan “maaf Mas, sekarang lagi krismon, tidak ada suguhan”, kata mereka).

Walaupun kelompok tua menyatakan saat ini belum krisis, perlu ditegaskan bahwa standar yang mereka gunakan sangat rendah, yakni cukup makan sangat sederhana dan cenderung tidak memperhitungkan nilai gizi; “*Pokoke sing penting mangan, ora usah aeng-aeng*”, kata mereka. Sementara, kelompok muda menganggap bahwa banyak kesulitan ekonomi sekarang ini muncul. “Harga berbagai kebutuhan naik sedemikian pesat sehingga zaman susah datang lagi”, kata mereka. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah orang tua (Jawa) umumnya tidak mau terbuka mengemukakan pendapat atau pandangannya. Dengan pandangan hidup prihatin dan seadanya maka kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan makan pun tidak

menjadi persoalan besar bagi mereka. Selain itu, pengalaman hidup dan perbandingan dengan masa lalunya telah menciptakan pandangan bahwa zaman sekarang ini hidup jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu.

b. Dampak Krisis terhadap Masyarakat Perdesaan

Gejolak ekonomi (dalam tingkat makro) yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997–1998 berpengaruh besar dalam perekonomian desa. Kenaikan harga barang-barang konsumsi harian, terutama beras, sayur-sayuran, sabun, minyak goreng, rokok, gula, teh, dan sebagainya sangat dirasakan oleh mereka. Oleh karena itu, dalam konsumsi harian, mereka mencoba menurunkan kualitas konsumsi dengan tidak mengonsumsi daging dan ikan. Bahkan, tahu dan tempe yang mengalami kenaikan harga hampir 5 kali lipat, untuk sebagian orang sudah merupakan konsumsi mewah di desa ini. Minuman manis yang biasanya mereka konsumsi sebelum berangkat kerja sekarang terpaksa digantikan dengan air putih. Demikian juga konsumsi rokok (terutama bagi laki-laki), kini mereka mulai mengganti jenis rokok yang dikonsumsi dengan jenis yang lebih murah. Berbagai jenis rokok baru seperti Inter Biru, Jeruk, Pompa tampak beredar luas dalam komunitas ini.

Kemacetan proyek-proyek konstruksi di Yogya karena melambungnya harga bahan bangunan secara langsung juga mengurangi pendapatan rumah tangga penduduk Sriharjo. Kalau sebelum krisis mereka masih mampu mendapatkan sejumlah uang per minggu, kini hal tersebut tidak terjadi lagi. Para penglaju yang kehilangan pekerjaan tersebut kini kebanyakan hanya bekerja apa adanya di rumah untuk mengisi waktu menunggu dilanjutkannya lagi proyek-proyek bangunan. Akibatnya, jalan Sriharjo-Yogyakarta yang biasanya ramai dengan para penglaju kini menjadi agak sepi.

Dampak krisis kegiatan masyarakat Sriharjo sangat bervariasi. Permintaan terhadap krupuk yang meningkat pesat selama krisis merupakan pemacu berkembangnya usaha pembuatan krupuk di desa ini. Pembuatan gula kelapa dan kayu arang relatif stabil sehingga walaupun harganya meningkat, penghasilan mereka relatif tetap. Salah satu kegiatan yang dianggap sebagai penyelamat perekonomian rumah tangga adalah pembuatan tas dari benang (bordir) dan pembuatan pakaian tradisional. Kedua kegiatan ini pada masa krisis justru menjadi tumpuan harapan bagi rumah tangga yang suaminya kesulitan memperoleh pekerjaan. Dengan penghasilan berkisar Rp4.000,00 – Rp5.000,00 per hari, kegiatan ini

telah mampu menopang kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam masa krisis justru peran warung menjadi sangat sentral dan penting. Warung merupakan institusi penyelamat yang sangat penting nilainya bagi mereka yang mengalami kesusahan atau persoalan. Bagi penduduk pedesaan, warung seringkali menjadi penyambung 'nyawa' dalam kehidupan sekelompok dan seorang individu. Warung merupakan tempat yang paling enak dan mudah untuk berhutang barang kebutuhan harian. Warung juga menjadi tempat meminjam uang secara mendadak yang bersifat *sebrakan*. Meskipun demikian, selama krisis omzet penjualan warung ternyata malah menurun drastis. Penduduk pedesaan tampaknya berusaha meminimalkan pengeluaran mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka anggap tidak terlampau penting mereka tinggalkan, sedangkan kebutuhan utama juga diturunkan kualitasnya. Dengan cara itu mereka berusaha menurunkan pengeluaran ketika krisis berlangsung. *Wedang legi* yang terdiri dari teh, kopi, dan susu berangsur-angsur dihilangkan, digantikan dengan air putih. Sebagian di antara mereka menyatakan *wedang legi* hanya ada di tempat *ewuh* atau di tempat orang punya kerja. Saat ini, salah satu tujuan untuk datang ke tempat upacara adalah agar dapat minum teh atau kopi manis. Ada rasa rindu

bagi sebagian di antara mereka minum manis di tempat upacara.

Dalam masa krisis, sektor pertanian di desa ini mengalami tekanan dari dua hal, yakni tekanan akibat naiknya harga-harga *input* pertanian (pupuk dan obat-obatan); dan yang kedua tekanan dari musim yang tidak menentu (peralihan dari *el nina* ke *la nina*). Tekanan dari *input* pertanian tampak dari meningkatnya harga pupuk dan langka serta sulitnya memperoleh pupuk yang mereka perlukan. Pupuk urea meningkat harganya dari Rp250,00 menjadi Rp400,00 dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp600,00 per kilogram. Pupuk Kcl juga meningkat dari Rp750,00 menjadi Rp3.000,00 per kilogram. Obat-obatan lain seperti furadan dan pembasmi hama lainnya juga meningkat dua sampai lima kali lipat. Di sisi lain, mereka juga mengalami tekanan akibat *el nina*, yang berakibat pada terjadinya kemarau panjang. Posisi wilayah yang memang berada di hulu menjadikan air irigasi tidak pernah sampai ke wilayah pertanian di desa ini pada saat kemarau panjang (1997). Percekcokan memperebutkan air yang debitnya memang sangat kecil kerap terjadi sehingga menjadikan suasana sangat gerah di desa. Setiap malam, petani yang memperoleh jatah air menjaga saluran air yang ada. Sebaliknya pada musim hujan, air yang datang juga sangat melimpah sehingga menggenangi tanaman

mereka. Kegagalan demi kegagalan di sektor pertanian beriringan di desa ini. Pada musim kemarau, mereka gagal menanam padi dan pada musim hujan, mereka gagal memanen kedelai.

Tekanan yang datang bertubi-tubi semacam itu menjadikan sektor pertanian tidak memberikan sumbangan maksimal pada masa krisis. Walaupun sebagian di antara mereka panen (baik padi maupun palawija), hasilnya tidak maksimal. Untungnya pada saat krisis, harga komoditi pertanian mengalami peningkatan yang sedemikian besar sehingga mampu memberikan sedikit tambahan pendapatan bagi mereka. Beras yang semula berharga Rp800,00 meningkat menjadi Rp2.500,00 per kilogram. Demikian juga ketela pohon (gaplek) mengalami peningkatan dari Rp200,00 menjadi Rp800,00. Jagung dan tembakau juga mengalami peningkatan cukup tinggi. Meskipun demikian, karena pemilikan lahan yang sedemikian terbatas, hasil panen yang berupa padi cenderung mereka simpan sebagai cadangan konsumsi rumah tangga, sedangkan hasil panen palawija mereka jual. Selain itu, hasil-hasil dari tanaman pekarangan juga meningkat harganya. Pisang raja yang semula harganya Rp7.000,00 naik menjadi Rp20.000,00 per tandan, pisang kepok yang semula Rp3.000,00 naik menjadi Rp15.000,00 per tandan. Demikian juga halnya buah kelapa naik dari

Rp300,00 menjadi Rp1.500,00 atau Rp2.000,00 per butir.

Pada masa krisis peningkatan harga berbagai komoditi pertanian ternyata tidak sebanding dengan peningkatan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Harga produksi pertanian memang meningkat, namun peningkatan harga tersebut ternyata kalah jauh dibandingkan dengan peningkatan harga pupuk dan obat-obatan. Selain itu, harga berbagai kebutuhan rumah tangga meningkat pesat, bahkan tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan mereka. Dalam situasi semacam ini, tidak ada penduduk yang diuntungkan. Bagi mereka yang bergerak hanya di sektor pertanian, pemilikan lahan yang sempit merupakan salah satu kendala; sementara bagi mereka yang bekerja di luar sektor pertanian, hilangnya pekerjaan dan rendahnya tingkat upah telah mengakibatkan perekonomian rumah tangga menjadi terpuruk.

Krisis Ekonomi dan Kemiskinan di Perdesaan

Berbagai tekanan yang muncul selama krisis telah mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan. Turunnya tingkat kesejahteraan itu dengan mudah dapat diamati dalam rumah tangga perdesaan. Kesulitan ekonomi semakin terasa dan keluhan tentang sulitnya pemenuhan berbagai kebutuhan rumah tangga

merupakan pembicaraan rutin ibu-ibu rumah tangga setiap hari. "*Kabeh saiki cupet*", kata mereka. Gejala lain juga dapat diamati dari meningkatnya utang-piutang di desa. Warung sebagai tempat berhutang yang paling dekat dan mudah menjadi tumpuan bagi masyarakat perdesaan.

Dilihat dari pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dengan jelas tampak bahwa pengeluaran menjadi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Dalam tulisan ini sebagai ilustrasi tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan, digunakan data yang dikumpulkan pada tahun 1998 (data terbaru sedang diolah). Batas kemiskinan yang digunakan adalah perhitungan Sajogyo yang menggunakan konsep tingkat pengeluaran ekuivalen beras. Pada awalnya, garis kemiskinan ini adalah 240 kg beras per orang per tahun untuk pedesaan. Perkembangan selanjutnya adalah ketentuan garis kemiskinan berubah menjadi lebih rinci. Pengeluaran rumah tangga per bulan dipakai sebagai proksi terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan diperoleh dengan membagi pengeluaran rumah tangga dengan harga beras yang berlaku saat penelitian. Ukuran garis kemiskinan dengan ekuivalen beras memang telah disadari memiliki banyak kelemahan, namun dalam situasi yang sangat tidak stabil seperti saat ini,

ukuran ini dianggap masih cukup memadai. Selain itu, kenyataan di lapangan memang menunjukkan bahwa masyarakat setempat selalu menggunakan patokan beras sebagai ukuran dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan, juga dalam mengukur tingkat pendapatan dan kesejahteraan mereka.* Pada saat penelitian harga beras berkisar antara Rp1.500,00 – Rp2.000,00 per kilogram.

Dengan menggunakan tiga periode pengumpulan data (1972, 1989, dan 1998) tampak bahwa sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan dari 84 persen pada tahun 1972 menjadi 31 persen pada tahun 1989 dan kemudian naik menjadi 33 persen pada tahun 1998. Sementara itu, sumbangan sektor nonpertanian

meningkat dari 16 persen pada tahun 1972 menjadi 69 persen pada tahun 1989 dan turun sedikit menjadi 67 persen pada tahun 1998. Ini menunjukkan bahwa sektor nonpertanian semakin dominan perannya di desa tersebut. Sementara itu, dilihat dari pendapatan rumah tangga, krisis mengakibatkan turunnya pendapatan dari 296 kg beras pada tahun 1972 menjadi 406 kg beras pada tahun 1989 dan kembali turun menjadi 286 kg beras pada tahun 1998. Turunnya pendapatan pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk sangat miskin dari 44,3 persen pada tahun 1972 menjadi 28,3 persen pada tahun 1989 dan selama krisis meningkat menjadi 50,6 persen. Jumlah penduduk miskin semakin berkurang dari 69,5

* Walaupun penggunaan beras (*equivalent* beras) sebagai patokan dalam penentuan garis kemiskinan banyak diperdebatkan karena mengandung beberapa kelemahan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat justru menggunakan ukuran ini untuk menilai pendapatan dan pemberian sumbangan pada orang lain. Ketika krisis berlangsung, masyarakat (terutama pekerja nonpertanian) mengalkulasi pendapatannya dengan fluktuasi harga beras. Sebagai contoh, seorang buruh bangunan yang mempunyai pendapatan Rp 8.000,00 per hari, sebelum krisis nilainya sama dengan 10 kg beras. Ketika krisis dengan tingkat pendapatan yang sama (upah buruh selama krisis tidak mengalami kenaikan) nilainya hanya 3 kg beras. Ini berarti bahwa pendapatan mereka turun sepertiganya. Dalam aktivitas sumbang-menyumbang, masyarakat juga selalu menilai besarnya sumbangan dengan harga beras yang berlaku. Sebelum krisis, umumnya masyarakat menyumbang 10 kg beras (atau setara dengan itu) yang harganya sekitar Rp 5.000,00 – Rp 7.000,00. Selama krisis dengan harga beras Rp 2.500,00 – Rp 3.000,00 mereka mengalami kesulitan kalau tetap menyumbang setara 10 kg beras. Sebagai gantinya mereka menyumbang sekitar Rp 10.000,00 – Rp. 15.000,00. Jumlah itu, menurut mereka hanya setara sekitar 3-5 kg beras, yang kalau dibandingkan dengan masa sebelum krisis, besarnya sumbangan justru menurun drastis. Berdasarkan hal itu, sangat jelas bahwa ukuran ekuivalen beras tidak semata-mata ukuran etik, tetapi juga ukuran emik.

persen pada tahun 1972 menjadi 41,5 persen pada tahun 1989 dan menurun lagi menjadi 16,9 persen pada tahun 1998. Data ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok penduduk miskin dan hampir miskin merupakan kelompok yang selalu mengalami dampak yang parah kalau terjadi ketidakstabilan ekonomi. Mereka sangat rentan terhadap perubahan di luar kehidupannya. Jika dicermati lebih jauh, jumlah penduduk sangat miskin selama krisis justru lebih tinggi dibandingkan dengan pada awal Orde Baru.

Apabila angka tersebut dirinci lebih jauh, tampak bahwa pendu-

duk sangat miskin saat ini jumlahnya sangat tinggi yakni 78,1 persen, sementara yang hampir miskin dan tidak miskin hanya 12 persen. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya harga berbagai kebutuhan rumah tangga (terutama beras) belakangan ini telah menambah kemiskinan dalam jumlah yang sangat besar di perdesaan. Fakta ini sesuai dengan tingkat kesulitan yang paling dirasakan oleh penduduk Sriharjo saat ini adalah memperoleh pendapatan (26,4 persen), memenuhi kebutuhan harian (39,1 persen), dan memenuhi pelayanan kesehatan (12,7 persen), sedangkan sisanya

Tabel 1
Pendapatan Rumah Tangga Setara Beras di Dusun Miri (Sriharjo)

Sumber Pendapatan	1972	1989	1998
Sawah	578	254	-
Pekarangan	749	224	-
Ternak Ayam	62	101	-
Total Pertanian	1389 (84 %)	679 (31 %)	312 (33 %)
Bukan/luar pertanian	266 (16 %)	1508 (69 %)	622 (67 %)
Total Pendapatan	1655	2187	1061
Pendapatan per kapita	296	406	286
Persentase sangat miskin setara 240 kg beras/tahun	44,3	28,3	50,6
Persentase miskin setara 320 kg beras/tahun	69,5	41,5	16,9

Sumber : Data Primer , 1998

menganggap bahwa kesulitan hidup sekarang adalah memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan, biaya sosial, dan rumah.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Orde Baru telah mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup penduduk pedesaan. Hal itu tampak dari jenis-jenis rumah yang ada di pedesaan, yang sebagian di antaranya berupa bangunan permanen (tembok bata, lantai semen, bahkan keramik), dan kepemilikan alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, serta alat komunikasi lainnya. Namun, harus diingat bahwa barang-barang semacam itu merupakan 'barang akumulasi' yang dimiliki setelah melakukan proses *saving* yang panjang. Ketika krisis terjadi dampak yang sangat kelihatan adalah hilang dan turunnya tingkat

pendapatan, bukan pada kebutuhan sekunder. Namun, diduga kalau krisis berlangsung terus, kemampuan mereka untuk menjaga berbagai warisan (rumah dan fasilitas lainnya) juga akan menurun drastis sehingga dalam jangka waktu lama barulah kita akan menemui suasana desa yang kelihatan muram seperti pada awal Orde Baru.

Analisis lain yang bisa dikembangkan berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin adalah gaya hidup penduduk miskin yang cenderung irit (mereka mengenal konsep *irit*, *gemi*, dan *ngati-ati*) dalam mengelola pendapatan. Mereka mencoba membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok (terutama makan), sisanya ditabung dalam berbagai bentuk (rumah, kendaraan, dan ternak). Walaupun peningkatan pendapatan selama

Tabel 2
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Desa Sriharjo menurut Batasan Sajogyo

Tingkat Kemiskinan	Batas Miskin (pengel.kg/kapita/bln)	Jumlah	Persentase
Sangat Miskin	< 20 kg	278	78,1
Miskin	20-26 kg	36	10,1
Hampir Miskin	26-40 kg	33	9,3
Tidak Miskin	> 40 kg	9	2,5
Jumlah		356	100

Sumber: Data Primer, 1998

Orde Baru tidak begitu tinggi, dengan gaya hidup yang sederhana, mereka dapat menggunakannya untuk berbagai hal. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat pesat selama krisis, maka sebagian besar pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (terutama makan). Dalam zaman normal, tingkat pendapatan yang sebenarnya kecil mampu disisihkan sebagian dalam bentuk tabungan seperti ternak, rumah, alat transportasi; namun dalam masa krisis, tingkat pendapatan, yang juga kecil, terpaksa mereka habiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian.

Respon Rumah Tangga terhadap Krisis

Bagi rumah tangga pedesaan, yang sangat dirasakan pada saat krisis adalah melambungannya harga-harga kebutuhan pokok. Pada saat yang sama mereka juga merasakan turunnya daya beli mereka. Walaupun dampak tersebut merata pada semua kelompok, dampak yang sangat hebat terasa pada kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki atau tidak mengusahakan lahan pertanian. Umumnya mereka adalah pekerja (buruh) bangunan, yang mengandalkan pendapatannya semata-mata dari penghasilan nonpertanian. Buruh tani dan buruh bangunan yang semula memperoleh pendapatan setara 7–10 kilogram beras, pada saat krisis

menurun menjadi setara 2–3 kilogram beras. Walaupun tingkat pendapatan mereka tetap, harga barang kebutuhan pokok (terutama beras) mengalami peningkatan sangat pesat sehingga sebagian besar dari penghasilannya habis untuk membeli barang kebutuhan pokok. Selain penurunan nilai pendapatan, ancaman kehilangan pekerjaan juga sangat besar. Di antara mereka menghadapi kehidupan ini tanpa kepastian, kadangkala berangkat kerja dan kala yang lain mereka menganggur karena pekerjaan tidak ada. Kondisi ini jelas berpengaruh langsung terhadap tingkat dan kontinuitas pendapatannya.

Dalam kondisi semacam itu maka setiap rumah tangga berusaha menciptakan berbagai strategi agar tetap *survive*. Berbagai respons dikembangkan oleh setiap rumah tangga pedesaan. Salah satu di antaranya adalah dengan minimalisasi pengeluaran rumah tangga. Mereka melakukan penghematan pengeluaran terhadap hampir semua kebutuhan mereka. Mereka hanya mengonsentrasikan pada kebutuhan konsumsi sebagai kebutuhan utama. Salah seorang di antara mereka menyatakan *sing penting iso mangan, mangan ya sak anane, ora usah neka-neka apa maneh enak-enakan* (yang penting bisa makan, makan ya seadanya, tidak usah macam-macam, apalagi makan yang enak-enak). Sebagian rumah tangga miskin mulai

mengonsumsi makanan yang terbuat dari ketela (gapek/tiwul) dan jagung. Harga beras yang naiknya luar biasa mereka coba siasati dengan mencari alternatif lain. Secara perlahan-lahan mereka mencoba memperkenalkan jenis makanan *nenek moyang* (istilah mereka) kepada generasi muda. Anak-anak muda cenderung tidak mau makan apabila disuguh dengan makanan tersebut. Untuk itu, mereka mencoba mengonsumsi tiwul secara bergantian. Kadangkala pagi hari mereka makan tiwul dan jagung, kemudian pada siang hari dan malam hari makan nasi. Pola lain adalah dengan mencampur nasi dan tiwul pada saat yang sama. Pada siang hari mereka makan tiwul bercampur dengan nasi. Pengeluaran terhadap lauk-pauk juga ditekan serendah-rendahnya. Mereka berusaha mengurangi pengeluaran untuk lauk-pauk yang harus mereka beli. Bagi kelompok miskin, tempe dan tahu sudah merupakan barang mewah. Mereka lebih banyak makan dengan sayur pedas dan sayur bening.

Pengurangan pengeluaran untuk konsumsi diikuti pula dengan penghilangan pengeluaran yang lain. Kopi dan teh (minuman manis) mulai hilang dari rumah tangga pedesaan. Demikian juga halnya dengan kebiasaan mengonsumsi makanan kecil di sela-sela jam makan mulai hilang. Walaupun masih, jenis barang yang dikonsumsi

si beralih ke barang-barang konsumsi produk lokal seperti ketela rebus, kacang rebus, dan berbagai jenis makanan kecil olahan dari ketela pohon.

Salah satu aktivitas dan pengeluaran yang tidak bisa mereka tekan adalah pengeluaran untuk "umum". Konsep umum di sini mengacu pada pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, terutama kegiatan sumbang-menyumbang bila ada yang punya hajatan seperti kematian, pernikahan, dan supitan. Mereka memiliki patokan besarnya sumbangan sebanding dengan harga 10 kg beras. Sebelum krisis, sumbangan berkisar antara Rp5.000,00 sampai Rp8.000,00. Namun, setelah krisis, itu berarti berkisar antara Rp20.000,00 sampai Rp25.000,00. Oleh karena itu, mereka menurunkan sumbangan menjadi Rp15.000,00 sampai Rp20.000,00. "Terpaksa *merem* dulu", kata mereka, yang berarti dengan sedikit rasa malu memberikan sumbangan sebesar itu.

Dalam masa krisis justru upaya untuk memperoleh pendapatan semakin meningkat di pedesaan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari berbagai peluang yang ada, baik di desa maupun di kota. Buruh-buruh bangunan yang tidak memperoleh pekerjaan di kota berusaha mendapatkan pekerjaan di pedesaan. "*Pokoke sing penting mubeng*",

kata mereka. Solidaritas di antara tetangga dan keluarga luas tetap terjalin, namun hubungan semacam itu tetap dilandasi oleh perhitungan untung rugi. Dalam masa krisis tampaknya tidak ada respons kelompok untuk mengatasi krisis. Respons lebih banyak muncul secara individual.

Respons Birokrasi terhadap Krisis

Pada masa krisis, hampir semua departemen berusaha menciptakan dan menggulirkan berbagai program penanggulangan krisis, yang tergabung dalam program jaring pengaman sosial (JPS). Departemen Sosial menggulirkan program bantuan sosial berupa sembako, anak asuh, beasiswa, dan santunan lansia. Departemen Kesehatan menyelenggarakan program Jaringan Perlindungan Kesehatan dengan sistem Kartu Sehat, yang bertujuan untuk memberikan pengobatan gratis bagi rumah tangga miskin, ibu hamil, dan anak balita miskin. Departemen Tenaga Kerja mengembangkan program padat karya. Demikian juga beberapa departemen lain berusaha mengembangkan program penanggulangan dampak krisis melalui berbagai cara.

Namun sayangnya, berbagai bantuan yang mengalir ke desa tampaknya tidak memancing respons dari perangkat kelurahan.

Petugas kelurahan hanya berperan sebagai penyalur bantuan dan tidak ada inisiatif untuk mengembangkan berbagai program. Di sini tampak bahwa institusi birokrasi tingkat desa yang selama Orde Baru hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat masih terjadi. Inisiatif tentang penanggulangan krisis tampaknya tidak muncul pada kelompok ini. Demikian juga pada tingkat komunal, berbagai bantuan yang datang ke desa lebih banyak disikapi sebagai santunan (*charity*) dan bukan sebagai wahana pengembangan ekonomi produktif yang sebenarnya merupakan inti dari program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Masyarakat yang terkena krisis dengan susah payah mengembangkan berbagai strategi dan jaringan sosial ekonomi untuk menanggulangi krisis yang mereka hadapi. Sementara, berbagai bantuan yang datang lebih banyak menyentuh tingkat permukaan masyarakat.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia ternyata juga melanda masyarakat perdesaan. Hanya memang, tingkat keparahannya sangat bervariasi antar golongan dan kelas sosial. Untuk kelas sosial ekonomi atas, krisis hanya mengurangi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder. Namun, bagi masyarakat

lapisan bawah, krisis ternyata telah menyentuh kebutuhan primer mereka. Makanan mereka sebelum krisis yang memang sudah sederhana, selama krisis menjadi lebih sederhana lagi. Pengurangan secara kuantitas dan kualitas mereka lakukan terhadap konsumsi harian mereka. "Yang penting makan dan *wareg*", selalu mereka ucapkan dalam setiap kesempatan. Oleh karena itu, tidaklah beralasan kalau Jellinek mengatakan bahwa krisis tidak melanda masyarakat perdesaan. Tingkat kesejahteraan masyarakat selama krisis menurun drastis. Hilang dan turunnya pendapatan mereka tidak sebanding dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok (pengeluaran) mereka.

Dalam masa krisis, ternyata respons kelompok dan birokrasi tidak tampak muncul di perdesaan. Respons yang berkembang lebih banyak merupakan respons individual dan rumah tangga. Berbagai kesulitan individu dan rumah tangga harus diselesaikan sendiri. Kreativitas dan aktivitas individual untuk menanggulangi krisis justru semakin meningkat. Respons kelompok hanya muncul pada saat kondisi sudah sedemikian parah dan bila telah terjadi

bencana. Demikian juga, birokrasi lokal tampak tidak memberikan perhatian serius dalam menyikapi dampak krisis yang berkembang di perdesaan. Mereka sudah terlampaui sibuk dengan berbagai kegiatan rutin administrasi desa dan sebagai pelayan aparat birokrasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini tampak bahwa birokrasi desa lebih berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan belum sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat desa.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan pada tiga penelitian lapangan yaitu penelitian Social Security, penelitian Dampak Krisis di Perdesaan dan penelitian untuk disertasi penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada sebagai pengelola dua penelitian tersebut di atas. Di samping itu, juga terima kasih kepada Prof. Dr. Ida Bagoes Mantra, Dra. Sukamtiningsih, Sri Purwatiningsih, S.Si., Gutomo Bayu Aji, S.Sos, dan Agus Indiyanto, S.Sos. sebagai anggota tim penelitian.

Referensi

- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan desa mulai dari belakang*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Dewanta, Awan Setya, et al. 1995. *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kutanegara, Pande Made. 1998a. "Dampak krisis bagi rumah tangga pedesaan: studi kasus desa Sriharjo, Yogyakarta". Bandung: AKATIGA Bandung-CASA Amsterdam. Paper dipresentasikan pada *Seminar Dampak Krisis Bagi Kaum Buruh*.
- . 1998b. "Kemiskinan, bantuan dan konflik sosial: studi kasus desa Sriharjo, Yogyakarta". Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. *Bahan Diskusi Mingguan Social Security and Social Policy Project*.
- . 1999. "Economic crisis and the dynamic of poverty: life changes in Sriharjo, Central Java". Nijmegen, The Netherland: KUN Nijmegen, Casa Amsterdam dan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Paper dipresentasikan dalam *Seminar Crisis and Social Security in Indonesia*.
- Mubyarto. 1998. "Menuju keamanan pangan: krisis ekonomi bukan krisis pertanian". Yogyakarta: Universitas Janabadra. *Makalah Seminar Nasional Ketahanan Pangan*.
- Penny, DH. dan Masri Singarimbun. 1973. *Population and poverty in rural Java: some economic arithmetic from Sriharjo*. Ithaca: Cornell University Press.
- Singarimbun, Masri. 1996. "Peluang kerja dan kemiskinan di Miri, Sriharjo", dalam *Penduduk dan perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RESISTENSI DAN FLEKSIBILITAS PENDUDUK PERDESAAN LAHAN KERING

*Tukiran dan Agus Sutanto**

Abstract

The various forms of crises that have occurred at national and regional scale have not yet been fully felt in the dry areas, particularly in Gunung Kidul, Yogyakarta Special Province. Interesting, these rural dry areas have been very resistant and flexible in facing the impact of the economic crisis. The major factor that has made this possible is self-reliance, which was triggered by the low degree of dependence on other places for various necessities. Most of the places provide them for themselves. As far as providing basic necessities are concerned, the rural community has not yet shown symptoms of anxiety. Some saving has actually been carried out, but there is not yet any sufficient evidence of drastic decline in quality and quantity. From the beginning of the economic recession until today, saving for general (public) benefit, especially in social issues – (communalism), which is usually difficult to establish, could be easily accepted with no resistance from the community. The prospect of the rural economic sector of the dry lands can be divided into two broad categories, that is the survivor sector, and the inferior sector. The survivor sector comprises of economic activities that will continue to persist even if there is no growth, like agriculture and animal husbandry. The inferior sector on the other hand, include those activities, which are not very effective in addressing the economic crisis, and even potentially risk vanishing, like industry, trade and service sectors. The biggest impact is however, more felt in the non-economic sector, particularly those to do with services like health and family planning.

Latar Belakang

Sampai dengan parok akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang me-
ngesankan. Tidak banyak negara yang mempunyai kinerja pertumbuhan ekonomi positif dan bahkan

* Drs. Tukiran, M.A. dan Drs. Agus Sutanto, M.Sc. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

mencapai rata-rata 7 persen per tahun, serta mempertahankan pertumbuhan tersebut dalam waktu yang cukup lama seperti Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia disebut-sebut sebagai kandidat NIC (*Newly Industrialized Country*) dari kawasan Asia. Di dalam negeri, pemerintah bahkan telah menegaskan bahwa dalam Repelita VI, sebagai babakan baru Pembangunan Jangka Panjang II, Indonesia akan memasuki tahap proses menuju lepas landas.

Akan tetapi, optimisme dan harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Mengakhiri Repelita VI sejak Juli 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, yang melanda hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan berbagai aspek kehidupan bangsa. Krisis yang sama juga dialami oleh sejumlah negara lain di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, pengalaman Indonesia dipandang yang terburuk dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (Cole dan Slade, 1998: 1)

Terdapat keberagaman pendapat tentang sebab-sebab krisis moneter tersebut. Bagi sejumlah pengamat, fundamental ekonomi dan fundamental politik yang kurang sehat merupakan faktor penyebab utama (Soesastro dan Basri, 1998). Salah satu sebab internal tersebut adalah besarnya

hutang luar negeri sektor swasta yang sudah jatuh tempo, supervisi perbankan yang lemah, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terlalu tinggi. Selain itu, sebab-sebab eksternal yang mendapat sorotan adalah pasar modal yang labil dan kebijakan IMF yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia (Dieter, 1998). Karenanya, sebagian pengamat memandang bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini berlangsung di atas fundamen yang tidak sehat.

Krisis yang melanda Indonesia akhir-akhir ini dipandang sebagai representasi kelemahan basis ekonomi nasional, dan karenanya menjadi pendesak terhadap pemikiran untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap strategi pembangunan ekonomi nasional. Bias pembangunan nasional yang berorientasi pertumbuhan ekonomi menjadi stimulan semakin melebarinya kesenjangan struktur perekonomian Indonesia. Dalam jumlah relatif kecil, usaha kapitalis modern skala usaha besar dan hemat tenaga, khususnya substitusi import, dikembangkan untuk mendukung strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebut. Berbagai kemudahan prosedural dan birokrasi, pemberian fasilitas dan akses perbankan, subsidi dan proteksi, dan banyak hal lagi telah diberikan atas nama pembangunan.

Sementara komitmen dan intervensi pengembangan segmen terbesar ekonomi nasional berskala kecil berlangsung tidak sepenuh hati.

Krisis yang berlangsung mempertegas kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam pembangunan ekonomi berorientasi modernisasi industri padat modal tersebut, antara lain, adalah efisiensi dan daya saing yang rendah, ketergantungan akan bahan dan teknologi import yang tinggi, sifatnya yang *capital intensive* disertai penciptaan peluang kerja yang marginal, dan memperkuat dikotomi antara Jawa dan luar Jawa (Ramli, 1986).

Krisis yang berlangsung kemudian menjadi stimulan untuk mengembangkan secara transformatif ekonomi kerakyatan dan penguatan sektor pertanian yang lebih terdiversifikasi dan berorientasi komersial sehingga menjadi sektor andal dan fundamental untuk pembangunan negara. Sektor ini dipandang sebagai jalan alternatif yang dipandang esensial untuk pembangunan. Sektor pertanian dan usaha ekonomi kecil mempunyai kinerja yang dipandang lebih resistan dan fleksibel dalam menghadapi krisis, seperti ditunjukkan oleh kemandiriannya yang tinggi, ketergantungan import yang rendah, dan keunggulan komparatif yang tinggi karena berdasarkan pada sumber daya

setempat, serta pemanfaat tenaga kerja dan keahlian setempat yang tinggi.

Mendasarkan pada pembahasan tersebut, kegiatan penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan. Selain itu, penelitian semacam ini dilatarbelakangi kepedulian atas bentuk dan respons terhadap krisis yang berlangsung, perlunya memberikan kejelasan variasi dampak krisis pada berbagai sektor kehidupan, serta kesadaran akan sebab-sebab mendasar dan perlunya alternatif solusi yang dapat diterima, baik yang telah maupun yang akan dilakukan, khususnya bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pertanian lahan kering.

Daerah dan Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti halnya kenampakan fisiografis Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya, Semanu berada pada kawasan karst Gunung Sewu yang kurang subur dengan topografi relatif kasar. Selain itu, ketersediaan dan ketercukupan air menjadi masalah utama bagi daerah pegunungan *calciferous* semacam ini. Sekalipun demikian, mengingat Semanu berada pada zona tengah Kabupaten Gunung Kidul, topografinya relatif datar (*plateau*), dan karena-

nya pertanian tanaman pangan relatif tumbuh lebih baik. Seperti umumnya daerah *upland*, pertanian di Semanu mendasarkan pada lahan tadah hujan (sawah *rendengan*) yang luasnya 11,8 ha dan tegal/kebun seluas 7.488,8 ha.

Kecamatan Semanu berdampingan dengan Kecamatan Wonosari, tempat kedudukan ibukota Kabupaten Gunung Kidul, berjarak sekitar 7 kilometer. Infrastruktur di Semanu berupa jalan yang kondisinya relatif baik. Wilayahnya dilintasi jalan utama kabupaten. Ibukota pusat pemerintahan Kecamatan Semanu terletak di Desa Semanu. Wilayah administratif Semanu dibagi dalam 5 desa. Empat desa lainnya masing-masing adalah Desa Pacarejo, Ngeposari, Candirejo, dan Dadapayu. Selain letaknya yang relatif terpencil, Desa Dadapayu merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Semanu yang termasuk desa tertinggal.

Secara umum kondisi ekonomi di Semanu relatif kurang. Keadaan tersebut direpresentasikan oleh kondisi fisik rumah penduduk yang sebagian besar dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, atau papan yang mencapai 81,2 persen dari 10.993 unit rumah. Selain itu, hasil rekapitulasi pendataan keluarga miskin menunjukkan bahwa 52 persen KK atau 45,48 persen jiwa termasuk dalam kategori miskin (Tabel 1). Terdapat kesesuaian antara penduduk miskin dan klasifikasi desa. Pada Tabel 1 tampak bahwa proporsi tertinggi kepala keluarga atau penduduk miskin terdapat di Desa Dadapayu yang termasuk desa tertinggal.

Penduduk Kecamatan Semanu berjumlah 55.758 orang yang terdiri atas 27.170 jiwa penduduk laki-laki dan 28.588 jiwa perempuan. Jumlah tersebut terhimpun dalam 12.872 kepala keluarga atau berarti

Tabel 1
Distribusi Penduduk Miskin menurut Desa di Kecamatan Semanu Tahun 1998

Desa	Jumlah		Persentase kemiskinan	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Ngeposari	2047	9519	54,32	45,37
Semanu	3266	14678	34,99	29,71
Pacarejo	3815	16216	60,44	51,41
Candirejo	1761	7571	45,82	39,37
Dadapayu	1783	7874	74,20	68,66
Total	12.872	55.758	52,80	45,48

terdapat sekitar 5 jiwa per KK. Karena kondisi sumber daya wilayahnya dan keterbatasan peluang kerja lokal, migrasi dan sirkulasi keluar dari Semanu cukup besar. Indikasi ini tampak dari kelangkaan persediaan tenaga kerja pada musim puncak kegiatan pertanian (*peak season*) serta rata-rata umur petani yang di atas 40 tahun. Indikasi lainnya tampak dari besarnya jumlah pemudik yang tercatat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kota-kota besar yang mencapai 1459 jiwa.

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan pokok sebagian besar penduduk yang ada di daerah ini. Tanaman utama di Kecamatan Semanu adalah tanaman pangan dan palawija yaitu jagung, kedelai, padi, dan ketela pohon. Empat jenis tanaman ini adalah tanaman tradisional yang sudah lama dipraktekkan dari generasi ke generasi. Inovasi dan diversifikasi tanaman belum tampak dilakukan, hanya terbatas dalam perubahan varietas dari ke empat jenis tanaman tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh orientasi produksi yang bersifat subsistensi sehingga meskipun ada peluang pasar, diversifikasi ke arah tanaman komersial dipandang banyak mengandung risiko. Tanaman yang juga cukup penting adalah tanaman pakan ternak seperti rumput kolon-

jono (*elephant grass*) dan turi. Selain itu, tanaman tahunan (*perennial crops*) juga umum ditanam di lahan tegal dan pekarangan sebagai sumber energi bahan bakar, bahan bangunan rumah, atau sumber tambahan pendapatan.

Mengingat sifat kegiatan pertanian yang musiman dan curahan kerja yang fluktuatif, mempunyai pekerjaan sambilan nonpertanian, baik di daerah setempat maupun di luar daerah, merupakan hal yang umum dilakukan. Mempunyai pekerjaan pokok di daerah asal atau di daerah tujuan, atau sebaliknya, mempunyai pekerjaan sampingan di daerah asal atau daerah tujuan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan sebagai upaya rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang cukup berkembang di Semanu adalah kerajinan bambu (terutama sangkar burung) dan anyaman bambu, serta pengolahan tahu-tempe. Memelihara ternak kambing dan sapi juga merupakan kegiatan sampingan usaha tani di Semanu yang penting bagi ekonomi rumah tangga tani.

Kecamatan Semanu dipilih sebagai daerah sampel penelitian dengan sengaja (*purposive*). Pertimbangan yang utama adalah bahwa Semanu pernah menjadi daerah penelitian pada tahun 1994 untuk topik pekerjaan *off-farm*.

Penelitian ini tidak bersifat *re-visited*, keterkaitan dengan penelitian pertama adalah dalam pemahaman latar belakang daerah dan perkembangan yang berlangsung sehingga bisa membantu dalam mengembangkan analisis yang dilakukan.

Data yang dikumpulkan terutama adalah data primer. Data sekunder yang dikumpulkan terutama lebih difokuskan pada program-program untuk mengatasi krisis, kondisi wilayah, dan perubahan yang terjadi selama krisis. Data dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan secara berjenjang dari tingkat meso kabupaten (regional) ke tingkat mikro (individual) agar secara metodologis dapat dipadukan berbagai sumber dan beragam

persepsi terhadap dampak dan respons terhadap krisis. Nara sumber yang digali informasinya meliputi institusi pemerintah, nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan (Tabel 2). Informasi dihimpun terutama melalui diskusi kelompok secara terfokus (*focus group discussion*) dan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pokok-pokok pertanyaan (*check-list*) sebagai berikut.

Bentuk-Bentuk Krisis

Dampak krisis mempunyai bentuk yang bervariasi untuk berbagai sektor ekonomi, berbagai skala dan jenis kegiatan ekonomi, dan berbagai lapisan masyarakat. Secara umum penduduk perdesaan

Tabel 2
Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Tingkat penelitian	Nara sumber dan responden	Cara pengumpulan data dan informasi
Meso Kabupaten	Bappeda, Kandeptaker, Dinas/ Kandeperindag, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, BKKBN	FGD dan wawancara semi terstruktur
Submeso Kecamatan	Bag. Pemerintahan, Petugas Teknis Sektoral; Petugas Lapangan Penyuluhan, Petugas Sosial Kecamatan, Petugas Keluarga Berencana, Pembangunan Masyarakat Desa	Wawancara semi terstruktur
Mikro Desa	Pemerintah Desa, Kader-kader desa, antara lain, kader gizi dan kesehatan, kader pembangunan, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus kelompok tani, KUD, karang taruna.	Wawancara semi terstruktur
Mikro Individu	Petani, buruh tani, peternak, pedagang, pengrajin, tenaga kerja ter-PHK, keluarga prasejahtera	Wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam

menderita karena penurunan nilai tukar (*terms of trade*), namun diuntungkan oleh komoditi tanaman perdagangan yang meningkat harganya (Evans, 1998: 32). Secara sektoral, hampir semua sektor ekonomi mengalami kemunduran yang cukup berarti, kecuali pertanian dan utilitas. Sektor-sektor yang mengalami kemunduran besar, antara lain, jasa konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran (Colin, 1998). Dari segi skala usaha, krisis moneter lebih dirasakan oleh usaha skala besar/modern yang mempunyai kandungan import cukup tinggi. Pada gilirannya konsumen juga terkena imbas krisis karena meningkatnya harga komoditi akibat perbedaan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, kehidupan yang berbasis ekonomi uang dan konsumeristis akan merasakan dampak tersebut. Sementara itu, usaha skala kecil relatif tidak merasakan dampak seberat usaha skala besar. Begitu pula masyarakat pedesaan yang kurang bergantung pada pola hidup konsumtif dan ekonomi uang kurang terkena dampak krisis tersebut. Bahkan, usaha-usaha skala kecil yang kandungan lokalnya tinggi dinyatakan memperoleh keuntungan yang cukup berarti dari krisis tersebut, khususnya yang telah menjangkau pasar luar negeri.

Sejak Juli 1997 negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, mulai dilanda krisis moneter.

Dampak dari krisis moneter tersebut menyebabkan krisis ekonomi yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi nasional menjadi minus 10 persen. Kegiatan di sektor pertanian, manufaktur, dan jasa diperkirakan akan terpengaruh oleh krisis ekonomi tersebut. Di bidang kependudukan, terutama aspek ketenagakerjaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan diperkirakan akan terjadi hal yang sama. Pertumbuhan kesempatan kerja cenderung menyusut, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dalam segala bentuknya. Kemudian, pemanfaatan pelayanan kesehatan dan alat kontrasepsi modern semakin sulit untuk dijangkau karena biayanya menjadi mahal. Di bidang pendidikan, dalam kondisi resesi seperti ini diperkirakan angka putus sekolah akan meningkat (Manning, 1998; UNDP, 1998). Dalam keadaan seperti ini, peran pemerintah sangat penting, terutama upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui berbagai program aksi yang bersifat reguler maupun khusus (Wirakartakusumah dan Yani, 1998). Berikut ini disajikan pembahasan tentang bentuk dan respons penduduk pedesaan di daerah lahan kering terhadap krisis

ekonomi kasus di Dati II Gunung Kidul.

a. Pertanian

Pertanian erat berkaitan dengan keamanan bahan pangan yang meliputi tiga isu utama, yaitu pasokan, baik dari produksi lokal maupun kemampuan mengimport, distribusi, dan daya beli sebagai fungsi tingkat harga dan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pada tingkat nasional, pasokan relatif mencukupi kecuali pada sejumlah wilayah terpencil, tetapi distribusi pangan dan daya beli memburuk (Johnson, 1998: 36).

Bentuk krisis yang paling dirasakan di sektor pertanian adalah tingginya harga *input* pertanian, baik yang berupa bibit, pupuk, maupun insektisida/pestisida. Bahan baku kimiawi untuk produksi *input* pertanian yang masih merupakan bahan-

bahan import telah berdampak secara substansial pada kenaikan harga konsumen yang harus ditanggung oleh petani. Peningkatan upah buruh dan harga sewa lahan atau traktor juga dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan dampak krisis. Benih padi gogo berlabel biru dinyatakan mengalami kenaikan sebesar 90 persen. Perbandingan harga *input* pertanian lainnya disajikan dalam Tabel 3.

Selain kenaikan harga, keterlambatan pasokan *input* dari PUSKUD cukup meresahkan petani, meskipun belum berakibat pada kelangkaan persediaan yang mengkhawatirkan. Karena itu, pemangkasan jalur distribusi menjadi penting sehingga KUD bisa langsung mengelola pengadaan *input* dan mempunyai akses ke PUSRI Cilacap dipandang bermanfaat untuk segera dilakukan. Untuk daerah lahan kering, hal ini

Tabel 3
Dampak Krisis terhadap Perubahan Harga *Input* Pertanian di Semanu, Gunung Kidul 1998

Elemen input	Harga sebelum krisis	Satuan	Harga sesudah krisis (Okt.98)
Pupuk KCL	Rp 850,00	per kg	Rp 2.500,00
Pupuk urea	Rp 500,00	per kg	Rp 1.000,0
Pestisida: furadan	Rp 2.500,00	per dos	Rp 18.000,00
Pestisida: servin	Rp 15.000,00	per kg	Rp 65.000,00
Upah buruh/ sewa traktor	Rp 7.000,00	per hari	Rp 15.000,00
Sewa tanah	Rp 80.000,00	per tahun/(± 800 m ²)	Rp 100.000,00

penting karena sifat kegiatan pertanian di Gunung Kidul khas yaitu pada saat musim hujan datang, petani serentak menggarap lahan pertaniannya. Sifat serentak tersebut menuntut tersedianya *input* pertanian yang tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup memadai. Problem yang dihadapi adalah semakin langkanya barang, terutama untuk *input* pertanian. Sementara itu, untuk daerah yang aksesibilitasnya mudah dicapai, justru daya beli masyarakat terhadap barang tersebut menjadi kendala.

Respon petani akibat kenaikan harga *input* pertanian cukup beragam dan terkait dengan ketersediaan modal. Respon tersebut, antara lain, tidak menggunakan sama sekali, menggunakan hanya jika dirasa perlu, mengurangi dosis, atau mengusahakan agar dapat membeli *input* pertanian dan menggunakannya sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Selain berdampak negatif dalam *input* produksi, krisis berdampak positif terhadap harga produk pertanian. Semua jenis produk pertanian yang diusahakan petani di Semanu dinyatakan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sebagai contoh jagung mengalami kenaikan harga dari Rp 300,00 menjadi Rp 1.500,00; kedelai mengalami kenaikan harga dari Rp 2.100,00 menjadi Rp 4.750,00; dan ubi kayu basah mengalami

kenaikan harga dari Rp 250,00 menjadi Rp 725,00, dan masih banyak lagi jenis komoditi lain yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.

Kenaikan harga komoditi pertanian berdampak cukup baik bagi ekonomi rumah tangga tani. Sekalipun demikian, peningkatan pendapatan yang diperoleh tidak tampak digunakan untuk penguatan modal usaha atau diversifikasi usaha ekonomi rumah tangga. Dampak peningkatan pendapatan justru lebih terserap untuk usaha-usaha yang cenderung bersifat konsumtif. Banyak penduduk yang membangun rumahnya ini dimungkinkan karena biaya konstruksi atau renovasi rumah tidak mengalami peningkatan yang berarti, terutama didukung harga semen yang hingga akhir Agustus 1998 relatif stabil. Selain itu, konstruksi rumah pada umumnya lebih mengandalkan kayu yang dibudidayakan penduduk di lahan tegal dan pekarangan dan tidak memerlukan besi yang harganya cukup mahal. Pada sisi lain, pembelian perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik semakin menjadi mode sebagai simbol status rumah tangga.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa menurut tipologi strategi rumah tangga (*household strategy*) pada umumnya, penduduk petani di Semanu termasuk dalam kategori strategi konsolidasi

(*consolidation strategy*). Dalam strategi ini, menurut White (1991), petani lebih mengutamakan keamanan suplai makanan pokok. Hal ini berbeda dengan strategi akumulasi (*accumulation strategy*) yang dicirikan oleh penggunaan surplus satu kegiatan untuk memperoleh akses pada pendapatan yang lebih tinggi dari kegiatan lainnya, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Strategi yang paling memprihatinkan adalah strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang menempatkan petani untuk menerima setiap kegiatan ekonomi yang hampir tanpa investasi modal dan karenanya memberikan imbalan yang sangat rendah. Sektor pertanian tanaman pangan dan palawija merupakan sektor yang dipandang tetap mencukupi penghasilan rumah tangga dalam krisis ekonomi yang berlangsung tidak teredusir menjadi sekedar bertahan hidup (*survival strategy*) dengan kontribusi yang marjinal bagi ekonomi rumah tangga.

b. Peternakan

Seperti halnya di pertanian, krisis moneter mempunyai dampak positif terhadap peternakan di Gunung Kidul dalam bentuk meningkatnya harga komoditi ternak, khususnya sapi (lembu) dan kambing. Jenis sapi yang banyak dibudidayakan penduduk adalah

sapi metal dan limosin. Keduanya merupakan hasil inseminasi buatan (IB) dengan induk sapi jenis lokal. Jenis ini dagingnya tidak berlemak dan terutama untuk memenuhi kebutuhan daging hotel-hotel dan restoran di luar daerah Gunung Kidul melalui pedagang dari Tasikmalaya. Namun, akibat krisis, bibit IB menjadi sangat langka tersedia di pasaran. Karena dipandang menguntungkan, peternak menyatakan bersedia membayar tiga kali lipat (Rp 50.000,00) jika bibit IB tersedia. Sebelum krisis, IB berharga Rp 15.000,00.

Selain berfungsi untuk pupuk, ternak di Gunung Kidul merupakan tabungan (*saving*), namun belum mengarah pada investasi usaha. Ketika peternak menjual sapi dewasa, biasanya langsung membeli ternak kecil (*bakalan*) sebagai pengganti. Pada masa krisis, harga ternak meningkat cepat dan memberikan dampak yang cukup penting bagi ekonomi rumah tangga peternak. Karena cepatnya perubahan harga, petani yang tidak mengetahui informasi pasar dapat tertipu oleh pedagang yang membeli ternak dengan cara mendatangi petani di rumahnya.

Selain peningkatan harga akibat krisis, petani diuntungkan oleh musim. Pakan relatif tersedia cukup dan mudah didapat, terutama ditunjang oleh musim hujan, yakni hijauan makan ternak (HMT),

cukup panjang sehingga petani belum perlu mencari atau mendatangkan pakan ternak dari luar daerah. Pakan pada umumnya dibudidayakan sendiri di pematang (*galengan*) berupa rumput kolonjono dan pohon turi. Selain itu, jerami, *glaerecidae.sp*, dan seresah tebu juga merupakan bahan pakan ternak yang relatif mudah didapat.

Seperti halnya sapi, peternak kambing jenis *Jawa* mengalami pula dampak positif. Bibit kambing mudah didapat, pakan ternak cukup tersedia di pekarangan dan tegalan, dan harga jual mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada masa krisis. Hampir setiap rumah tangga mempunyai ternak kambing sebagai tabungan. Budi daya ternak lainnya yang sedang berkembang di Gunung Kidul adalah katak lembu (*bull-frog*). Pada masa krisis harganya mencapai Rp 14.000,00 per kilogram. Di zona selatan Gunung Kidul, nelayan-nelayan (misalnya di Sadeng, Kec. Rongkop, Kemadang di Kec. Tepus, Renean di Kecamatan Saptosari) mendapat keuntungan besar dari kenaikan harga ikan, udang, kepiting, dan lobster. Lobster yang dalam kondisi normal berharga sekitar Rp 14.000,00 ketika krisis meningkat menjadi Rp 400.000,00. *Booming* ini terjadi 4 bulan lalu, berlangsung selama satu bulan sekitar Maret—April 1998. Akhir-akhir ini, meskipun harganya masih cukup tinggi, harga lobster relatif telah

mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 75.000,00.

Dampak krisis moneter di sektor peternakan mempunyai bentuk yang berbeda untuk skala dan jenis usaha yang berbeda. Peternak tradisional yang skala usahanya kecil (rumah tangga) tidak terpengaruh krisis moneter dan bahkan dalam banyak hal diuntungkan oleh krisis. Sedangkan peternak ayam skala besar/modern, seperti PT. Agrifood di Semanu justru mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan pekerja dan PHK. Sumber utama kebangkrutan tersebut adalah tingginya harga pakan dan obat-obatan untuk ternak. Pakan dan obat-obatan ini pada umumnya diimport. Pakan ternak Charoen Pockphand, misalnya, diimport dari Thailand. Hal ini mempertegas kenyataan bahwa usaha-usaha skala besar kurang mempunyai kemandirian seperti ditunjukkan oleh ketergantungan struktur usahanya terhadap faktor eksternal, terutama kandungan import yang rentan terhadap pengaruh fluktuasi ekonomi makro seperti perubahan nilai tukar rupiah yang masih cukup tinggi.

c. Industri dan Perdagangan

Seperti halnya dampak krisis terhadap sektor peternakan, bentuk dampak krisis terhadap industri cukup bervariasi menurut jenis dan

skala usaha. Secara umum, pengusaha skala menengah dan besar mengalami dampak yang kurang menguntungkan. Usaha industri batu *keprus*, misalnya, telah mengurangi skala produksi dari pengoperasian 4 mesin menjadi 2 mesin. Demikian pula pada skala industri kecil dan kerajinan rumah tangga terdapat perbedaan dampak. Industri pande besi dan cor alumunium, karena terkendala mahalannya bahan baku, mengalami penurunan produksi secara drastis, meskipun peluang permintaan pasar lokal tersedia. Bahan baku untuk para perajin pande besi mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari harga Rp 7.000,00 per kg menjadi Rp 13.000,00. Demikian pula, industri pengolahan tempe dan tahu banyak memanfaatkan kedelai import dari Taiwan, Thailand, dan USA. Selain beralih ke kedelai lokal, banyak yang melakukan penurunan produksi karena mahalannya bahan baku. Kedelai lokal selama ini banyak terserap untuk usaha industri tahu. Menurut Dinas Perindustrian, usaha pengolahan tahu-tempe mengalami pengurangan produksi sekitar 15 persen.

Dampak positif berupa peningkatan pendapatan justru dirasakan oleh usaha industri kecil dan kerajinan rakyat pengolah bahan baku setempat, terutama yang mampu menjangkau pasar luar negeri, seperti kerajinan anyaman

bambu. Di wilayah lain Kabupaten Gunung Kidul, produk-produk kerajinan dengan kandungan lokal (*local content*) 100 persen seperti produk kerajinan kayu mengalami keuntungan yang cukup berarti. Produk-produk seperti *loro-blonyo* (ukuran orang) yang terbuat dari kayu mahoni diekspor ke Singapura dengan harga Rp750.000,00 per pasang. Begitu pula produk kayu lainnya, seperti miniatur buaya dan patung tradisional mengalami transaksi yang cukup besar sekitar Rp 780 juta rupiah untuk memenuhi permintaan konsumen di Canada. Kerajinan rakyat batu ornamen bahkan baru mampu menyuplai 40 persen peluang eksport. Keterbatasan ini, antara lain, karena kurangnya tenaga terampil, kesulitan pengambilan bahan baku, dan kenaikan suku cadang yaitu mata gergaji akibat pengaruh krisis moneter.

Hambatan usaha industri kerajinan di Kecamatan Semanu adalah sifatnya yang musiman (*seasonal*). Secara umum hambatan ini berlaku pula untuk keseluruhan daerah di Gunung Kidul. Konteks musiman ini digambarkan oleh aktivitas industri kerajinan yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan di pertanian. Ketika kegiatan pertanian memasuki masa tanam, khususnya ketika musim hujan berlangsung, para perajin akan mengesampingkan usaha industri

kerajinan dan lebih memusatkan kegiatannya pada usaha pertanian. Pola ini sudah berlangsung lama karena pengadaan bahan makanan menjadi prioritas utama. Setelah kegiatan ini selesai, baru mereka bekerja di sektor industri, walaupun hasil dari kegiatan industri ini lebih menguntungkan.

Bentuk krisis yang dirasakan oleh usaha perdagangan adalah adanya penurunan daya beli, yang berarti pula penurunan jumlah pembeli dan transaksi jual-beli. Pembeli di Kecamatan Semanu dipandang telah semakin melakukan penghematan dalam belanja. Pembelian jumlah item perdagangan cenderung semakin sedikit sehingga perputaran jumlah item barang dagangan menjadi sangat lambat. Bentuk dampak lainnya di perdagangan adalah menurunnya jumlah penghutang. Penduduk cenderung tidak lagi mudah berhutang dengan pertimbangan merasa sulit mengembalikan hutang, yang akhirnya akan menambah beban rumah tangga. Hal yang demikian juga dialami oleh usaha bank informal seperti *bank plecit*, yang menurun drastis jumlah peminjaman uang.

Praktek tukar barang (*barter*) pada umumnya telah berlangsung lama di Semanu, dan pada masa krisis ini, praktek barter semakin menguat. Dalam barter ini,

penduduk membawa barang hasil bumi seperti gaplek, kacang panjang, atau jagung ke kios atau warung untuk ditukarkan dengan barang-barang yang dibutuhkan. Barang yang ditukar pada umumnya lebih tinggi nilainya daripada barang yang diambil sehingga pembeli tidak perlu menyediakan uang tambahan. Jika nilai barang yang ditukarkan masih lebih tinggi daripada barang yang diambil, penduduk akan memperoleh pengembalian uang.

Krisis juga telah mendorong penduduk, khususnya yang ter-*PHK* dan mempunyai pesangon, untuk membuka usaha dagang (*warung*), baik di rumah maupun di pasar. Usaha-usaha baru tersebut juga mengalami dampak krisis seperti disebutkan di atas yaitu kurangnya daya beli masyarakat dan menurunnya jumlah pembeli. Meskipun kondisinya sulit dan pendapatan yang diperoleh relatif kecil, alternatif berdagang dipilih sebagai *survival strategy* karena dipandang sebagai usaha yang tidak memerlukan banyak persyaratan dan keahlian (*easy entry*). Sebagian usaha berdagang ini dilakukan di luar daerah Gunung Kidul, terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Jakarta, dan daerah pinggirannya.

d. Ketenagakerjaan

Selama krisis berlangsung, memang ditemukan adanya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), baik yang bersifat lokal dari daerah setempat maupun dari luar Dati II Gunung Kidul. Data jumlah PHK yang pasti masih simpang siur sebagai akibat dari perbedaan pengertian PHK. Sebagai contoh, jumlah PHK dari Departemen Tenaga Kerja berbeda dengan yang dikumpulkan oleh instansi lain dalam wilayah dan waktu yang sama karena ada yang dikaitkan dengan program penanggulangan pengangguran. Cara pekerja menyikapi PHK cukup beragam. *Pertama*, sebagian kecil dari pekerja PHK kembali ke daerah asal dan kembali menekuni pekerjaan yang dilakukan sebelum merantau, seperti memanfaatkan potensi daerah yang ada, yakni kerajinan rumah tangga, seperti sangkar burung dan anyaman bambu. *Kedua*, bekerja pada sektor pertanian karena musim penghujan relatif panjang. *Ketiga*, melakukan sirkulasi kembali untuk mendapatkan pekerjaan di kota, terutama sektor informal. *Keempat*, memperbaiki pematang sawah dan mengumpulkan kayu bakar, melakukan kegiatan lain yang dipandang sangat ekonomis seperti menangkap burung. *Kelima*, menjadi peserta pengerahan tenaga kerja dari program pemerintah seperti

PDKMK, PDM-DKE, dan sejenisnya yang bersifat padat karya.

Dengan demikian, bentuk-bentuk krisis di bidang ketenagakerjaan, seperti peningkatan jumlah penganggur dalam segala bentuknya, untuk sementara belum begitu tampak mencolok. Secara umum dapat dikatakan bahwa krisis yang berlangsung sampai November 1998 belum berdampak buruk terhadap ketenagakerjaan lokal. Beberapa pekerja yang mengalami PHK lokal maupun PHK dari daerah lain sebagian besar sudah bekerja kembali. Sebagian ada yang bekerja pada pekerjaan sebelumnya dan sebagian besar dari mereka bekerja lagi pada kegiatan sektor informal, terutama di perkotaan di luar Dati II Gunung Kidul. Dengan demikian, dampak krisis ekonomi di bidang ketenagakerjaan justru lebih banyak dirasakan di perkotaan daripada di perdesaan. Mobilitas pekerja dari perdesaan ke perkotaan, meskipun volumenya cenderung menyusut karena krisis ekonomi, proses tersebut terus berjalan. Selama di perkotaan masih lebih menjanjikan harapan daripada di daerah asal, maka migrasi dan sirkulasi akan tetap dilakukan sebagai strategi untuk mendapatkan pekerjaan. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan lebih mudah daripada mereka tetap tinggal di perdesaan.

e. Kesehatan dan KB

Krisis moneter yang berkepanjangan ini diperkirakan akan berdampak pula pada partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan KB. Hasil diskusi pada tingkat meso dan mikro dengan Pemda Dati II Gunung Kidul menunjukkan bahwa kunjungan pemeriksaan kesehatan pada puskesmas pembantu dan puskesmas cenderung mengalami penurunan. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa kemungkinan derajat kesehatan penduduk justru bertambah baik. Meskipun demikian, hasil analisis Susenas Kor 1996, 1997, dan 1998 menunjukkan bahwa keluhan kesehatan sebagai indikator awal angka morbiditas untuk Daerah Istimewa Yogyakarta justru meningkat dari 31 persen (1996) menjadi 34 persen (1997) dan pada 1998 sekitar 37 persen, sedangkan angka nasional hanya sekitar 26 persen. Ini berarti bahwa penduduk dalam kondisi *ringkih* banyak mengalami keluhan kesehatan dan semakin tidak mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Demikian pula, tingginya harga obat-obat modern menyebabkan pula penurunan pembeli obat pada toko obat dan apotek. Hasil Susenas 1997 dan 1998 mendukung keadaan ini, menurunnya persentase pemanfaatan fasilitas kesehatan modern diikuti pula oleh peningkatan ke

cara pengobatan sendiri dari 27 persen (1997) menjadi 35 persen (1998).

Suatu hal yang memprihatinkan adalah apabila penduduk yang *ringkih* dan kurang berdaya untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan obat modern yang ada menderita sakit. Kemungkinan penduduk untuk mencari dan memanfaatkan pengobatan alternatif yakni pengobatan tradisional yang lebih murah tetap dapat terjadi. Penggunaan obat-obat tradisional tidak dapat disalahkan. Akan tetapi, apabila pengobatan tradisional gagal untuk menyembuhkan penyakit dan ketika sakitnya sudah parah baru dibawa ke pelayanan kesehatan modern, biayanya menjadi semakin tidak terjangkau.

Di bidang pelayanan kontrasepsi (KB) hampir terjadi nasib yang sama. Jenis kontrasepsi apa pun sangat mahal harganya. Sementara itu, daya beli masyarakat relatif tetap dan bahkan cenderung turun. Sebagai contoh, harga kontrasepsi susuk KB sekitar Rp 95.000,00, sebelum krisis hanya Rp25.000,00. Suntik KB sekitar Rp15.000,00 yang sebelumnya Rp2.500,00. Kontrasepsi AKDR yang dulunya gratis, sekarang mereka harus membayarnya minimal Rp50.000,00 dan bahkan ada yang mencapai Rp 250.000,00. Sama halnya dengan pil dan sterilisasi yang dulu kebanyakan diberikan secara gratis atau

dibiayai oleh organisasi tertentu, sekarang mereka harus membayar cukup mahal. Seperti halnya sterilisasi tubektomi, minimal mereka membayar Rp150.000,00. Tidak ada satu pun alat kontrasepsi yang dapat diperoleh secara gratis, kecuali kontrasepsi tradisional. Perlu diketahui bahwa di Dati II Gunung Kidul, sekitar 44 persen dari akseptor menggunakan kontrasepsi AKDR, suntik 21 persen, pil 20 persen, susuk KB 8 persen, dan sterilisasi 4 persen. Dapat diperkirakan, berapa jumlah dana yang harus disiapkan oleh masyarakat setempat apabila jumlah akseptor pada tahun 1997 diperkirakan sekitar 101.321 dari 158.586 pasangan usia subur. Tampaknya, pasangan usia subur kurang mampu pun harus mengupayakan sendiri kontrasepsi secara mandiri kalau ingin menjadi akseptor. Hasil Susenas menunjukkan bahwa prevalensi kontrasepsi mengalami penurunan dari 70 persen (1997) menjadi 66 persen (1998). Penurunan ini diperkirakan terjadi karena krisis ekonomi dan masyarakat semakin kurang mampu dalam pengadaan kontrasepsi secara mandiri. Pada saat masyarakat membutuhkan dana untuk pengadaan kontrasepsi, apakah ada alokasi dana seperti program JPS, JPKM, SPSDP, dan sejenisnya?

f. Pendidikan

Bentuk krisis di bidang pendidikan tampaknya mengalami nasib yang sama seperti masalah yang dihadapi pada bidang kesehatan dan KB. Pada saat penelitian dilakukan (awal November 1998) diskusi tim peneliti dengan Pemda mendapatkan informasi bahwa belum didapatkan siswa yang putus sekolah pada tingkat SD dan SLTP seperti yang dilaporkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan. Akan tetapi, laporan dari luar instansi tersebut menunjukkan cukup banyak siswa putus sekolah pada kedua jenjang pendidikan tersebut. Cukup sulit memang, mana di antara kedua sumber data yang lebih mendekati kenyataan di lapangan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa jumlah siswa putus sekolah berhubungan positif dengan bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan ini menyebabkan tekanan ekonomi rumah tangga akan berlangsung terus-menerus sehingga akan semakin menjauhkan penduduk dari kebutuhan nonpangan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pendidikan. Pada giliran berikutnya diperkirakan akan terjadi putus sekolah. Asumsi ini belum dirasakan, mungkin di awal atau pertengahan 1999 akan dirasakan

bilamana krisis memang akan berkepanjangan.

Gejala munculnya anak sekolah yang cepat mengantuk di kelas, pingsan pada saat mengikuti upacara, berangkat sekolah belum *sarapan*/makan pagi, yang pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi, namun saat ini sudah terjadi. Ini memberikan indikasi bahwa ada kekurangan makan, gizi, dan nutrisi pada siswa. Hal yang menarik adalah sebelum masa krisis ekonomi, ada program makanan tambahan untuk siswa TK dan SD sebagai upaya penambahan kecukupan pangan dan gizi. Pada saat ini, saat siswa memerlukan hal tersebut, justru tidak terdengar kabarnya. Pada sisi lain, tampak jelas bahwa pakaian seragam yang dipakai siswa semakin bertambah kusam, sepatu lusuh, dan siswa cenderung tidak jajan di sekolah. Warung di sekitar sekolah menjadi semakin dijauhi oleh siswa di perdesaan lahan kering. Sebaliknya, di daerah kota, banyak dijumpai warung nasi peduli untuk mahasiswa. Ini sangat ironis. Siapa yang sebenarnya harus dibantu?

Respon terhadap Krisis

Pada saat penelitian dilakukan, mulai dirasakan adanya tanda-tanda penurunan daya beli masyarakat terhadap berbagai pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Apabila

keadaan ini berlangsung secara terus-menerus, sudah barang tentu akan berpengaruh pada kehidupan penduduk. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan dan mempersiapkan strategi untuk menanggulangi berbagai bentuk krisis yang telah dan akan dialami oleh penduduk. Ini berarti bahwa baik pemerintah maupun masyarakat menganggap bahwa daya tahan untuk menyiasati krisis ekonomi terbatas. Berbagai bentuk respons dari pemerintah dan rumah tangga dalam menanggulangi krisis ekonomi adalah sebagai berikut.

a. Respons Pemerintah

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program aksi penanggulangan dampak krisis ekonomi yang lebih bersifat khusus seperti Penanggulangan Dampak Kekeurangan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jaring Penanggulangan Kesehatan Masyarakat (JPKM), *Social Protection Development Program* (SPSDP), Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), penjualan kebutuhan pokok dengan harga murah kepada rumah tangga miskin dan atau keluarga prasejahtera. Selain program khusus ini, pemerintah secara berkesinambungan telah mengalokasikan program yang bersifat reguler, baik yang bersifat

sektoral maupun lintassektor. Beberapa peran pemerintah dalam berbagai sektor untuk menanggulangi krisis moneter, antara lain, adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam rangka memperluas kesempatan kerja telah dialokasikan dana untuk penciptaan kesempatan kerja yang bersifat reguler, baik lokal, sektoral, maupun yang bersifat khusus. Cukup banyak program aksi yang telah dilaksanakan, beberapa di antaranya yang cukup dikenal oleh masyarakat antara lain adalah PDKMK, PDM-DKE, TKMT, TKT, Padat Karya, dan Inpres Dati II. Kesemuanya ditujukan untuk memacu kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. *Kedua*, di bidang kesehatan dan KB diberikan bantuan pelayanan kesehatan dan KB secara gratis, terutama untuk rumah tangga miskin dan atau keluarga prasejahtera I. Di bidang pendidikan, bagi peserta didik yang berasal dari rumah tangga miskin/ prasejahtera I, diberikan beasiswa sampai dapat menyelesaikan pendidikan 9 tahun. *Ketiga*, di bidang pemenuhan kebutuhan pokok, telah dilakukan penjualan bahan makanan pokok dengan harga sangat murah untuk rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera I. Di samping itu, seringkali dilakukan operasi pasar bahan makanan pokok dengan tujuan mengendalikan dan menurunkan harga agar terjangkau oleh

masyarakat setempat. Dana yang tersedia dari berbagai program khusus tersebut cukup besar dan apabila dikelola dengan tepat mengenai sasaran, krisis ekonomi tidak akan begitu dirasakan oleh penduduk lahan kering pada masa mendatang.

b. Respons Rumah Tangga

Meskipun dampak krisis belum begitu dirasakan oleh sebagian besar rumah tangga, mereka sudah merencanakan dan sebagian justru sudah melakukan pengelolaan kebutuhan dasar yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Bentuk respons pada rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua yakni untuk kepentingan individu dan kepentingan umum. Respons untuk keperluan individu tampak pada makanan substitusi seperti beras-jagung, peningkatan konsumsi ikan asin sebagai ganti daging dan telur, pengurangan penggunaan minyak goreng dengan merebus dan atau memanggang, serta upaya-upaya lain yang mampu mereka lakukan sebagai bentuk penghematan. Hal yang sama juga terjadi untuk pengeluaran yang bukan makanan seperti penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, pembelian pakaian baru, dan sejenisnya.

Respons untuk kepentingan umum menyangkut terutama dalam hal sosial kemasyarakatan, seperti perhelatan yang cukup

membutuhkan biaya. Dalam keadaan resesi ini, penghematan yang biasanya sangat sulit dilakukan justru dapat dilaksanakan tanpa mendapat tantangan dari masyarakat, seperti pesta perkawinan dan perhelatan. Hal ini tampak jelas semakin sederhananya kualitas pelaksanaan perhelatan sosial-budaya, jumlah tenaga yang terlibat, dan jumlah undangan yang dihadirkan cenderung menurun, serta menurunnya frekuensi perhelatan dibandingkan dengan sebelum krisis moneter. Pada saat krisis seperti ini, justru mereka lebih realistis bersikap dalam penyelenggaraan perhelatan sosial budaya yang sebelumnya sangat sulit dilakukan.

Selain kedua bentuk respons tersebut, mereka telah menyiapkan pula bentuk pemenuhan cadangan hidup bilamana krisis ekonomi akan berlangsung lama. Bentuk cadangan hidup yang mudah untuk dilihat, antara lain, pemilikan ternak sapi, kambing, ayam, pohon besar, dan persediaan makanan jagung secara individu. Masih ada cadangan hidup yang dikelola secara sosial dan kelompok, seperti lumbung desa yakni tempat penyimpanan bahan makan, yang justru semakin berperan dalam masa krisis seperti ini. Pada sisi lain, penduduk di daerah lahan kering ini hampir semuanya adalah pekerja yang ulet, sanggup bekerja keras, dan kalau terpaksa pekerjaan

3D (*Dangerous, Difficult, Dirty*) pun dilakukan. Etos kerja ini tampak ketika PHK sedang marak. Banyak pekerja dari daerah ini terkena PHK dari berbagai perusahaan di sejumlah kota besar di Jawa. Mereka hanya pulang sebentar kemudian kembali lagi ke daerah tujuan untuk mendapatkan pekerjaan apa pun jenisnya, dan kalau terpaksa membuka usaha sendiri di sektor informal.

Respons terhadap krisis ekonomi menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi rumah tangga desa yang cukup tinggi. Penduduk pedesaan lahan kering Gunung Kidul tidak memosisikan dirinya untuk menggantungkan pada adanya bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah cenderung tidak diperhitungkan dalam ekonomi rumah tangga. Apabila pemerintah memberikan bantuan, kondisi mereka mungkin akan mengalami perubahan. Akan tetapi, bilamana bentuk bantuan dipandang tidak cukup layak, dan mekanisme operasionalisasi bantuan justru mempersulit dalam proses pemanfaatannya, mereka akan mengabaikan bantuan tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk pedesaan lahan kering mempunyai resistensi dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis ekonomi. Karakter utama

yang mendukung keunggulan perdesaan adalah kemandirian yang ditunjukkan oleh rendahnya derajat ketergantungan terhadap sektor ekonomi, terutama barang-barang yang berasal dari luar daerah serta kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan sendiri. Sebagai akibatnya, sampai pada saat penelitian dilakukan dampak krisis ekonomi belum begitu dirasakan di pedesaan yang berbasis pertanian lahan kering. Sejauh berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, penduduk pedesaan belum menampakkan kecemasan. Penghematan memang dilakukan, tetapi belum terjadi penurunan secara drastis dalam kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok. Penghematan lebih ditujukan pada konsumsi barang-barang sekunder yang tidak begitu diperlukan.

Prospek sektor ekonomi pedesaan lahan kering dapat dibedakan menjadi dua sektor yang bersifat *survivor* dan *inferior*. Sektor yang bersifat *survivor* adalah kegiatan ekonomi yang akan tetap bertahan, meskipun hampir tanpa pertumbuhan, seperti pertanian dan peternakan. Kemudian sektor yang bersifat *inferior* adalah kegiatan ekonomi yang dalam menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan tidak dapat bertahan dan akan banyak mengalami kemunduran seperti sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dampak yang dirasa-

kan adalah pada sektor nonekonomi, terutama yang berhubungan dengan aspek pelayanan, seperti kesehatan dan KB, yang miskin kandungan lokal. Kedua sektor ini pada masa depan diperkirakan akan semakin bergeser pada pola tradisional dan swakarsa sebagai alternatif, yang efektifitasnya masih dipertanyakan. Di bidang ketenagakerjaan, sampai saat penelitian dilakukan belum menjadi masalah yang sangat mendesak. Akan tetapi, hal ini akan menjadi masalah yang serius bilamana krisis semakin bertambah buruk dan berkepanjangan dan tidak lagi memberikan kesempatan kerja pada sektor informal di perkotaan.

Dalam upaya menanggulangi berbagai masalah yang sudah dan akan dihadapi sebagai dampak krisis ekonomi, pemerintah telah merespons melalui berbagai program, beberapa di antaranya adalah PDKMK, PDM-DKE, SPSDP, JPKM, JPS, Inpres Dati II, dan lain-lainnya, baik yang bersifat khusus maupun reguler. Tampaknya cukup sulit untuk mengatakan bahwa program-program tersebut telah berhasil dalam menanggulangi dampak krisis ekonomi. Tujuan dan sasaran program yang cukup bagus ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena sulitnya mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran. Akurasi data identitas sasaran yang akan ditanggulangi sangat tidak

memadai sehingga program-program tersebut kurang tepat pada sasaran yang diharapkan. Untuk mendapatkan data yang rinci tentang rumah tangga miskin, pekerja terkena PHK, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai identifikasi rumah tangga yang rentan, bukan pekerjaan yang mudah. Banyak kepentingan terselubung yang ada di dalamnya. Yang terjadi di pedesaan lahan kering adalah pendataan dilakukan secara tergesa-gesa dan serentak dengan pemahaman konsep operasional yang berbeda-beda dan cenderung bias untuk kepentingan setiap instansi terkait. Akibat dari pendataan yang kurang akurat sasaran dari program menjadi kurang tepat dan muncul gejala kecemburuan antara yang mendapatkan dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Respons penduduk pedesaan lahan kering terhadap krisis ekonomi dapat dilihat dalam dua bentuk yakni untuk kepentingan individu dan kepentingan umum. Respons untuk kepentingan individu dapat dilihat dari berbagai model penghematan untuk pengeluaran, baik pengeluaran untuk makanan maupun bukan makanan. Respons untuk kepentingan umum terutama terjadi dalam hal sosial kemasyarakatan, seperti perhelatan sosial-budaya yang banyak membutuhkan biaya. Dalam resesi

ekonomi seperti ini penghematan yang biasanya sangat sulit dilakukan justru dapat dilaksanakan tanpa mendapat tantangan dari masyarakat. Bentuk penghematan ini juga terjadi di sektor pertanian dan peternakan, terutama dengan semakin mahalnya biaya/*input* untuk kegiatan tersebut. Bentuk-bentuk cadangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup tampaknya telah disiapkan, baik untuk individu maupun kelompok. Pemilikan aset ternak dan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis, persediaan bahan makan yang dikelola secara individu, dan lumbung desa untuk keperluan kelompok dapat digunakan sebagai jaring pengaman sementara dalam menghadapi krisis ekonomi di daerah lahan kering.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan Dampak Krisis yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Dwiyanto, Dra. Endang Ediasuti, M.S., Drs. Abdul Haris, M.Si., Drs. Setiadi, M.Si., Dra. Sukamtiningsih, Dra. Wini Tamtiari, dan Drs. Bambang Wicaksono sebagai anggota tim peneliti di daerah lahan kering.

Referensi

- Chris, Manning. 1998. *Indonesia's economic crisis; note on employment strategies*. Canberra: Australian National University.
- Cole, David C. dan Slade, Betty F. 1998. "Why has Indonesia's financial crisis been so bad?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 24(2): 61-66.
- Dieter, Herbert. 1998. "The role of financial markets and the IMF: the genesis of Asia's financial crisis". *Development and Cooperation* No.5: 8-11
- Evans, Kevin. 1998. "Survey of recent developments". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 34(3): 5-36.
- Johnson, Colin. 1998. "Survey of recent developments". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34(2): 3-60.
- Ramlli, Rizal. 1986. "Indonesian industry: between goals and reality". *Prisma*, No. 27: 19-35, March.
- Soesastro, Hadi dan M. Chatib Basri. 1998. "Survey of recent developments". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 24(1): 3-54.
- Tukiran, Endang Ediasuti dan Sukamdi. 1998. *Identifikasi pengangguran dati II Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- United Nations Development Programme. 1998. *Employment challenges of the Indonesia economic crisis*. Jakarta: United Nations Development Programme and International Labour Organization.
- White, Benyamin. 1991. *Rural non-farm employment in java: recent developments, policy issues, and research needs*. The Hague. Institute of Social Studies Advisory Service.
- Wirakartakusumah, Djuhari and Akhmad Yani. 1998. *Impact of monetary crisis on unemployment*. Jakarta: Department of Man Power.
- Yogyakarta. Kantor Statistik Propinsi. 1998. *Survai sosial ekonomi nasional 1997*. Yogyakarta.
- — — — —. 1999. *Survai sosial ekonomi nasional 1998*. Yogyakarta.
- — — — —. 1999. *Analisis perkembangan kesejahteraan rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997/1998*. Yogyakarta: kerja sama Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UNFPA. (Laporan Sementara)